



PROFIL DAERAH

Kabupaten Berau

TAHUN **2023**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

INFORMASI BUKU

ISSN	:	
No. Publikasi	:	
No. Katalog	:	
Ukuran Buku	:	21,0 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	:	1 + 169 halaman
Naskah	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Disunting Oleh	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Gambar Kulit	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Diterbitkan Oleh	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Sumber Foto	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

TIM PENYUSUNAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Wakil Ketua : Kepala BPS Kabupaten Berau
Sekretaris : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

1. Kelompok Kerja Identifikasi Kebutuhan Data, Rancangan dan implementasi

Ketua : Agus Padli, SE
Anggota : 1) Arrahmi Widya Ratna, S.Pi.
2) Muhammad Rizki Yudistira, S.Tr.Stat

2. Kelompok Kerja Pengumpulan Data

Ketua : Ali Husni, S.Kom
Anggota : 1) Mustafa Kholiq, S.Tr. Stat
2) Andriyadi, S.Sos
3) Sedewo Winarno, S.Kom

3. Kelompok Kerja Pengolahan dan Analisa Data

Ketua : Leny Damayanti, S.Stat
Anggota : 1) Lita Januarti Hakim, S.ST, M.Si.
2) Jami'atul Mualifah, S.ST

4. Kelompok Kerja Diseminasi dan Publikasi

Ketua : Abdul Wahab Syakhrani
Anggota : 1) Winda Rezky Nur'Ain, A.Md.Ds
2) Ervin Trisna Amijaya
3) Gusti Rozhaldo Defta Yolanda, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Profil Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Buku Profil Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan salah satu media diseminasi data statistik sektoral Kabupaten Berau yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Data yang dimuat dalam buku ini adalah data-data Tahun 2023 hasil kompilasi data-data statistik sektoral dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau dan Instansi vertikal lainnya.

Buku ini menyajikan data statistik sektoral dan data statistik dasar dengan pembagian tematik berupa data umum, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Kabupaten Berau berdasarkan data-data statistik sektoral.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik, semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi dasar untuk berbagai pihak yang membutuhkan baik masyarakat, stakeholder terkait maupun pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan daerah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Desember 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Berau
Kepala,

H. Didi Rahmadi, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680811 199503 1 003





BUPATI BERAU
Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd

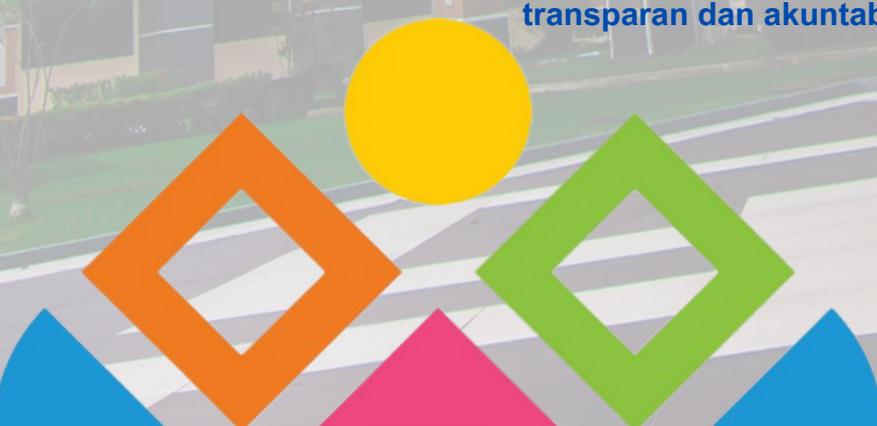
WAKIL BUPATI BERAU
H. Gamalis, SE

VISI

“ Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.”

MISI

- Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
- Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
- Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
- Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel





18 PROGRAM UNGGULAN

1. Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan dengan SIGAP
2. Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 juta per RT
3. Pembangunan rumah sakit tipe B termasuk layanan PCR gratis
4. Gratis iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu
5. Gratis fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
6. Penyediaan 1000 titik Wifi gratis hingga ke tingkat Desa
7. Peningkatan Infrastruktur Jalan untuk menunjang perekonomian Kampung dan kota
8. Peningkatan program Beasiswa Berau cerdas, 1000 Laptop untuk Guru dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi Pelajar yang tidak mampu
9. Peningkatan Insentif untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing rohani dan Tenaga Pendidikan (GURU dan PAUD)
10. Program peningkatan sarana fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di seluruh Kampung.
11. Pembangunan kawasan terpadu pusat seni, budaya dan kreatifitas (terdiri dari taman budaya, Amphitheater, Pusat kreatifitas & kawasan UMKM Terpadu) serta Pembangunan Balai Adat
12. Bantuan Tunai Langsung bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-9
13. Revitalisasi bangunan bersejarah (Keraton, Makam bersejarah, dll)
14. Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi
15. Pengembangan sarana & prasarana destinasi Pariwisata
16. Menyediakan fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta kredit lunak kepada UMKM
17. Tata kelola pemerintahan yang bersih & berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital teknologi
18. Bantuan layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu



TENTANG BERAU CITY BRANDING

- **Brand Campaign**

BERAU MOVE ON

Sebuah gerakan (brand activation) untuk menegaskan perubahan seiring dengan hadirnya brand baru Kabupaten Berau. Diharapkan dengan gerakan ini, hadir antusiasme dan kesepahaman bahwa Berau yang kita cintai harus benar-benar lestari. Saatnya mengarahkan wajah pada masa depan Berau sebagai Ecocity, bergeser dari dominasi pembangunan ekonomi berbasis mineral tambang tak terbarukan, menuju pendekatan pembangunan terbarukan yang berorientasi pada kelestarian alam, kekayaan budaya dan kreativitas. Selamat datang era keberlimpahan baru: ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi orange.

- **Konsep Logo**



Dari ketiga aspek yang ingin dikenalkan Kabupaten Berau, terdapat satu kesamaan pada masing-masing sektor ekonomi yaitu ekonomi yang “berkelanjutan”

- Memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan
- Memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan
- Mengusung ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai salah satu bentuk ekonomi berkelanjutan.



Menggunakan huruf 'b' yang disederhanakan menjadi sebuah simbol dasar yang memorable, sekaligus menjadi identitas untuk melestarikan fauna khas Berau yaitu penyu sebagai salah satu potensi ekonomi biru.



Simbol ekspresi dinamis ekonomi kreatif yang menjadi sektor potensial Berau di masa depan khususnya di wilayah perkotaan



Simbol daun (daratan) menggambarkan kehutanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai potensi ekologis Berau sekaligus komitmen untuk berpihak pada pembangunan ramah lingkungan (ekonomi hijau). Potensi pertambangan juga akan diarahkan pada pendekatan pro lingkungan berkelanjutan

- **Logo Utama**



DAFTAR ISI . . .

Informasi Buku .i

Tim Penyusun .ii

Kata Pengantar .iii

Visi & Misi .iv

18 Program Unggulan .v

Tentang Berau City Branding .vi

Daftar isi .vii

BAB 1 SEKILAH KABUPATEN BERAU

1

BAB 2 ASPEK GEOGRAFI

15

**BAB 3 ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

37

BAB 4 ASPEK PELAYANAN UMUM

66



BAB 1

SEKILAS KABUPATEN BERAU



PENDAHULUAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Sebelah Timur berbatasan dengan laut Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Sebagai daerah dengan perkembangan pariwisata, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan cukup pesat, informasi tentang Kabupaten Berau perlu dituangkan ke dalam buku profil daerah sehingga informasi tersebut dapat dijadikan rujukan ataupun wawasan bagi berbagai kalangan.

Melalui Buku Profil Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Berau dari segala aspek. Profil daerah Kabupaten Berau tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang bertujuan untuk melakukan rujukan, namun bagi berbagai kalangan yang membutuhkan informasi- informasi terkait Kabupaten Berau.

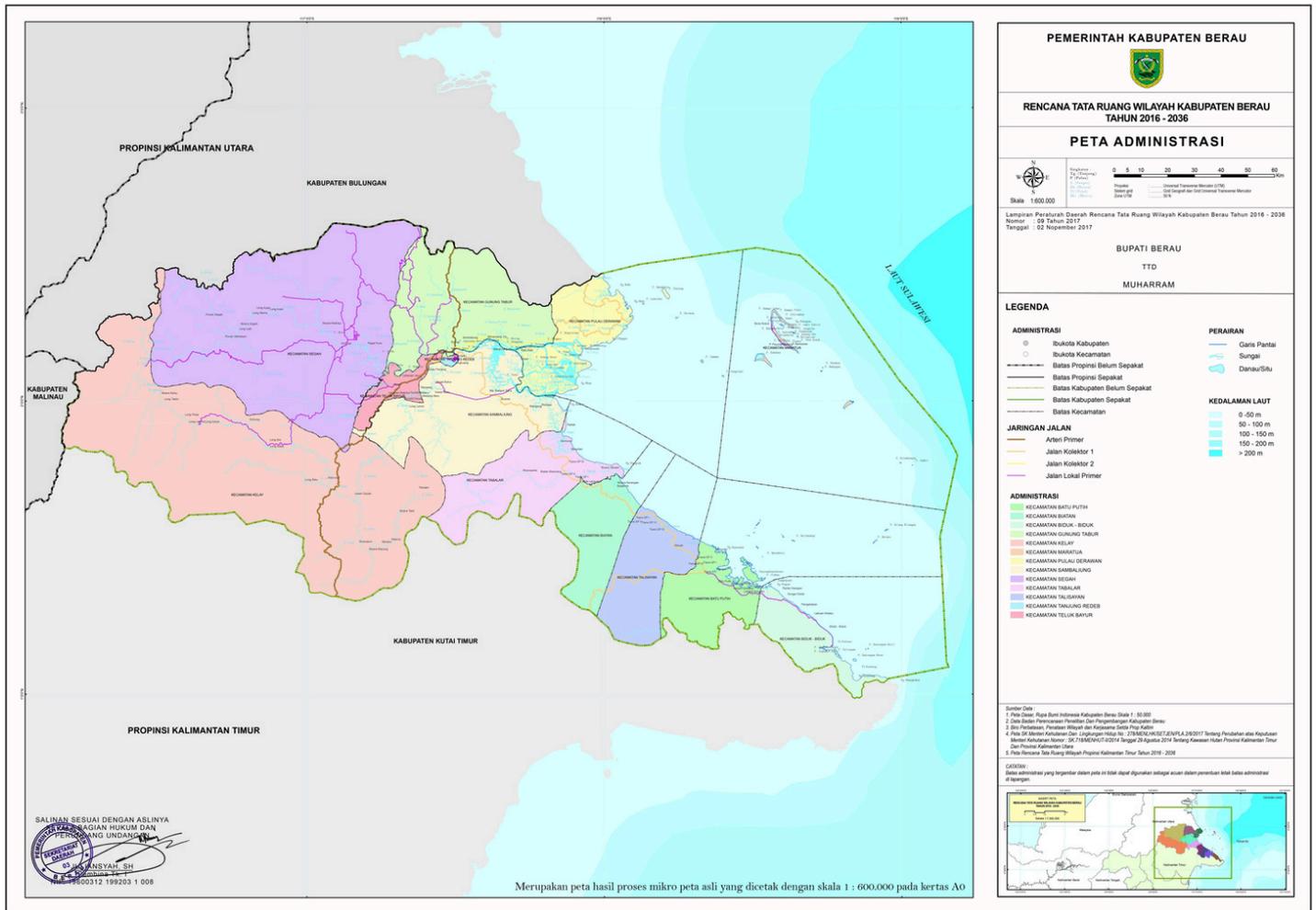
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Berau adalah untuk mengumpulkan dan memberikan berbagai macam informasi terkait berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, perekonomian, dan inovasi-inovasi daerah yang dilakukan. Selain itu tujuan penyusunan Buku Profil daerah Kabupaten Berau adalah data-data dan informasi yang terangkum dalam kedalam profil daerah tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh eksternal Pemerintah Kabupaten Berau, tetapi juga oleh internal Pemerintah Kabupaten Berau.





PETA WILAYAH KABUPATEN BERAU



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Berau Kabupaten Berau



LUAS WILAYAH KABUPATEN BERAU

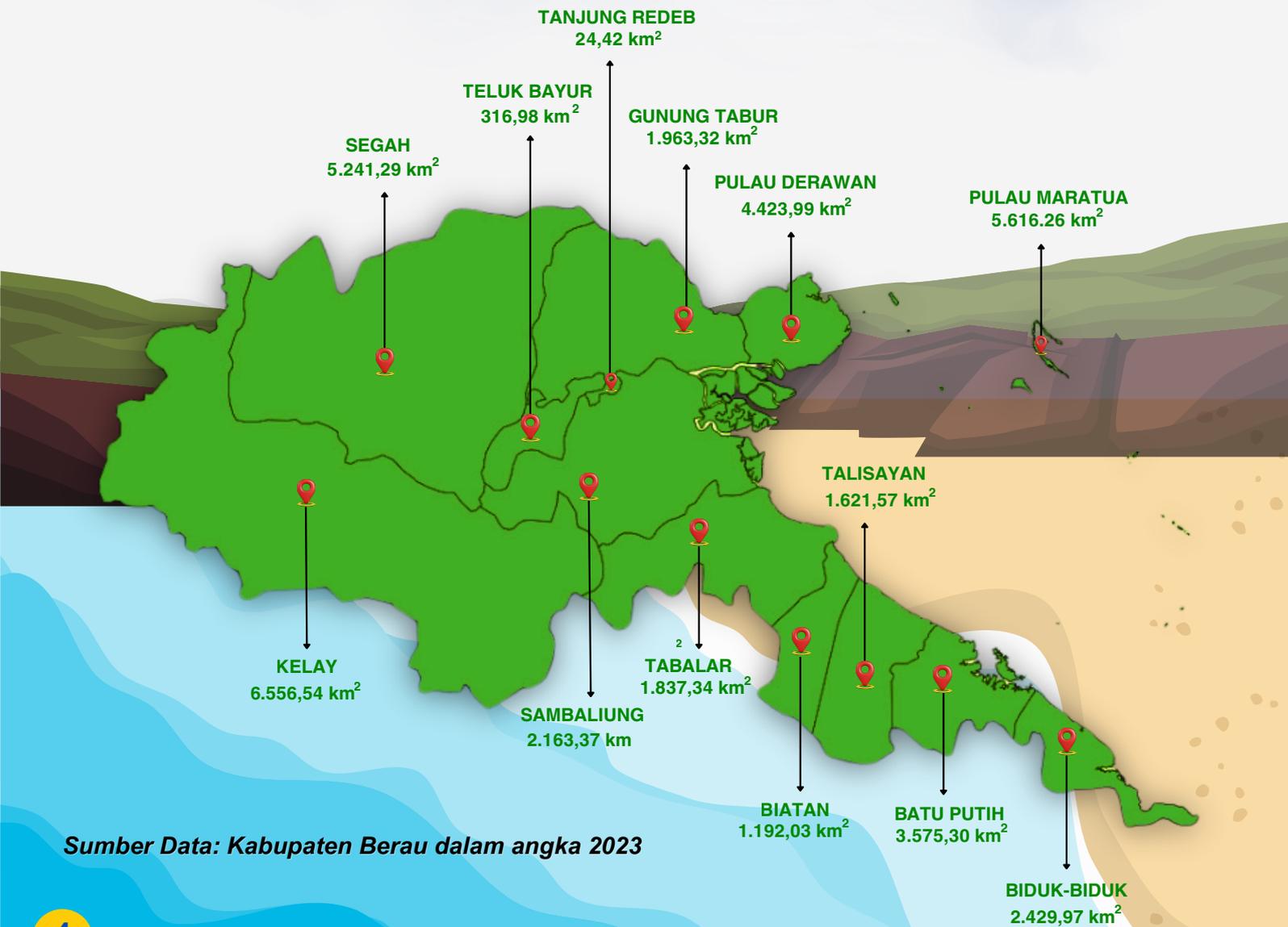
36.962,37 km²

PERAIRAN

14.729,85 km²

DARATAN

22.232,53 km²



Sumber Data: Kabupaten Berau dalam angka 2023

MAKNA LAMBANG KABUPATEN BERAU



Warna Hijau

berarti subur kekayaan hutan dan alam Berau.



Warna Kuning

berarti kemuliaan, keagungan dan kebijaksanaan.



Warna Hitam

berarti ketahanan jiwa.



Warna Putih

berarti kesucian dan keramah tamahan masyarakat Berau.



PERISAI

Berarti senjata dan pelindung dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kemakmuran



ROTAN

Yang berjalin dan melingkar bundar (kayu bundar 17 buah) pada tepi lambang melukiskan, Persatuan dan kesatuan sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945



BINTANG LIMA

Melukiskan lambang negara Pancasila adalah dasar falsafah hidup masyarakatnya sebagaimana bagian dari pada negara kesatuan Republik Indonesia



PITA PUTIH & BURUNG

KABUPATEN BERAU yang terdapat pada PITA PUTIH adalah Daerah Otonom Kabupaten Berau

Burung melukiskan hasil sarang burung (sarang burung putih dan sarang burung hitam yang juga merupakan salah satu hasil daerah disamping rotan, kayu gaharu dan lain-lain.



BUNGA PADI

Berarti daerah Berau adalah agraris dimana sebagian besar masyarakatnya pekerjaannya bercocok tanam.



SUMPITAN DAN MANDAU

Berarti melambangkan keberanian dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran serta keuletan dalam perjuangan



PENYU & SISIK PENYU

Penyu adalah melukiskan hasil perikanan yang merupakan hasil daerah terbesar disamping hasil daerahnya dan Sisik penyu berjumlah 8 berarti bulan diproklamasikannya Negara Republik Indonesia (bulan Agustus)



TULISAN BATIWAKKAL

Pada pita kuning terdapat tulisan BATIWAKKAL adalah bahasa daerah daerah asli yang memberikan pengertian bahwa usaha masyarakatnya tidak henti-hentinya melaksanakan tugas kewajibannya lengkap, cukup baik dan sempurna dengan jalan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.



SEJARAH KABUPATEN BERAU



KERATON SAMBALIUNG



KERATON GUNUNG TABUR

Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Menurut sejarah Berau, Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Surya Nata Kesuma dan Isterinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahan kerajaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati (sekarang menjadi lokasi pertambangan Batu Bara PT. Berau Coal).

Aji Raden Suryanata Kesuma menjalankan masa pemerintahannya tahun 1400 – 1432 dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat. Pada masa itu dia berhasil menyatukan wilayah pemukiman masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung.

Di samping kewibawaannya, kedudukan Aji Raden Suryanata Kesuma juga sangat berpengaruh, menjadikan dia disegani lawan maupun kawan. Untuk mengenang jasa Raja Berau yang pertama ini, Pemerintah telah mengabdikannya sebagai nama Korem 091 Aji Raden Surya Nata Kesuma yang Rayon Militer Kodam VI/TPR.

Setelah beliau wafat, Pemerintahan Kesultanan Berau dilanjutkan oleh putranya dan selanjutnya secara turun temurun keturunannya memerintah sampai pada sekitar abad ke-17. Kemudian awal sekitar abad XVIII datanglah penjajah Belanda memasuki kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang (VOC). Namun kegiatan itu dilakukan dengan politik De Vide Et Impera (politik adu domba). Kelicikan Belanda berhasil memecah belah Kerajaan Berau, sehingga kerajaan terpecah menjadi 2 Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur.

Pada saat bersamaan masuk pula ajaran agama Islam ke Berau yang dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin (1800 – 1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang penjajah Belanda. Raja Alam pernah ditawan dan diasingkan ke Makassar (dahulu Ujung Pandang). Untuk mengenang jiwa Patriot Raja Alam namanya diabadikan menjadi Batalyon 613 Raja Alam yang berkedudukan di Kota Tarakan.

Sedangkan Kesultanan Gunung Tabur sebagai Sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800 – 1833), keturunannya meneruskan pemerintahan hingga kepada Sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin (wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub (1951 – 1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Berau.

Sultan Muhammad Amminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau. Beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-undang Darurat tahun 1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-undang No.27 tahun 1959, Daerah Istimewa Berau berubah menjadi kabupaten Dati II Berau dan Tanjung Redeb sebagai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960 – 1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tk. II Berau yang pertama.

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Di mana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian diabadikan sebagai Hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana diterapkan dalam Perda No. 3 tanggal 2 April 1992

BUPATI BERAU DARI MASA KE MASA



AJI RADEN M. AYUB
BUPATI BERAU KE I
PERIODE 1960 S/D 1964



Drs. YUNUZAL YUNUS
BUPATI BERAU KE II
PERIODE 1964 S/D 1965



LETKOL DJAYADI
BUPATI BERAU KE III
PERIODE 1965 S/D 1973



H. MASDAR JOHN, BA
BUPATI BERAU KE IV
PERIODE 1973 S/D 1980



M. ARMYNS
BUPATI BERAU KE V
PERIODE 1980 S/D 1990



Drs. M. ARIFIN SAIDI
BUPATI BERAU KE VI
PERIODE 1990 S/D 1995



Drs. H. MASDJUNI
BUPATI BERAU KE VII
PERIODE 1995 S/D 2005



Drs. H. MAKMUR HAPK, MM
WAKIL BUPATI BERAU KE VIII
PERIODE 2005 S/D 2015



Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si
Pj. BUPATI BERAU KE IX
PERIODE 2015



H. MUHARRAM, S.Pd, MM
BUPATI BERAU KE IX
PERIODE 2016 S/D 2021



Drs. H. Muhammad Ramadhan, MMT
Pj. BUPATI BERAU
PERIODE 26 September 2020 - 5 Desember 2020



H. AGUS TANTOMO
BUPATI BERAU KE X
PERIODE 9 Januari 2021 - 17 Februari 2021



Hj. SRI JUNIARSHIH MAS, M.Pd
BUPATI BERAU KE XI
PERIODE 2021 - SEKARANG



WAKIL BUPATI BERAU DARI MASA KE MASA



Drs. H. MAKMUR HAPK, MM
WAKIL BUPATI BERAU KE I
PERIODE 1995 S/D 2005



Ir. H. AHMAD RIFAI, MM
WAKIL BUPATI BERAU KE II
PERIODE 2005 S/D 2015



H. AGUS TANTOMO
WAKIL BUPATI BERAU III
PERIODE 2016 S/D 2021



H. GAMALIS, S.E
WAKIL BUPATI BERAU KE IV
PERIODE 2021 - SEKARANG





JUMLAH PNS, PPPK & PTT KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

9.237 ORANG

- PNS 4.716 orang
- PPPK 1.708 orang
- PTT 2.813 orang

Jumlah PNS & CPNS Berdasarkan Golongan

Golongan I	51 orang
Golongan II	865 orang
Golongan III	3.252 orang
Golongan IV	548 orang

Jumlah PNS & CPNS Berdasarkan Jabatan

Jabatan Fungsional Tertentu	2.694 orang
Jabatan Fungsional Umum	1.492 orang
Eseleon I	-
Eseleon II	33 orang
Eseleon III	173 orang
Eseleon IV	324 orang

Jumlah PNS, PPPK & PTT PEREMPUAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2023



- PNS 2.300 orang
- PPPK 558 orang
- PTT 1.609 orang

Jumlah PNS, PPPK & PTT LAKI-LAKI KABUPATEN BERAU TAHUN 2023



- PNS 2.416 orang
- PPPK 1.150 orang
- PTT 1.204 orang



JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

264.438 Jiwa





KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

1 2.922,04 Jiwa/km² (Kec. Tanjung Redeb)

2 106,87 Jiwa/km² (Kec. Teluk Bayur)

Pada Kabupaten Berau Kepadatan Penduduk
7,15 Jiwa/km²





SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Pangan
10. Dinas Pertanahan
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Perikanan
22. Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Peternakan
23. Dinas Perkebunan
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
26. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
27. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
30. Sekretariat Daerah
31. Sekretariat Dewan
32. Inspektorat
33. RSUD DR. ABDUL RIVAI



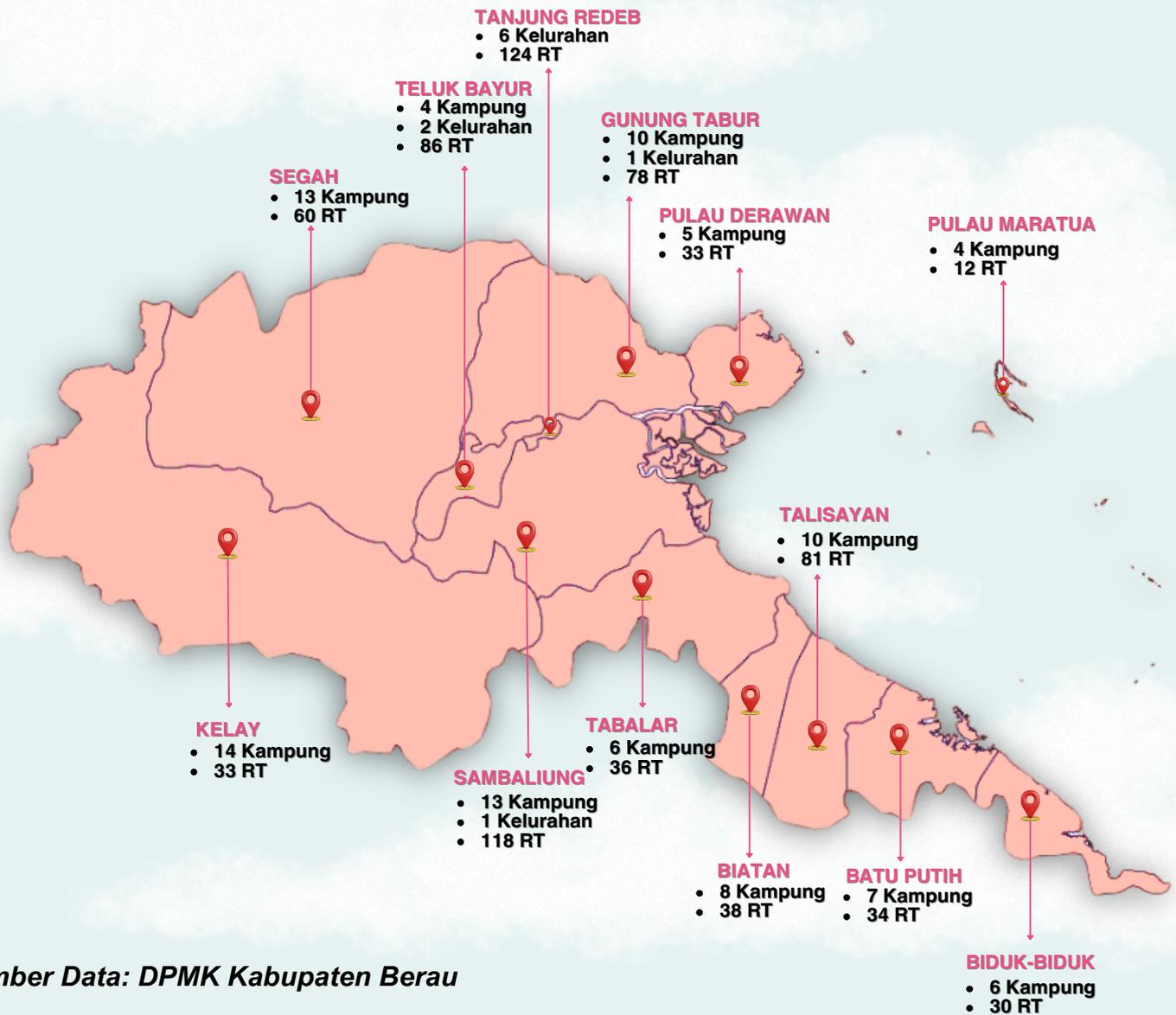
Sumber Data: BPKSDM Kabupaten Berau



WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

Kab. Berau terdiri:

- 13 KECAMATAN
- 100 DESA/KAMPUNG
- 10 KELURAHAN
- 763 RT



Sumber Data: DPMK Kabupaten Berau





REALISASI APBD KABUPATEN BERAU TAHUN 2023



**REALISASI
APBD PENDAPATAN
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023**

Rp. 4.700.904.175.374,79

Rp. 4.608.120.868.464,26

**REALISASI
APBD BELANJA
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023**





BAB 2

ASPEK GEOGRAFI



2.1 Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi & Wilayah

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau terletak antara 116°08'28" hingga 119°03'31" bujur timur dan 0°54'28" hingga 2°37'32" lintang utara. Kabupaten Berau berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan pada sisi utara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan di sisi barat, Kabupaten Kutai Timur di sisi selatan, dan Laut Sulawesi di sisi timur.

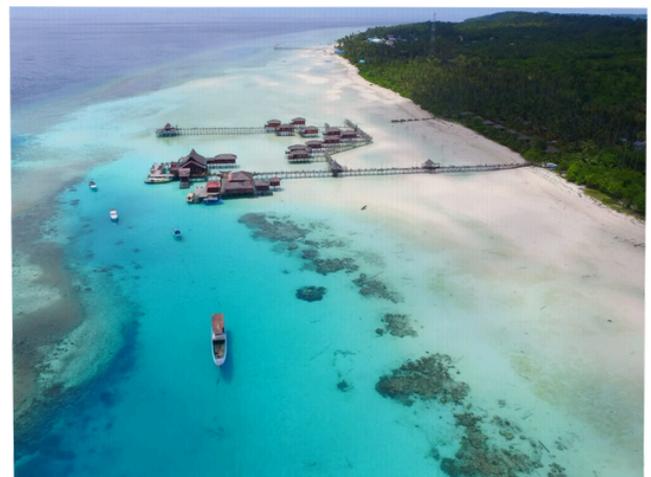
Kabupaten Berau memiliki luas 36.962,37 km² yang mana terbagi menjadi 60 persen berupa wilayah daratan dan 40 persen wilayah perairan. Secara administratif, Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan dengan Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Kecamatan terluas di Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Kelay dengan luas 6.556,54 km² dan kecamatan terkecil berada di kecamatan Tanjung Redeb dengan luas 24,42 km²

Apabila dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Berau terbagi menjadi 4 wilayah yaitu wilayah perkotaan, wilayah pesisir, wilayah pedalaman dan wilayah kepulauan. Wilayah perkotaan terdiri atas Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Gunung Tabur. Wilayah Pesisir terdiri atas Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Biduk-Biduk. Wilayah pedalaman terdiri atas Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah. Sedangkan wilayah kepulauan berada di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (km²), 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Kelay	6.556,54
Talisayan	1.621,57
Tabalar	1.837,34
Biduk-Biduk	2.429,97
Pulau Derawan	4.423,99
Maratua	5.616,26
Sambaliung	2.163,37
Tanjung Redeb	24,42
Gunung Tabur	1.963,32
Segah	5.241,29
Teluk Bayur	316,98
Batu Putih	3.575,30
Biatan	1.192,03
Kabupaten Berau	36.962,37

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024.



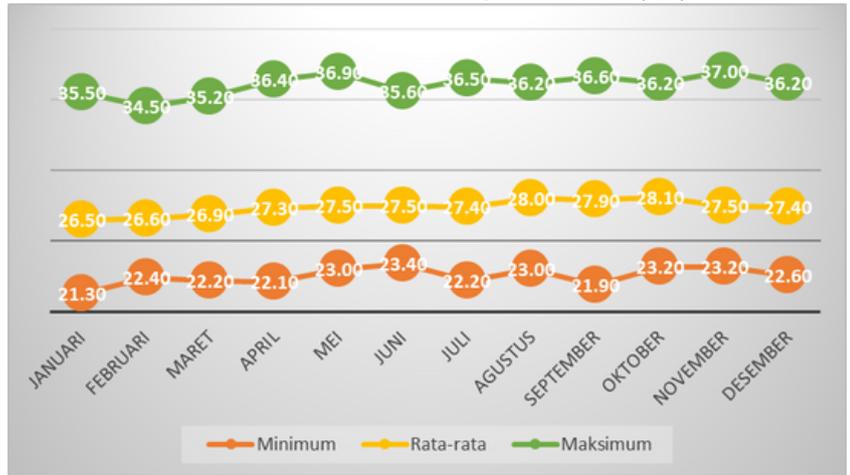






Kondisi iklim di Kabupaten Berau, cukup bervariasi. Rata-rata suhu di Kabupaten Berau berkisar antara 26,50 C hingga 28,10 C. Rata-rata suhu tertinggi di Kabupaten Berau terjadi pada bulan Oktober dengan rata-rata suhu sebesar 28,10 C dan rata-rata suhu terendah di Kabupaten Berau terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata suhu sebesar 26,50 C.

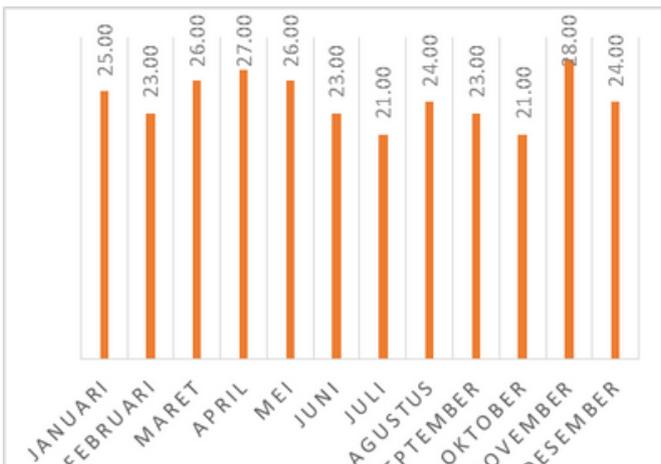
Gambar 2.1. Kondisi Suhu Kabupaten Berau (°C), 2024



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024.

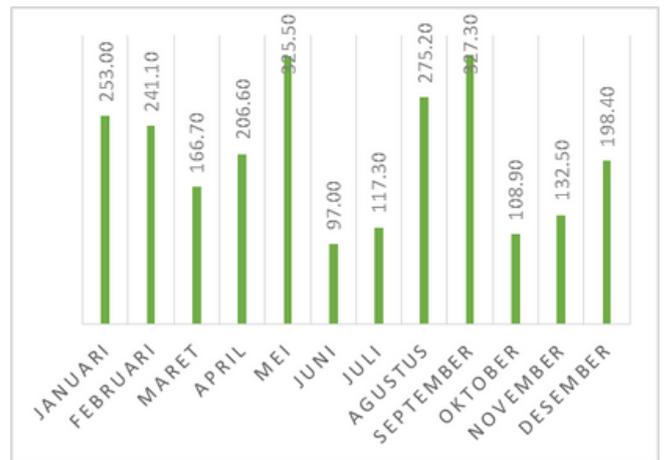
Selanjutnya, pada gambar 2.2, jumlah hari hujan di Kabupaten Berau terjadi selama 21 hingga 28 hari. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan 28 hari, sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan 21 hari.

Gambar 2.2. Jumlah Hari Hujan Kabupaten Berau, 2024



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024.

Gambar 2.3. Jumlah Curah Hujan Kabupaten Berau, 2024



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024.

Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Berau pada tahun 2024 adalah sebesar 204,13 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan curah hujan sebesar 97,00 mm dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dengan curah hujan sebesar 327,30 mm.





Gambar 2.4. Rata-rata Durasi Penyinaran Matahari (jam)

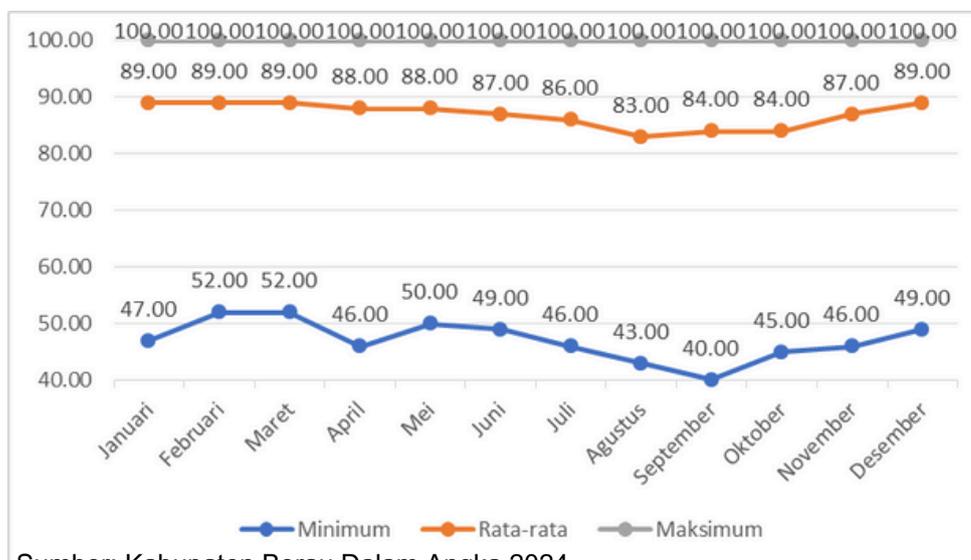


Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024

Rata-rata durasi penyinaran matahari di Kabupaten Berau berkisar antara 3 hingga 6 jam. Rata-rata durasi penyinaran matahari terpendek di Kabupaten Berau pada tahun 2024 terjadi pada bulan Januari hingga Februari, yaitu selama 3 jam. Sedangkan rata-rata durasi penyinaran matahari terlama di Kabupaten Berau pada tahun 2024 terjadi pada bulan Oktober, yaitu selama 6 jam.

Kondisi kelembababan di Kabupaten Berau cukup bervariasi. Kondisi kelembababan di Kabupaten Berau berkisar antara 40% hingga 100% dengan rata-rata tiap bulan berkisar 83% hingga 89%. Kelembaban terendah terjadi pada bulan September dimana kelembaban pada bulan tersebut sebesar 40%. Kelembaban maksimum di Kabupaten Berau yaitu 100% terjadi sepanjang tahun.

Gambar 2.5. Kondisi Kelembababan Kabupaten Berau (%), 2024



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024.





b. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan wilayah, secara umum bidang ini akan meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia dengan memberi kesempatan memperoleh dan menyebarkan informasi kebudayaan dan kepariwisataan untuk meningkatkan melestarikan nilai budaya bangsa. Melalui penyebaran informasi kebudayaan dan kepariwisataan suatu daerah maka diharapkan potensi sumber daya alam pariwisata dan kebudayaan daerah setempat bisa lebih dikenal dan diketahui oleh khalayak luar. Sehingga secara tidak langsung juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat daerah setempat.

Kabupaten Berau mempunyai potensi pariwisata sangat besar. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam struktur perekonomian. Selain itu, dengan semakin berkembangnya daerah wisata, akan menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitarnya sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Sektor pariwisata Kabupaten Berau sangatlah potensial dan dapat menjadi daerah utama tujuan wisata di Kalimantan Timur. Beberapa tempat dan jenis wisata di Kabupaten Berau yang menjadi daya tarik wisata saat ini terdiri dari wisata alam, sejarah dan budaya. Dengan keunikan topografi wilayah yang ada menjadikan Kabupaten Berau dibedakan menjadi beberapa wilayah sebagai berikut:

i. Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan menawarkan berbagai destinasi menarik yang mencakup wisata sejarah, budaya, serta objek wisata buatan manusia. Destinasi sejarah berupa peninggalan arkeologis, bangunan bersejarah, atau monumen yang menceritakan perjalanan waktu dan identitas suatu daerah. Wisata budaya menampilkan tradisi, seni, dan adat istiadat lokal yang memberikan pengalaman autentik kepada pengunjung. Sementara itu, objek wisata buatan manusia, seperti taman hiburan, pusat rekreasi, dan landmark modern, mencerminkan kreativitas serta inovasi masyarakat perkotaan dalam menciptakan daya tarik wisata yang unik. Kombinasi ketiga jenis wisata ini menjadikan kawasan perkotaan sebagai tujuan yang kaya akan nilai edukasi, hiburan, dan keindahan. Wilayah pesisir memiliki tempat destinasi berupa wisata Bahari, alam/ekowisata dan sejarah





ii. Wilayah Kepulauan



Wilayah kepulauan menawarkan berbagai destinasi menarik yang meliputi wisata bahari, alam atau ekowisata, serta wisata budaya. Wisata bahari menjadi daya tarik utama dengan keindahan pantai, terumbu karang, serta keanekaragaman hayati laut yang memikat, seperti aktivitas menyelam, snorkeling, atau sekadar menikmati panorama laut. Alam atau ekowisata menghadirkan pengalaman eksplorasi keindahan alam yang masih asri, seperti hutan mangrove, kawasan konservasi, hingga satwa endemik yang hidup di lingkungan kepulauan. Selain itu, wisata budaya di wilayah kepulauan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk merasakan tradisi lokal, seni, dan kearifan masyarakat setempat yang unik, menjadikan setiap kunjungan tidak hanya rekreatif tetapi juga edukatif. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan pengalaman wisata yang menyeluruh dan memikat bagi para wisatawan.

iii. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan kawasan dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, menjadikannya bagian penting dari pengembangan ekonomi dan pariwisata Berau. Kecamatan Tabalar memiliki wilayah pesisir yang didominasi oleh ekosistem mangrove dan perairan dangkal yang mendukung aktivitas perikanan tradisional. Potensi ekonomi utamanya adalah perikanan tangkap dan budidaya ikan serta udang. Selain itu, mangrove di kawasan ini memiliki fungsi ekologi penting, seperti mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Kecamatan Talisayan terkenal dengan keberadaan hiu paus (whale shark) yang sering muncul di perairannya, menjadikannya destinasi wisata bahari yang populer. Selain itu, sektor perikanan, terutama tangkap dan budidaya rumput laut, menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat. Keindahan pantai dan potensi penyelaman menambah daya tarik kecamatan ini. Kecamatan Biatan merupakan wilayah pesisir yang kaya akan terumbu karang dan biota laut lainnya, sehingga cocok untuk pengembangan aktivitas wisata seperti snorkeling dan menyelam.





Wilayah ini juga mendukung budidaya perikanan, khususnya rumput laut, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kecamatan Batu Putih memiliki pantai-pantai alami yang belum banyak tersentuh pembangunan, menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan wisata berbasis ekowisata. Batu Putih juga dikenal dengan perikanan tangkap sebagai salah satu sektor ekonomi utama masyarakatnya. Kecamatan Biduk-Biduk merupakan salah satu kecamatan pesisir yang paling terkenal di Berau, terutama karena keindahan Danau Labuan Cermin, sebuah danau unik dengan air yang sangat jernih dan dua lapisan air yang berbeda, tawar dan asin. Selain itu, pantai-pantai di Biduk-Biduk menawarkan pemandangan yang memukau, dengan potensi besar untuk wisata bahari. Secara keseluruhan, wilayah pesisir Kabupaten Berau memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui sektor perikanan, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, kelima kecamatan ini dapat terus berkembang menjadi pusat pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.



iv. Wilayah Pedalaman

Wilayah pedalaman menyuguhkan berbagai destinasi menarik yang meliputi alam atau ekowisata, sejarah, dan budaya. Alam atau ekowisata di wilayah ini menawarkan pengalaman langsung dengan keindahan alam yang belum terjamah, seperti pegunungan, hutan tropis, air terjun, dan habitat satwa liar, yang sering menjadi tujuan bagi pencinta petualangan dan pelestarian lingkungan. Destinasi sejarah menghadirkan situs-situs bersejarah, peninggalan masa lampau, atau cerita legenda lokal yang memperkaya wawasan pengunjung tentang identitas daerah. Selain itu, wisata budaya memungkinkan pengunjung untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat adat, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Gabungan ketiga aspek ini menjadikan wilayah pedalaman sebagai destinasi yang penuh dengan keautentikan, kedalaman nilai, dan keindahan alami.





2.2 Aspek Demografi

a. Karakteristik Lokasi & Wilayah

Penduduk merupakan salah satu indikator penting bagi pembangunan di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi, kesehatan, serta ketenagakerjaan. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk berperan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berarti posisi penduduk dalam hal ini adalah sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun demikian, pembangunan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan penduduknya, harus melihat kepada kuantitas penduduk yang terus bertambah yang bisa dijadikan sebagai keuntungan maupun kelemahan dalam pembangunan.

Selain kuantitas, kualitas penduduk suatu wilayah juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang rendah akan menjadi penghambat proses pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dikarenakan masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa depan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Beberapa indikator yang dihasilkan dari penduduk adalah:

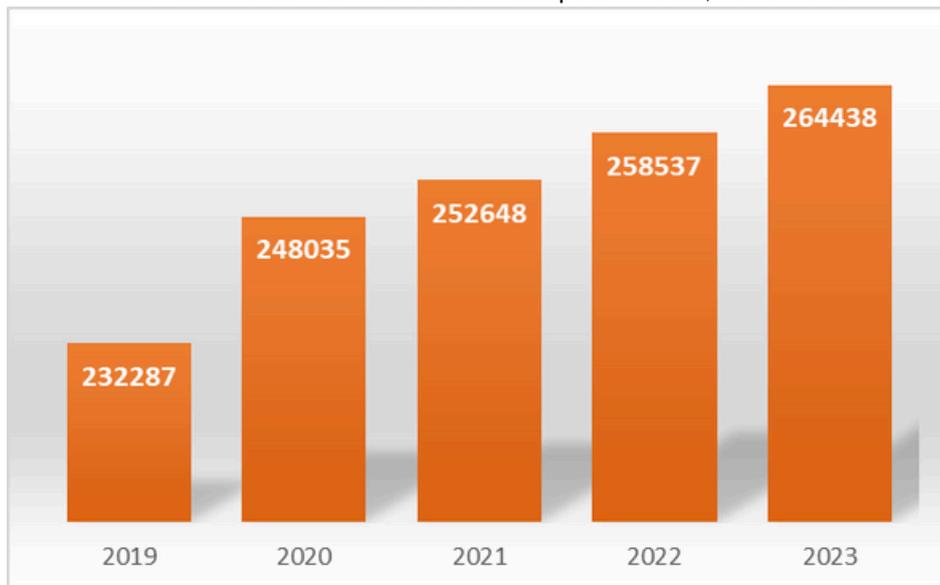




i. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Berau sebanyak 264.438 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 258.537 jiwa atau naik sebesar 2,28 persen. Apabila jumlah penduduk dilihat dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi tren peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Berau. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Berau sebanyak 232.287 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Berau mengalami peningkatan menjadi 248.035 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,78 persen. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Berau adalah sebanyak 252.648 jiwa atau kembali meningkat sebesar 1,86 persen. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Berau meningkat menjadi 258.537 jiwa atau meningkat menjadi 2,33 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Berau kembali meningkat menjadi 258.537 jiwa atau meningkat sebesar 2,28 persen.

Gambar 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Berau

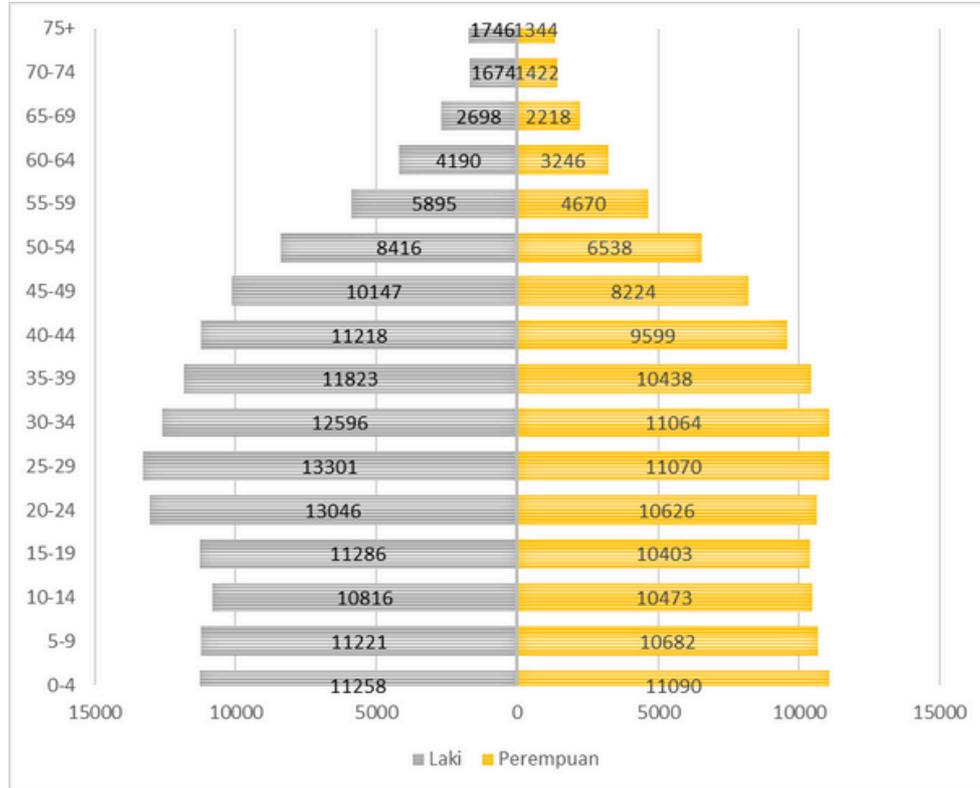
Untuk melihat komposisi penduduk Kabupaten Berau menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dengan menggunakan piramida penduduk. Berdasarkan Gambar 2.7. piramida penduduk Kabupaten Berau dapat dikategorikan sebagai tipe expansive, dimana jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia dewasa maupun tua.

Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida untuk penduduk laki-laki maupun perempuan kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.



Berdasarkan piramida di atas juga dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Berau semakin didominasi oleh penduduk usia produktif dan cukup baiknya derajat kesehatan, yaitu terlihat dari panjangnya batang piramida pada kelompok umur 5-9 tahun, memendek pada kelompok umur di atasnya, kemudian memanjang lagi pada kelompok umur 25-39 tahun, dan kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek.

Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kabupaten Berau, 2023



Sumber: BPS Kabupaten Berau

Jumlah penduduk memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Penduduk yang cukup besar dapat menjadi tenaga kerja produktif yang mendukung berbagai sektor, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, jumlah penduduk yang besar menciptakan pasar domestik yang luas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi lokal dan aktivitas ekonomi lainnya.

Di sisi lain, jumlah penduduk juga berkontribusi dalam perencanaan pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik. Dengan pengelolaan yang baik, penduduk dapat menjadi motor penggerak inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan kebijakan yang seimbang antara jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan daya dukung lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

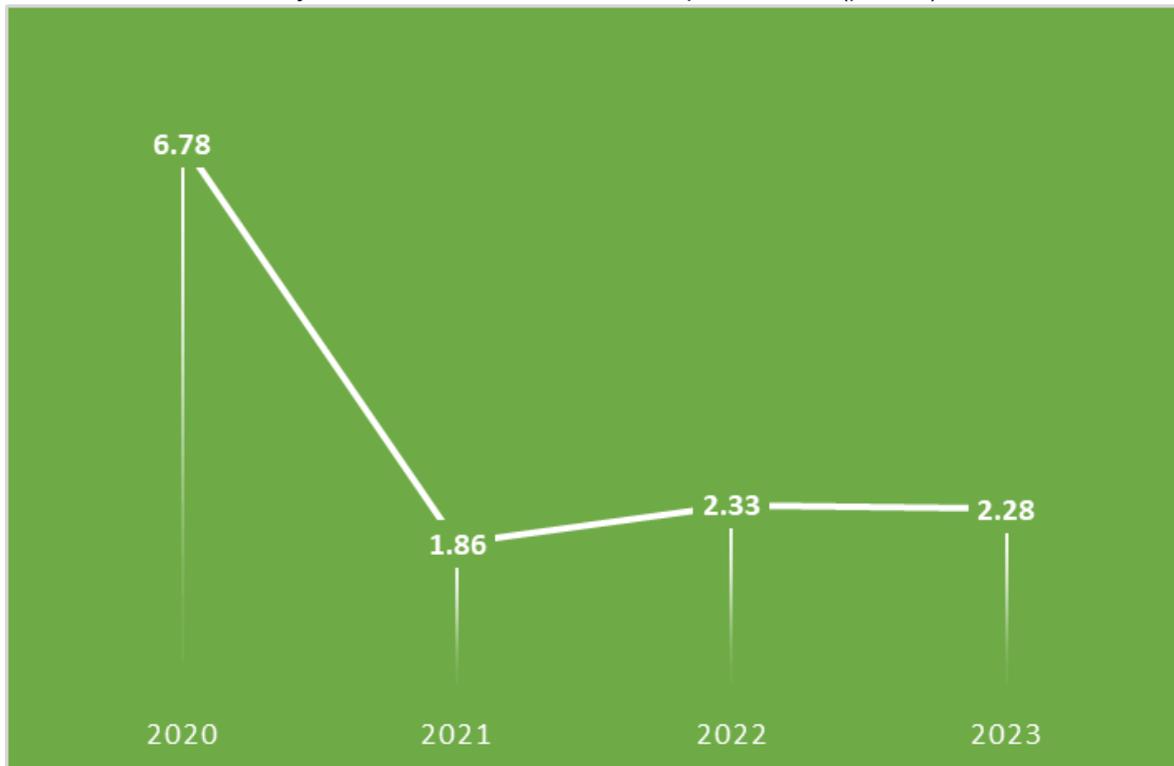




ii. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah jika diimbangi dengan perencanaan yang baik. Pertumbuhan penduduk yang moderat menciptakan tambahan tenaga kerja baru yang mampu mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti industri, pertanian, dan jasa. Dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan perumahan, pendidikan, dan infrastruktur juga meningkat, yang dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau (persen), 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Berau





Pada tahun 2020-2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau mengalami penurunan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau mencapai 6,78 persen. Akan tetapi pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,86 persen. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau meningkat menjadi 2,33 persen dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,28 persen.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang memungkinkan adanya regenerasi tenaga kerja, sehingga daerah tetap memiliki populasi usia produktif yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan laju pembangunan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi, dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Agar manfaat ini dapat dirasakan, laju pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

iii. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah per satuan luas tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan distribusi populasi di suatu daerah, serta untuk menganalisis tingkat tekanan penduduk terhadap sumber daya dan lingkungan di wilayah tersebut.

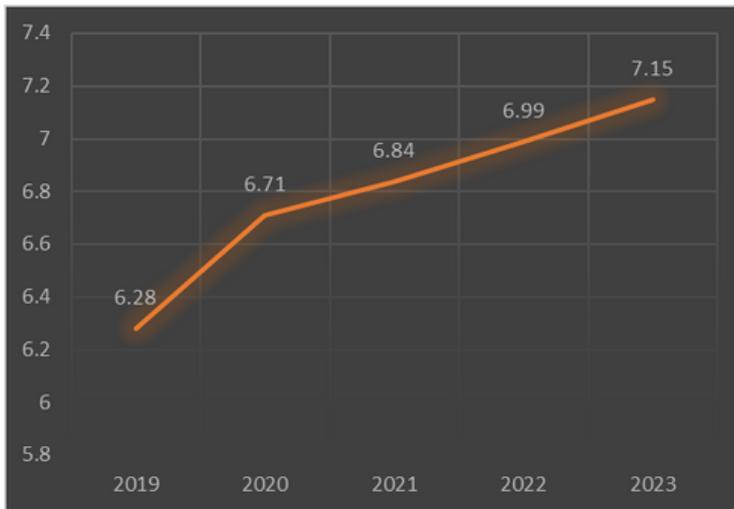
Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, ketersediaan sumber daya, kesempatan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya adalah daerah perkotaan yang memiliki infrastruktur dan akses layanan yang lebih baik, sedangkan daerah dengan kepadatan rendah umumnya merupakan wilayah pedesaan, kepulauan, atau pegunungan dengan aksesibilitas yang terbatas.

Penghitungan kepadatan penduduk sering digunakan dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan pengambilan kebijakan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.





Gambar 2.9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Berau

Pada tahun 2019 hingga 2023, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Berau mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Berau adalah sebesar 6,28 penduduk/km. Kepadatan penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,71 penduduk/km. Pada tahun 2021, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Berau adalah sebesar 6,84 penduduk/km. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 6,99 penduduk/km dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,15 penduduk/km.

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (jiwa/km²), 2024

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tabalar	4,01	3,72	3,77	3,84	3,90
2	Biduk-Biduk	2,78	2,72	2,74	2,77	2,79
3	Pulau Derawan	89,20	2,09	2,56	2,6	2,70
4	Maratua	0,71	0,65	0,65	0,66	0,66
5	Sambaliung	17,03	17,00	17,45	17,99	18,54
6	Tanjung Redeb	1.778,21	2.916,91	2.910,44	2.916,75	2.922,04
7	Gunung Tabur	11,58	12,74	13,2	13,73	14,28
8	Segah	2,16	2,74	2,85	2,97	3,09
9	Teluk Bayur	98,08	98,22	100,76	103,81	106,87
10	Batu Putih	2,47	2,47	2,5	2,55	2,59
11	Biatan	6,73	7,24	7,52	7,84	8,16
12	Berau	6,28	6,71	6,84	6,99	7,15

Sumber: BPS Kabupaten Berau

Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Redeb dimana tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebesar 2.922,04 penduduk/km². Hal ini menandakan bahwa setiap 1 km² ditempati sebanyak 2.922 hingga 2.923 penduduk di Kecamatan Tanjung Redeb. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat kedua adalah Kecamatan Teluk Bayur dengan kepadatan penduduk di tahun 2023 adalah sebesar 106,87 penduduk/km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Maratua, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 0,66 penduduk/km². Kepadatan penduduk yang terkendali dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah, terutama jika diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang baik dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Berikut adalah beberapa manfaatnya:



1. Pemanfaatan Sumber Daya secara Efisien

Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki potensi pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, secara lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya per kapita dalam penyediaan layanan dasar.

2. Tenaga Kerja Melimpah

Kepadatan penduduk menghasilkan ketersediaan tenaga kerja yang besar untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pasar yang Luas

Kepadatan penduduk menciptakan pasar domestik yang besar, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, roda perekonomian daerah menjadi lebih dinamis.

4. Pengembangan Infrastruktur

Dengan tingginya kebutuhan masyarakat, daerah yang padat penduduknya cenderung mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, dan komunikasi, yang dapat mempercepat pembangunan.

5. Inovasi dan Kreativitas

Kepadatan penduduk sering kali mendorong interaksi yang intensif antarindividu, sehingga memicu munculnya inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, budaya, dan seni.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, kepadatan penduduk harus diimbangi dengan upaya menjaga kualitas hidup masyarakat, seperti pengelolaan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, serta perencanaan kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, kepadatan penduduk dapat menjadi aset penting bagi pembangunan daerah.



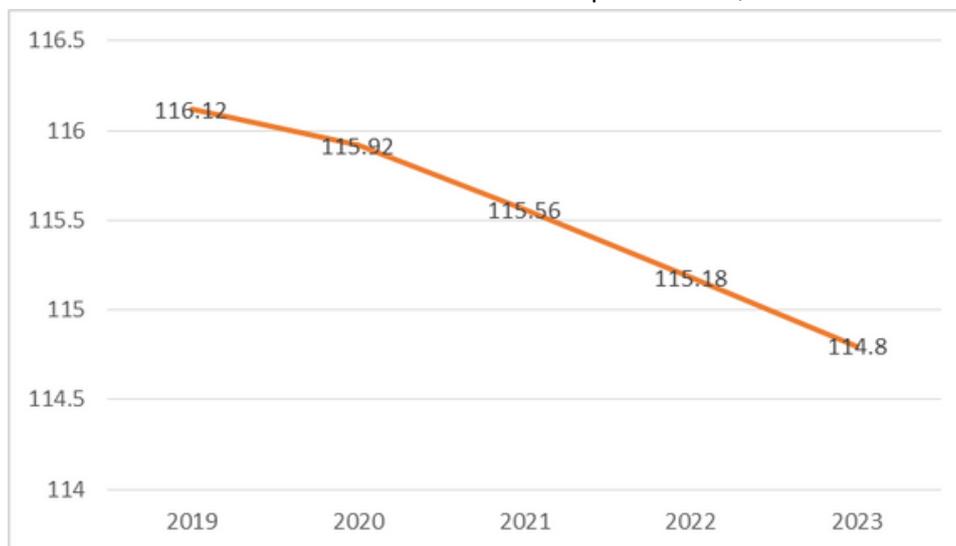


iv. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. Secara umum rasio jenis kelamin terbagi menjadi

- Rasio jenis kelamin > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
- Rasio jenis kelamin $= 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
- Rasio jenis kelamin < 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 2.10. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Berau, 2019-2023

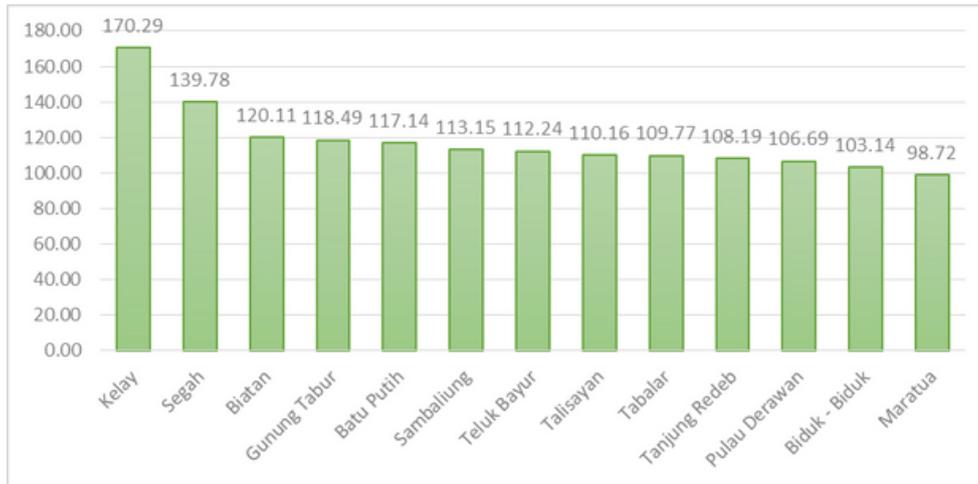


Sumber: BPS Kabupaten Berau

Pada tahun 2019 hingga 2023, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau adalah sebesar 116,12. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau mengalami penurunan menjadi 115,92. Pada tahun 2021, kembali terjadi penurunan rasio jenis kelamin menjadi 115,56. Penurunan kembali terjadi di tahun 2022 dimana rasio jenis kelamin menjadi 115,18. Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin di Kabupaten Berau mengalami penurunan menjadi 114,80. Hal ini menandakan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Berau lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Kelay, yaitu sebesar 170,29. Sedangkan, kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Maratua dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,72. Kecamatan Maratua juga merupakan satu-satunya kecamatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.



Gambar 2.11. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Berau Berdasarkan Kecamatan, 2023

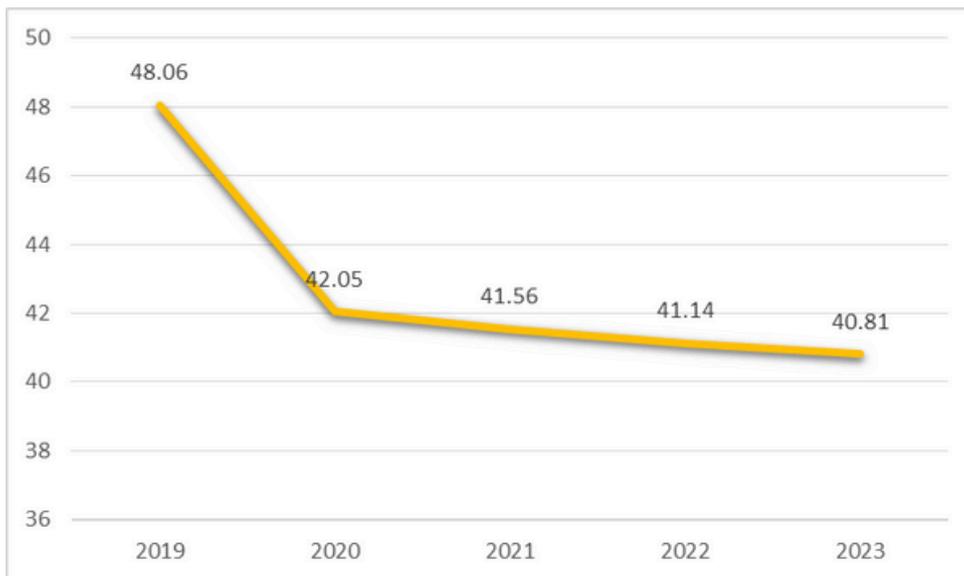


Sumber: BPS Kabupaten Berau

V. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.12. Rasio Ketergantungan Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Berau



Pada tahun 2019-2023, rasio ketergantungan di Kabupaten Berau mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio ketergantungan di Kabupaten Berau adalah sebesar 48,06. Hal ini menandakan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 hingga 49 penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan mengalami penurunan di tahun 2020 dimana rasio ketergantungan turun menjadi 42,05. Penurunan juga kembali terjadi di tahun 2021 dimana rasio ketergantungan di Kabupaten Berau menjadi 41,56. Pada tahun 2022, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Berau mengalami penurunan menjadi 41,14. Pada tahun 2023, angka ketergantungan di Kabupaten Berau kembali turun menjadi 40,56. Hal ini menandakan bahwa di tahun 2023 setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Berau menanggung 40 hingga 41 penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan penduduk, yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk usia produktif, memiliki berbagai manfaat bagi pembangunan daerah, terutama jika dikelola dengan baik. Berikut adalah manfaatnya:

1. Indikator Potensi Ekonomi

Rasio ketergantungan yang rendah mencerminkan besarnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan penduduk tidak produktif. Hal ini menandakan potensi ekonomi yang besar karena lebih banyak tenaga kerja yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

2. Momentum Bonus Demografi

Ketika rasio ketergantungan rendah, daerah memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi. Pada kondisi ini, proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas, inovasi, dan peningkatan konsumsi.

3. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Rasio ketergantungan membantu pemerintah daerah merancang kebijakan pembangunan yang sesuai. Misalnya, rasio yang tinggi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, sementara rasio yang rendah dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi.

4. Dorongan terhadap Inklusi Sosial

Tingginya rasio ketergantungan pada usia muda membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi generasi muda, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Sebaliknya, rasio ketergantungan usia tua dapat memacu pengembangan layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk kelompok lansia.

5. Pemicu Inovasi Kebijakan

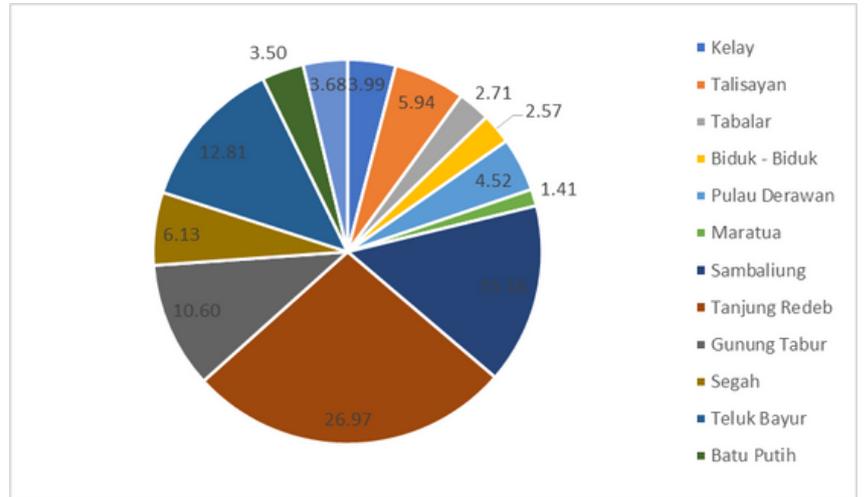
Rasio ketergantungan memberikan gambaran tentang kebutuhan penduduk di berbagai kelompok usia. Dengan memahami ini, daerah dapat menciptakan kebijakan inovatif, seperti pelatihan tenaga kerja muda atau layanan kesejahteraan untuk kelompok rentan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan.



b. Distribusi Penduduk

Gambar 2.13. Rasio Ketergantungan Kabupaten Berau (persen), 2023

Dengan pengelolaan yang tepat, rasio ketergantungan dapat menjadi alat strategis untuk memetakan tantangan dan peluang pembangunan, memastikan sumber daya manusia berkontribusi maksimal pada kemajuan daerah.



Sumber: BPS Kabupaten Berau

Distribusi penduduk adalah persebaran penduduk pada suatu wilayah. Pada tahun 2023, sebagian besar penduduk Kabupaten Berau tinggal di wilayah perkotaan yaitu sebesar 65,55 persen. Sedangkan wilayah kepulauan merupakan wilayah dengan distribusi penduduk paling sedikit di Kabupaten Berau yaitu sebesar 5,93 persen. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu sebesar 26,97 persen. Selanjutnya, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Sambaliung yaitu sebesar 15,61 persen dan kecamatan Teluk Bayur menempati tertinggi ketiga yaitu sebesar 12,81 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Maratua yaitu sebesar 1,41 persen.

Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketimpangan pemerataan penduduk di Kabupaten Berau. Jika pembangunan di daerah-daerah sudah hampir sama dengan kota maka penduduk tidak perlu keluar dari daerahnya. Pada akhirnya penduduk daerah setempat bisa ikut membangun daerah masing-masing. Cara lainnya untuk mengurangi ketimpangan pemerataan penduduk adalah dengan menciptakan lapangan kerja di kampung-kampung. Perlu adanya sektor usaha alternatif selain pertambangan dan perkebunan sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.



Distribusi penduduk yang merata memiliki berbagai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya:

1. Peningkatan Efisiensi Pembangunan

Distribusi penduduk yang seimbang membantu pemerintah merencanakan dan mengalokasikan sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah.

2. Pengembangan Wilayah Baru

Distribusi penduduk yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendukung pembangunan nasional.

3. Pelestarian Lingkungan

Penyebaran penduduk yang lebih merata dapat mengurangi eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang padat penduduk, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat urbanisasi berlebihan.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan distribusi penduduk yang merata, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja dapat lebih tersebar, sehingga mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Distribusi yang baik dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah, menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis di masyarakat. Distribusi penduduk yang merata membutuhkan perencanaan strategis yang melibatkan berbagai sektor untuk memastikan tercapainya manfaat-manfaat tersebut secara optimal.





Visi Kepala Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Misi

- Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
- Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan local
- Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
- Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih berwibawa transparan dan akuntabel

Tema RKPD Tahun 2024

“Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Berau Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Utama /2023	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,79	5,44	4,29
2	Indeks Pembangunan Manusia	75,50	76,71	76,53
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp per Kapita)	165,00	162,08	257,32
4	Indeks Gini	0,305	0,327	0,344
5	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (Ton CO2e)	379.179	314.734	366.998
6	Indeks Reformasi Birokrasi BB	B (62)	C (43,06)	B (65)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,73	4,95	4,62
8	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	5,01	5,54	5,32
9	IKLH	76,69	75,08	78,93



Inovasi Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023

NO	INOVASI	INSTANSI/OPD
1	Jamban Sehat pesisir (JSP)	Kecamatan Biatan
2	Penataan Ulang Pelayanan Peminjaman Barang milik Daerah	Kecamatan Tabalar
3	Sistem layanan elektronik (SILENI)	Kelurahan Tanjung Redeb
4	Sistem Informasi perencanaan dana RT (SIPAT)	Kelurahan Tanjung Redeb
5	Kampung Batik Tapuri	Tanjung Redeb
6	Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Satu kampung perikanan, satu kelompok andalan (Suka Suka Anda)	Dinas Perikanan
8	Sistem kemitraan pelaku utama perikanan (SIPURI)	Dinas Perikanan
9	Aplikasi Digitalisasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan
10	Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
11	Rumah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Disduk capil
12	Pakar (Pelayanan Perekaman KTP-EL khusus pelajar)	Disduk capil
13	K2ADIK (Klinik Konsultasi Administrasi Kependudukan)	Disduk capil
14	SIK OTW KECAMATAN (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ke Kecamatan)	Disduk capil
15	TRC PERKASA (Tim Reaksi Cepat Penuh Rasa Kasih Sayang)	Disduk capil
16	LAJEBOL ANDUK TERAPUNG (Layanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Dan Kampung)	Disduk capil
17	PAHE ADMINDUK (Paket Hemat Administrasi Kependudukan)	Disduk capil
18	SI PENYU BERAMAL (Sistem Pelayanan Kependudukan Berbasis Android untuk Masyarakat Batiwakkal)	Disduk capil
19	ADM BARINTAK (Anjungan Dukcapil Mandiri secara Bersama-sama/ Sekata/Satu Tujuan)	Disduk capil
20	AKTIF PRESTASI (Layanan Kolektif Petugas Registrasi Online)	Disduk capil
21	SIMPENDUK (Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Penduduk)	Disduk capil
22	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Bekerjasama dengan Mitra Kerja Disdukcapil Kabupaten Berau	Disduk capil



BAB 3

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu diukur dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan di masa mendatang. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi, tanpa memandang apakah faktor produksinya dimiliki oleh residen (penduduk setempat) atau non-residen. Dengan demikian, PDRB memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan dapat dievaluasi melalui PDRB berserta turunannya, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut agar dampak ekonomi menjadi lebih signifikan di masa depan. Misalnya, sektor dengan kontribusi yang besar terhadap pembentukan nilai PDRB dapat dikembangkan secara optimal, sementara sektor dengan kontribusi rendah dapat diberikan perhatian atau dukungan tambahan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, data PDRB bermanfaat untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan menetapkan target pembangunan yang realistis sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode tersebut, sehingga angka ini mencerminkan nilai ekonomi aktual tanpa penyesuaian terhadap inflasi. Di sisi lain, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil dengan mengukur perubahan volume barang dan jasa. Perhitungan ADHK dilakukan dengan menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu dalam hal ini tahun 2010. Hal ini dilakukan agar dampak inflasi dapat dihilangkan dari analisis pertumbuhan ekonomi, memungkinkan perbandingan yang lebih akurat dari waktu ke waktu.

Tabel 3.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022**	2023**
ADHB	39.104.693,57	35.450.848,90	43.036.483,47	60.158.157,05	51.280.017,17
ADHK	28.275.572,78	27.337.086,65	28.802.649,72	29.940.835,51	31.570.052,94
2010					

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010

Uraian	2019	2020	2021	2022**	2023**
Laju pertumbuhan ekonomi	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB ADHK 2010 pada Tabel 3.1, perekonomian Kabupaten Berau tumbuh sebesar 5,44 persen pada tahun 2023 dengan nilai PDRB ADHK 2023 sebesar 31,57 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan dibandingkan kinerja ekonomi tahun 2022 dengan nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 29,94 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didukung oleh capaian positif di seluruh sektor, terutama sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB. Salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian, yang tumbuh sebesar 5,74 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor yang meningkatkan permintaan impor batu bara, sehingga perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Berau meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut.

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.178.127,61	4.151.760,06	5.049.853,43	5.615.073,24	5.775.964,83
Pertambangan dan Penggalian	23.780.202,88	19.950.112,57	25.686.108,12	40.294.891,20	29.882.562,46
Industri Pengolahan	1.592.705,82	1.695.686,51	1.860.854,54	2.099.593,11	2.222.289,84
Pengadaan Listrik dan Gas	14.257,35	15.166,78	15.266,49	16.246,11	18.097,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.283,84	15.211,51	16.151,22	17.725,25	19.506,64
Konstruksi	1.587.628,11	1.474.400,67	1.610.799,16	2.018.436,80	2.290.702,75



Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.205.649,91	2.314.952,20	2.463.594,06	3.000.854,83	3.325.012,08
Transportasi dan Pergudangan	2.262.075,01	2.177.874,77	2.329.360,55	2.691.918,08	3.030.591,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	457.294,97	442.716,31	449.684,82	489.217,27	525.057,17
Informasi dan Komunikasi	356.555,57	383.273,45	409.092,94	435.222,57	461.174,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	207.631,25	211.022,11	217.192,50	245.238,01	274.065,43
Real Estate	346.411,87	351.387,10	358.410,91	370.565,39	379.155,16
Jasa Perusahaan	39.700,68	37.861,84	40.586,11	43.092,13	47.760,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452.664,68	432.547,91	442.403,15	478.816,02	529.437,33
Jasa Pendidikan	978.319,85	1.075.138,22	1.192.391,79	1.335.740,54	1.414.385,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	356.391,77	442.539,81	589.635,42	663.468,06	707.471,22
Jasa lainnya	274.792,41	279.197,08	305.098,26	342.058,43	376.783,52
Produk Domestik Regional Bruto	39.104.693,57	35.450.848,90	43.036.483,47	60.158.157,05	51.280.017,17

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.695.927,35	2.601.171,64	2.653.044,98	2.730.490,44	2.790.051,95
Pertambangan dan Penggalian	17.702.342,28	16.908.537,24	18.099.014,52	18.698.448,14	19.770.929,04
Industri Pengolahan	1.136.149,99	1.132.537,39	1.097.495,22	1.137.378,74	1.183.667,82
Pengadaan Listrik dan Gas	11.637,21	12.373,93	12.458,93	12.874,88	13.953,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.654,97	12.356,51	12.866,49	13.605,78	14.354,90
Konstruksi	1.148.758,86	1.043.406,97	1.051.215,91	1.128.330,05	1.230.978,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.747.815,51	1.775.475,01	1.818.147,60	1.927.200,74	2.030.050,59
Transportasi dan Pergudangan	1.413.970,52	1.363.355,19	1.433.693,38	1.521.087,25	1.617.645,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	273.952,13	264.010,53	267.916,43	288.596,50	304.849,64
Informasi dan Komunikasi	311.581,09	334.128,61	355.660,54	378.116,77	398.512,73
Jasa Keuangan dan Asuransi	136.058,14	136.918,47	137.288,17	148.999,57	164.236,47
Real Estate	245.224,29	248.580,89	253.413,11	260.642,54	264.011,14
Jasa Perusahaan	25.882,18	24.420,99	25.889,01	27.226,97	28.899,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288.281,64	272.571,09	274.579,62	291.766,69	319.223,56



Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Jasa Pendidikan	679.425,57	712.578,48	744.916,94	780.476,74	812.219,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	265.168,27	316.637,25	383.561,92	401.686,48	421.018,01
Jasa lainnya	181.742,78	178.026,47	181.486,94	193.907,23	205.450,61
Produk Domestik Regional Bruto	28.275.572,78	27.337.086,65	28.802.649,72	29.940.835,51	31.570.052,94

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan usaha (Persen), 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,03	-3,51	1,99	2,92	2,18
Pertambangan dan Penggalian	6,64	-4,48	7,04	3,31	5,74
Industri Pengolahan	4,42	-0,32	-3,09	3,63	4,07
Pengadaan Listrik dan Gas	7,80	6,33	0,69	3,34	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,73	6,02	4,13	5,75	5,51
Konstruksi	9,51	-9,17	0,75	7,34	9,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,02	1,58	2,40	6,00	5,34
Transportasi dan Pergudangan	2,46	-3,58	5,16	6,10	6,35



Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,43	-3,63	1,48	7,72	5,63
Informasi dan Komunikasi	6,22	7,24	6,44	6,31	5,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	0,63	0,27	8,53	10,23
Real Estate	1,96	1,37	1,94	2,85	1,29
Jasa Perusahaan	2,87	-5,65	6,01	5,17	6,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	-5,45	0,74	6,26	9,41
Jasa Pendidikan	3,53	4,88	4,54	4,77	4,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,17	19,41	21,14	4,73	4,81
Jasa lainnya	5,26	-2,04	1,94	6,84	5,95
Produk Domestik Regional Bruto	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen),2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,68	11,71	11,73	9,33	11,26
Pertambangan dan Penggalian	60,81	56,28	59,68	66,98	58,27
Industri Pengolahan	4,07	4,78	4,32	3,49	4,33
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Konstruksi	4,06	4,16	3,74	3,36	4,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	6,53	5,72	4,99	6,48
Transportasi dan Pergudangan	5,78	6,14	5,41	4,47	5,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,25	1,04	0,81	1,02
Informasi dan Komunikasi	0,91	1,08	0,95	0,72	0,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,60	0,50	0,41	0,53
Real Estate	0,89	0,99	0,83	0,62	0,74
Jasa Perusahaan	0,10	0,11	0,09	0,07	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,22	1,03	0,80	1,03
Jasa Pendidikan	2,50	3,03	2,77	2,22	2,76



Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	1,25	1,37	1,10	1,38
Jasa lainnya	0,70	0,79	0,71	0,57	0,73
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Memahami struktur ekonomi suatu daerah penting untuk mengetahui kontribusi setiap sektor terhadap total PDRB. Sektor ekonomi yang dominan, dengan melihat kontribusi terbesar pada PDRB ADHB, maka dapat diketahui sektor dominan yang menjadi ciri khas perekonomian daerah tersebut karena output dan produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Namun, ketergantungan pada sektor dominan juga membawa risiko: sedikit gejolak atau gangguan di sektor tersebut dapat mengguncang perekonomian daerah secara keseluruhan. Karena itu, diversifikasi sektor ekonomi kerap diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian daerah.

Struktur perekonomian Kabupaten Berau tidak begitu banyak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi kategori yang memiliki peran paling dominan. Dimana pada tahun 2023, dengan nilai PDRB ADHB sebesar 29,88 triliun rupiah, sektor pertambangan dan penggalian sendiri telah berkontribusi lebih dari 50 persen yaitu sebesar 58,27 persen terhadap total PDRB Kabupaten Berau. Kontribusi tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan kontribusi tahun 2022 sebesar 66,98 persen. Penurunan kontribusi ini juga sejalan dengan penurunan nilai nominal PDRB ADHB yang sebelumnya senilai 40,29 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 29,88 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 11,26 persen. Tidak seperti halnya kategori pertambangan dan penggalian, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan peran pada tahun 2023 dari yang sebelumnya 9,33 persen pada tahun 2022. Jika dilihat perkembangannya selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka kontribusi pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi. Adapun salah satu kunci utama perkembangan kategori ini adalah adanya peningkatan jumlah produksi hasil perkebunan kelapa sawit, coklat dan kegiatan kehutanan seperti hasil hutan yaitu sarang burung dan madu. Semakin meningkatnya permintaan akan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk industri pengolahan CPO menyebabkan sub sektor perkebunan sangat berkembang dalam lima tahun terakhir ini. Selain itu dengan masuknya tanaman coklat sebagai satu dari lima sektor unggulan dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) yang menegaskan upaya pengembangan kakao saat ini dan ke depannya.



Program Gerakan Mengembangkan Agribisnis (Gemari) Kakao yang dicanangkan oleh Pemda Berau merupakan program inovatif untuk meningkatkan produksi dan sinergitas antarlembaga/organisasi perangkat daerah terkait. Melalui Program Gemari, peningkatan produktivitas juga diikuti dengan perbaikan kualitas biji kakao melalui proses fermentasi. Fermentasi biji kakao mampu memberi nilai tambah sehingga bisa menembus pasar premium, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Selain melihat kondisi perekonomian dari pendekatan produksi maka dapat dilihat juga berdasarkan pendekatan pengeluaran yang dapat digunakan sebagai ukuran dasar yang menunjukkan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Pendekatan ini memberikan informasi tentang pemenuhan permintaan akhir dari pelaku ekonomi, baik domestik maupun luar negeri, terhadap berbagai jenis barang dan jasa. PDRB pengeluaran menjelaskan nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan di wilayah domestik dan digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai pelaku ekonomi. Konsumsi akhir ini dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor neto barang dan jasa.

Tabel 3.7 PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022**	2023**
Konsumsi Rumah Tangga	4.813.637,27	4.929.486,78	5.063.074,88	5.269.850,17	5.585.418,44
Konsumsi LNPRT	351.693,22	352.922,53	370.713,55	404.338,29	439.771,38
Konsumsi Pemerintah	1.482.784,86	1.465.650,77	1.448.877,84	1.656.311,51	2.350.490,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.070.016,66	8.029.331,27	8.181.979,30	8.782.076,82	9.875.035,05
Perubahan Inventori	15.639,08	17.679,55	4.436,12	4.701,90	5.432,05
Net Ekspor Barang dan Jasa	24.370.922,48	20.655.778,02	27.967.401,79	44.040.878,36	33.023.869,50
Produk Domestik Regional Bruto	39.104.693,57	35.450.848,90	43.036.483,47	60.158.157,05	51.280.017,17

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Berdasarkan Tabel 3.7 sebagian besar komponen pengeluaran menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada komponen net ekspor. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami peningkatan terbesar dengan peningkatan sebesar 12,45 persen atau sekitar 1,093 triliun rupiah. Sedangkan net ekspor barang dan jasa mengalami penurunan tajam sebesar -25,02 persen atau sekitar 11,017 triliun rupiah, dari 44,041 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 33,024 triliun rupiah pada tahun 2023. Penurunan pada komponen net ekspor barang dan jasa disebabkan komoditas batu bara yang menjadi komoditas ekspor utama Kabupaten berau mengalami penurunan harga pada tahun 2023. Penurunan harga batu bara terjadi karena beberapa sentimen negatif, mulai dari pelemahan harga gas, berlimpahnya pasokan batu bara di China, kenaikan tarif jasa Pelabuhan di Muara Berau Samarinda, hingga merosotnya permintaan impor baru batu bara India dari Australia. Di sisi lain, berdasarkan harga tetapan CPO oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata harga CPO mengalami penurunan dari 12.263 rupiah per kg pada tahun 2022 menjadi 10.947 rupiah per kg pada tahun 2023.

Indikator lain yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah PDRB per kapita. Melalui PDRB per kapita dapat dilihat kondisi perekonomian di suatu daerah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi angka PDRB pada suatu tahun dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat tingkat pemerataan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.



Gambar 3.1. PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar 3.1, pada tahun 2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Berau tercatat sebesar 198,53 juta rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Kabupaten Berau secara rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 198,53 juta rupiah selama tahun 2023. Nilai PDRB per kapita tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 236,23 juta rupiah pada tahun 2022. Jika melihat perkembangan dalam lima tahun terakhir, PDRB Per Kapita Kabupaten Berau menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, PDRB per kapita berada di angka 173,83 juta rupiah, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 143,67 juta rupiah. Setelah itu, nilai PDRB per kapita kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 171,49 juta rupiah dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 236,23 juta rupiah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 198,53 juta rupiah. Secara ekonomi, angka ini berarti bahwa setiap penduduk di Kabupaten Berau, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar 198,53 juta rupiah selama tahun 2017. Meskipun terdapat fluktuasi, secara keseluruhan tren positif pada PDRB perkapita mencerminkan adanya indikasi peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Berau.





Berdasarkan Tabel 3.7 sebagian besar komponen pengeluaran menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada komponen net ekspor. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami peningkatan terbesar dengan peningkatan sebesar 12,45 persen atau sekitar 1,093 triliun rupiah. Sedangkan net ekspor barang dan jasa mengalami penurunan tajam sebesar -25,02 persen atau sekitar 11,017 triliun rupiah, dari 44,041 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 33,024 triliun rupiah pada tahun 2023. Penurunan pada komponen net ekspor barang dan jasa disebabkan komoditas batu bara yang menjadi komoditas ekspor utama Kabupaten Berau mengalami penurunan harga pada tahun 2023. Penurunan harga batu bara terjadi karena beberapa sentimen negatif, mulai dari pelemahan harga gas, berlimpahnya pasokan batu bara di China, kenaikan tarif jasa Pelabuhan di Muara Berau Samarinda, hingga merosotnya permintaan impor baru bara India dari Australia. Di sisi lain, berdasarkan harga tetapan CPO oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata harga CPO mengalami penurunan dari 12.263 rupiah per kg pada tahun 2022 menjadi 10.947 rupiah per kg pada tahun 2023.

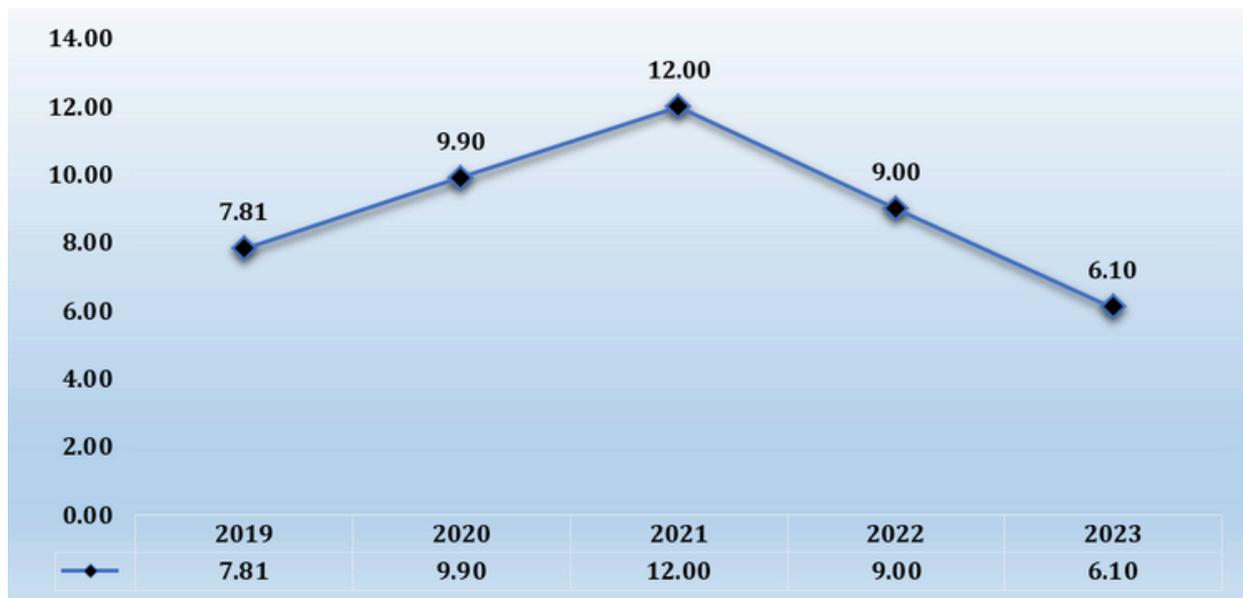
Indikator lain yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah PDRB per kapita. Melalui PDRB per kapita dapat dilihat kondisi perekonomian di suatu daerah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi angka PDRB pada suatu tahun dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat tingkat pemerataan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.



a. RASIO PAD Kabupaten Berau

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, maka Kabupaten Berau mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten Berau itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan belanja tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio ini juga menggambarkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal, seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, sehingga menjadi tolak ukur penting dalam perencanaan dan evaluasi keuangan daerah.

Gambar 3.2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan di Kabupaten Berau (persen), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

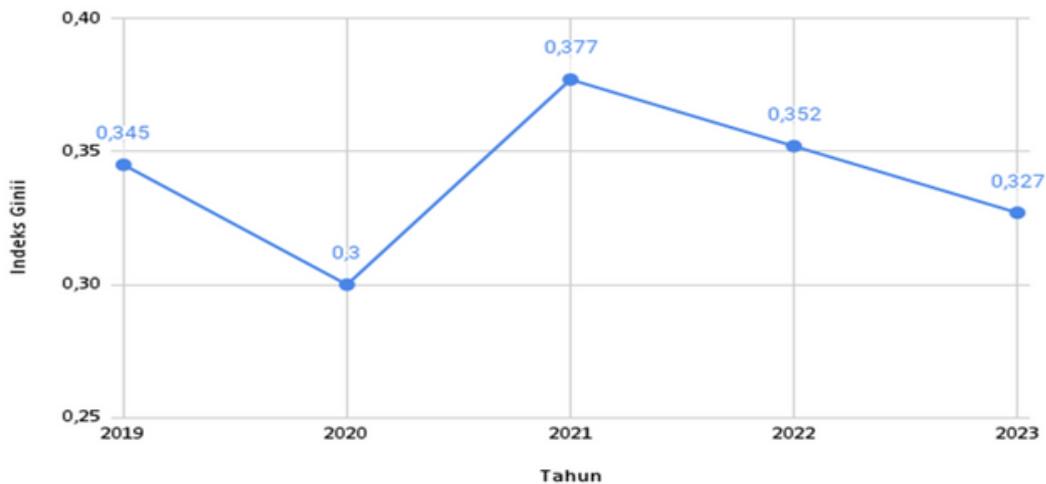




Berdasarkan Gambar 3.2, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan di Kabupaten Berau selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, rasio PAD tercatat sebesar 7,81 persen, yang kemudian meningkat menjadi 9,9 persen pada tahun 2020. Peningkatan ini kemungkinan mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli, meskipun kondisi perekonomian saat itu masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Rasio PAD mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan angka 12 persen, yang menandakan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Namun, pada tahun 2022, rasio ini menurun kembali menjadi 9 persen, dan pada tahun 2023 turun lebih jauh hingga mencapai angka 6,1 persen.

Secara keseluruhan, rasio PAD Kabupaten Berau masih berada pada tingkat yang relatif rendah, menunjukkan bahwa Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, diperlukan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi PAD, seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta memanfaatkan kekayaan daerah secara lebih produktif.

Gambar 3.3. Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

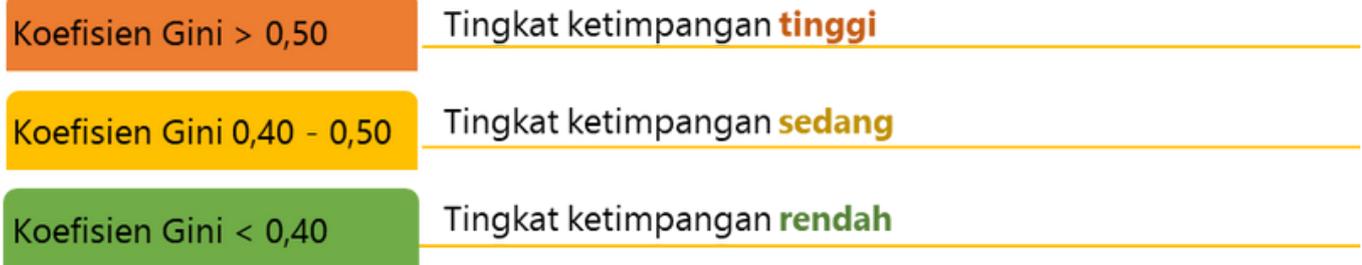
Untuk mengetahui secara pasti ketimpangan pendapatan di suatu wilayah perlu dilakukan pengukuran indikator ketimpangan pendapatan. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memrepresentasikan ketimpangan pendapatan yang terjadi, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah. Indeks ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, di mana setiap individu menerima pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan pendapatan yang sangat ekstrem, di mana seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu atau kelompok tertentu.





Berdasarkan rentang nilai Indeks Gininya, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni

Gambar 3.3



Berdasarkan Gambar 3.3 di atas, terlihat tren penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk selama tiga tahun terakhir. Nilai Indeks Gini pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,327, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,352, dan tahun 2021 yang mencapai 0,377. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk selama periode tersebut.

Tingginya peningkatan Indeks Gini pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, dimana dampak dari terjadinya pandemi tersebut sangat terasa di Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Berau, dengan catatan bahwa penurunan pendapatan lebih tajam dialami oleh lapisan masyarakat bawah dibandingkan dengan lapisan masyarakat atas. Namun demikian langkah cepat dan tepat segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Berau menurun yang dapat dilihat dari nilai Koefisien Gininya yang turun menjadi 0,352 di tahun 2022. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar, Pemerintah Kabupaten Berau juga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong peningkatan sektor Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. Adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Berau. Secara keseluruhan, fluktuasi nilai Koefisien Gini Kabupaten Berau yang terjadi selama lima tahun terakhir masih berada dalam kategori kurang dari 0,4 atau kelompok tingkat ketimpangan rendah sehingga fluktuasi nilai Koefisien Gini yang terjadi selama lima tahun terakhir masih



b. Tingkat Kemiskinan

Pembangunan dan kemiskinan merupakan fenomena yang sering berjalan beriringan sebagai bagian dari kebijakan dan upaya perbaikan di suatu daerah. Pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan bagi seluruh anggota masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, taraf hidup, maupun akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat dapat terbebas dari jerat kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini mencerminkan kesepakatan dunia untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Secara umum, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Seseorang dikategorikan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan, dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (basic needs). Sementara itu, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan penduduk setempat.

Tabel 3.8. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	526.615,00	568.500,00	595.550,00	624.948,00	677.819,00
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,70	0,95	0,98	0,16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,17	0,20	0,22	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



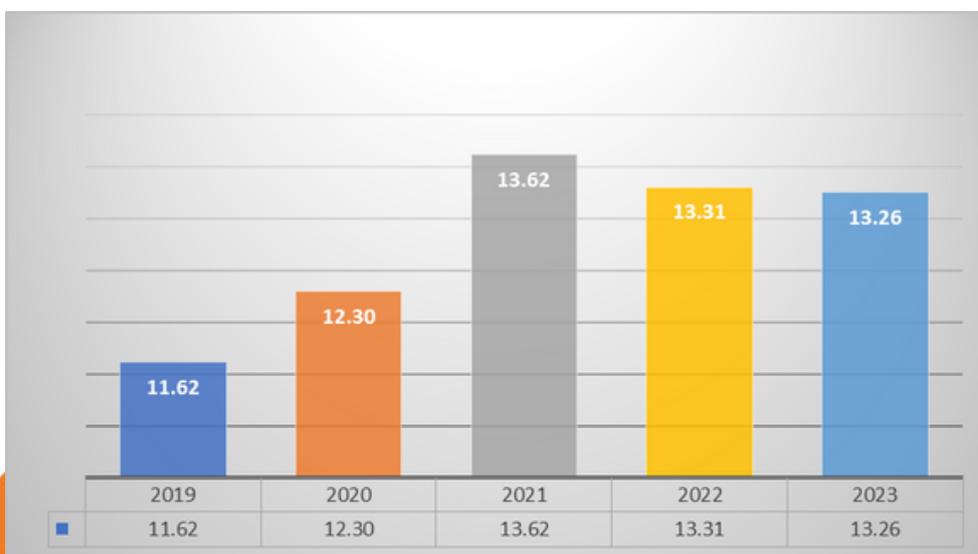


Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan batas minimum kebutuhan dasar seseorang dalam memenuhi standar hidup yang layak, baik dari segi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan dinyatakan dalam bentuk rupiah per kapita per bulan dan mencakup biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi asupan energi sebesar 2.100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan dasar lainnya, seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran totalnya berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3.5 garis kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 526.615, kemudian meningkat menjadi Rp 568.500 pada tahun 2020 atau naik sebesar 7,96%. Kenaikan berlanjut pada tahun 2021 menjadi Rp 595.550 dengan persentase kenaikan sebesar 4,76%, dan pada tahun 2022 menjadi Rp 624.948 atau naik 4,93%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, di mana garis kemiskinan mencapai Rp 677.819, mengalami kenaikan sebesar Rp 52.871 atau sekitar 8,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun tersebut, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar Rp 151.204 atau sekitar 28,71%.

Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan adanya peningkatan biaya hidup, yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan penyesuaian kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kondisi ekonomi, terutama pada tahun 2020 dan 2021, yang berlanjut dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan biaya kebutuhan dasar pada tahun-tahun berikutnya. Tren ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat agar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dapat memenuhi kebutuhan dasar di tengah meningkatnya standar biaya hidup.

Gambar 3.4. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau (ribu Penduduk), Maret 2019-Maret 2023

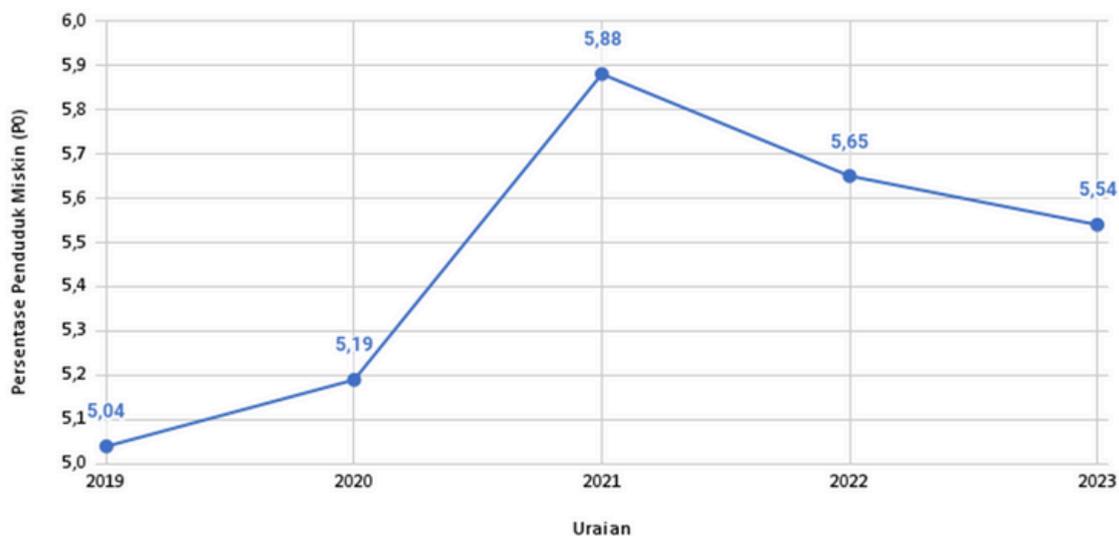


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Angka kemiskinan suatu wilayah merupakan salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Berau mengalami fluktuasi. Secara lebih rinci, kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin dapat diamati pada Gambar 3.4 dimana jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2021, yaitu sebesar 13,62 ribu orang. Angka ini kemudian perlahan menurun dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 13,26 ribu orang pada Maret 2023. Tingginya jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 merupakan dampak dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan perubahan signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial selama pandemi memberikan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi. Berbagai program dan kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dilaksanakan, sehingga jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan pada Maret 2023 dan Maret 2024. Namun, angka tersebut masih belum kembali ke tingkat yang dicapai sebelum pandemi. Persentase penduduk miskin yang cukup fluktuatif di Kabupaten Berau, dikarenakan banyak faktor selain daripada program serta kebijakan yang di laksanakan pemerintah daerah, keikutsertaan pihak lainnya seperti perusahaan, badan usaha milik negara dan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta masyarakat tu sendiri bagaimana berupaya agar kemiskinan di Kabupaten Berau dapat tuntas dan kesejahteraan semakin meningkat.

Gambar 3.5. Persentase penduduk miskin Kabupaten Berau 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, persentase kemiskinan mengalami fluktuasi yang sejalan dengan perubahan jumlah penduduk miskin. Peningkatan tertinggi terjadi pada Maret 2021, di mana persentase penduduk miskin naik sebesar 0,69 persen, dari 5,19 persen menjadi 5,88 persen. Namun, dalam dua tahun terakhir, terjadi tren penurunan hingga mencapai 5,54 persen pada Maret 2023.





Masalah kemiskinan tidak hanya sekedar mengukur berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, selain menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Dengan lebih dekatnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, diharapkan penduduk miskin yang pengeluarannya ada di dekat garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Nilai agregat dari P1 menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai P1, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun terakhir ini sejalan dengan kondisi pada persentase dan jumlah penduduk. Pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023 menunjukkan penurunan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan sehingga tercatat sebesar 0,16, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,98. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Hal serupa terjadi pada Indeks Keparahannya Kemiskinan, yang turun dari 0,22 pada Maret 2022 menjadi 0,01 pada Maret 2023. Penurunan ini mencerminkan semakin rendah persebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, atau dengan kata lain, tingkat ketimpangan di kelompok penduduk miskin semakin menurun. Jika melihat perkembangan P_1 dan P_2 selama kurun waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan berada dikisaran 0,66 hingga mencapai 0,98 pada tahun 2022 dimana terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Berau semakin jauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak 0,82 poin dari tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari 0,12 pada tahun 2019 menjadi 0,22 di tahun 2022. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin semakin melebar. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 0,01. Dengan adanya penurunan nilai P_1 dan P_2 mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Berau sangat konsisten dan berupaya agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat segera teratasi. Berbagai stimulan bantaaun diberikan seperti bantuan usaha untuk UMKM, pelaksanaan kegiatan melalui pameran, seminar dan sosialisasi dimana melibatkan usaha kecil menengah mengisi kegiatan tersebut. Serta program-program bantuan lainnya yang melibatkan penduduk miskin seperti rumah layak huni, beasiswa pelajar, bantuan nelayan dan lainnya.



c. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui suatu indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM dapat menggambarkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas, dan standar hidup layak sehingga pada saat perencanaan pembangunan, IPM juga digunakan untuk memberikan tuntunan penentuan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program (Budiriyanto, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk mengukur tingkat Pembangunan manusia berdasarkan tiga aspek dasar. Ketiga aspek dasar tersebut meliputi umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 3.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau (2020-2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Berau menunjukkan peningkatan konsisten selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 3.6, nilai IPM Kabupaten Berau pada tahun 2020 tercatat sebesar 75,19, meningkat menjadi 75,69 pada tahun 2021. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 76,24, dan kembali naik pada tahun 2023 mencapai 76,71. Peningkatan ini mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM ini memberikan indikasi positif bahwa Kabupaten Berau mengalami perkembangan dalam pembangunan manusia. Namun, upaya tetap perlu dilakukan untuk menjaga tren ini, terutama dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.



Tabel 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau Menurut Komponen, 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
UHH	Tahun	73,06	73,35	73,35	73,45
HLS	Tahun	13,32	13,33	13,35	13,36
RLS	Tahun	9,52	9,53	9,54	9,56
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah/Kapita/Tahun	12.018	12.435	13.095	13.620
IPM		75,19	75,69	76,24	76,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Perkembangan IPM tidak lepas dengan perkembangan komponen-komponen pembentuk IPM. Salah satu komponen pembentuk IPM adalah Umur harapan Hidup (UHH). UHH merupakan indikator yang berfungsi untuk merepresentasikan kondisi Kesehatan Masyarakat dan kualitas layanan Kesehatan yang tersedia. UHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan, sehingga UHH akan menunjukkan derajat kesehatan penduduk dari semua aspek kesehatan. Bila melihat perkembangan indikator UHH kabupaten Berau, menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 73,06 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,45 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya nilai UHH, maka semakin bertambah baik pula derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Berau. Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan penduduk. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya. Untuk mendukung tercapainya program tersebut, pemerintah Kabupaten Berau juga telah berupaya untuk menyediakan sarana atau fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Berau yang terdiri dari fasilitas rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu, serta penambahan tenaga kesehatan. Berbagai program bidang kesehatan juga terus ditingkatkan agar sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan. kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf dan status kesehatan penduduk.

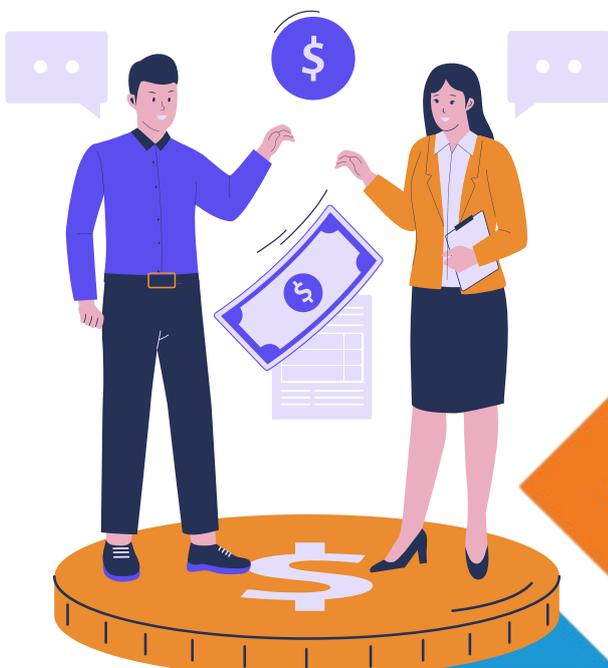
Selain UHH, komponen pembentuk IPM lainnya adalah pendidikan yang diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Melalui HLS akan dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh anak. Sementara itu, RLS mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya.



Berdasarkan angka HLS dan RLS, kondisi pendidikan di Kabupaten Berau menunjukkan adanya perbaikan kualitas yang semakin baik. HLS anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Berau pada tahun 2023 mencapai 13,36 tahun. Artinya, secara rata-rata anak berusia 7 tahun ke atas yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang bersekolah selama 13,36 tahun atau setara D1 atau di tahun pertama tingkat perguruan tinggi. Angka ini mengalami peningkatan 0,04 poin dibandingkan kondisi empat tahun sebelumnya atau 2020 yang baru mencapai 13,32 tahun.

Begitu pula kondisi yang digambarkan angka RLS juga mengalami perbaikan selama lima tahun terakhir. Angka RLS Kabupaten Berau pada tahun 2020 berada pada posisi 9,52 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 RLS ini memberikan arti bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Berau yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,56 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Kedua indikator tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menunjukkan adanya keberhasilan partisipasi pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan kemajuan dalam penyediaan akses pendidikan yang lebih merata dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Selain dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan, maka dimensi lainnya yang sangat mempengaruhi nilai IPM adalah standar hidup layak yang diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Berau pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp12,018 juta per tahun. Dengan kata lain, setiap bulan, rata-rata penduduk Kabupaten Berau mengeluarkan sekitar Rp1.001.500,00 per orang. Angka ini terus meningkat setiap tahun, mencapai Rp13,620 juta per tahun pada tahun 2023, atau sekitar Rp1.135.000,00 per bulan. Semakin tinggi tinggi pengeluaran per kapita ini dapat memberi gambaran bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Berau semakin membaik juga. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam taraf hidup masyarakat Kabupaten Berau, yang dapat dihubungkan dengan peningkatan pendapatan, akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

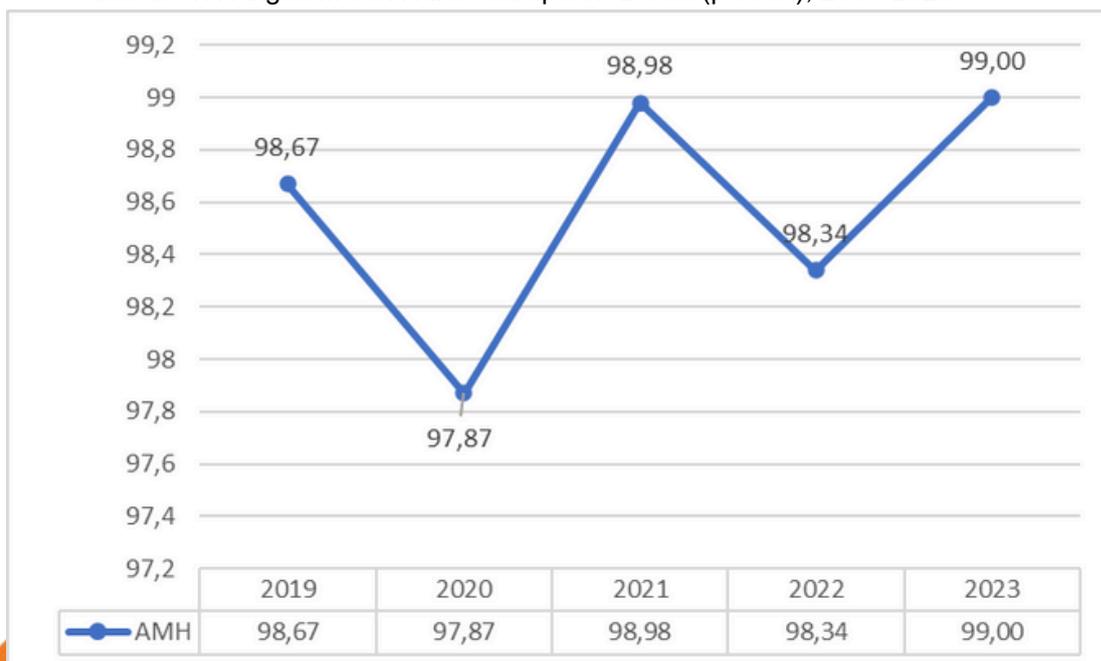




d. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan yang lain dapat dilihat melalui Angka Melek Huruf (AMH). Menurut UNESCO, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan ini menjadi kemampuan dasar dalam memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Kemampuan tersebut diukur menggunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam berbagai jenis huruf, seperti huruf Latin, Arab, Jawa, Kanji, dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, AMH dapat menggambarkan perkembangan intelektual penduduk dan menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf di daerah. Nilai AMH berkisar antara 0 hingga 100. Tingginya nilai AMH mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dasar atau program keaksaraan dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nilai AMH sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh penduduk di suatu wilayah mampu membaca dan menulis dalam huruf Latin atau jenis huruf lainnya. Sebaliknya, rendahnya nilai AMH mengindikasikan rendahnya produktivitas penduduk, tingginya angka buta huruf, serta meningkatnya kerentanan terhadap eksploitasi akibat minimnya akses terhadap informasi.

Gambar 3.7. Angka Melek Huruf Kabupaten Berau (persen), 2019-2023

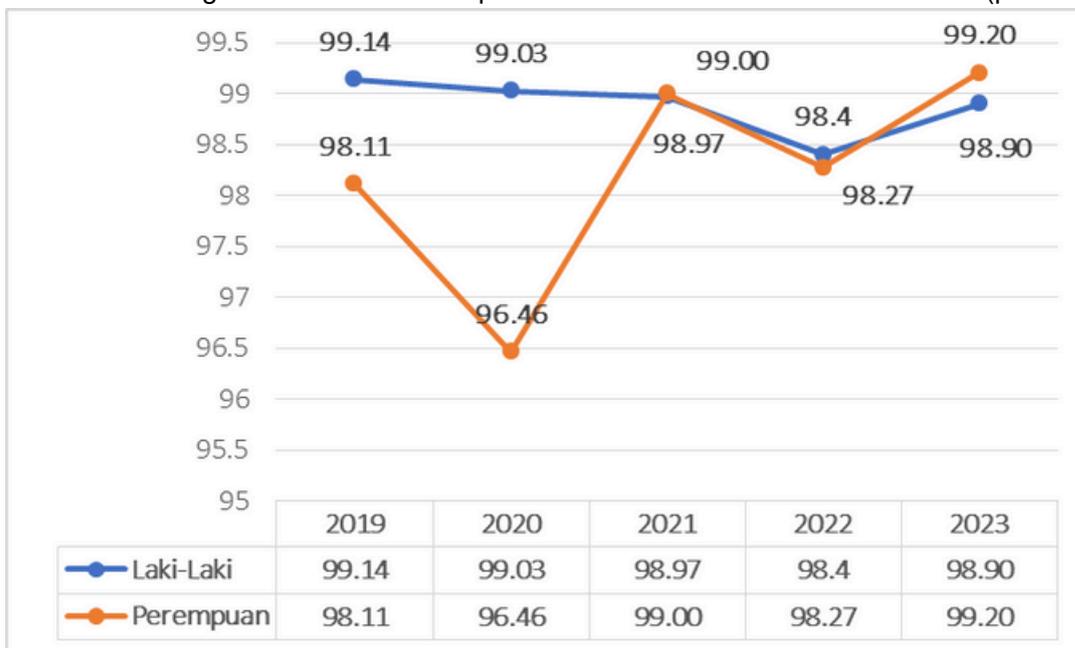


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Berdasarkan Gambar 3.7, Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi kecil namun tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi, mendekati nilai sempurna. Pada tahun 2019, AMH tercatat sebesar 98,67 persen dan mengalami sedikit penurunan menjadi 97,87 persen pada tahun 2020. Angka ini kembali meningkat menjadi 98,98 persen pada tahun 2021, meskipun turun tipis ke 98,34 persen pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023, dengan AMH mencapai 99 persen. Nilai ini mencerminkan keberhasilan program literasi dan pendidikan dasar yang terus berlanjut di wilayah ini. Konsistensi pada tingkat AMH yang tinggi menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam memastikan akses pendidikan yang merata serta peningkatan kemampuan literasi masyarakat Berau.

Gambar 3.8. Angka Melek Huruf Kabupaten Berau Berdasarkan Jenis Kelamin (persen), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin seperti pada Gambar 3.8, Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang serupa antara laki-laki dan perempuan, dengan beberapa perbedaan kecil di antaranya. Pada kelompok laki-laki, AMH sedikit menurun dari 99,14 persen pada tahun 2019 menjadi 99,03 persen pada tahun 2020, kemudian turun tipis lagi ke 98,97 persen pada tahun 2021 dan mencapai titik terendah di 98,4persen pada tahun 2022, sebelum kembali naik ke 98,90 persen pada tahun 2023. Sementara itu, pada kelompok perempuan, AMH mengalami fluktuasi yang lebih bervariasi. Setelah mencapai 98,11 persen pada tahun 2019, angka ini menurun signifikan menjadi 96,46 persen pada tahun 2020, namun melonjak ke 99,00 persen pada tahun 2021, meski sedikit turun ke 98,27 persen pada tahun 2022, dan akhirnya meningkat menjadi 99,20 persen pada tahun 2023. Kenaikan yang konsisten pada tahun terakhir untuk kedua kelompok menunjukkan peningkatan akses pendidikan yang inklusif, baik untuk laki-laki maupun perempuan, serta keberhasilan program-program Pendidikan dasar yang inklusif dan upaya nyata dalam mendukung kesetaraan gender di bidang literasi.

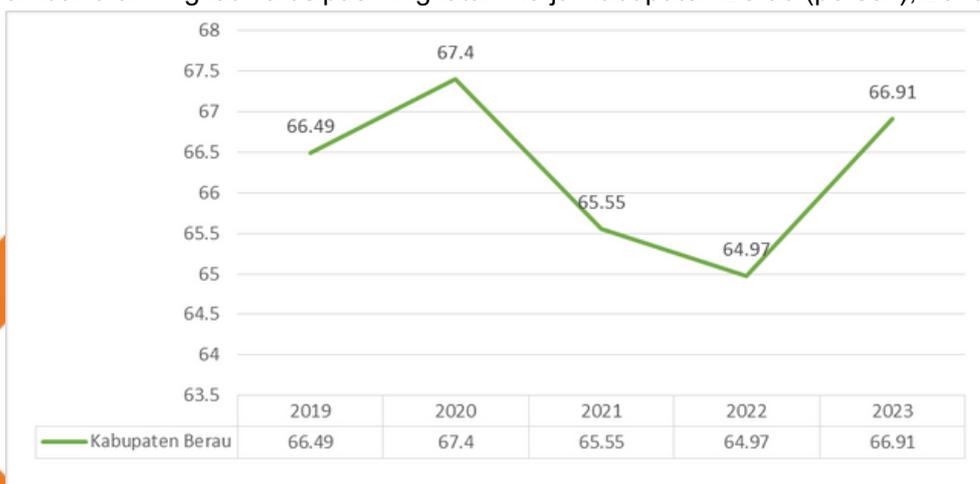


e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketersediaan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan dapat lebih cepat terlaksana. Hal ini dikarenakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam proses pembangunan ialah faktor produksi tenaga kerja yang melimpah. Dengan adanya tenaga kerja yang memadai, maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Begitu pun juga sebaliknya, tanpa adanya tenaga kerja yang memadai maka aktifitas ekonomi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga melambat. Ketersediaan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan dapat lebih cepat terlaksana. Hal ini dikarenakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam proses pembangunan ialah faktor produksi tenaga kerja yang melimpah. Dengan adanya tenaga kerja yang memadai, maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Begitu pun juga sebaliknya, tanpa adanya tenaga kerja yang memadai maka aktifitas ekonomi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga melambat. Penduduk pada suatu daerah secara alamiah akan terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun dan akan diikuti juga dengan penambahan penduduk usia kerja. Selanjutnya, semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka secara otomatis jumlah angkatan kerja juga akan bertambah. Salah satu indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK diukur sebagai persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana sumber daya manusia di suatu wilayah dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Tingginya TPAK menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dari penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja, sementara rendahnya TPAK dapat mengindikasikan potensi tenaga kerja yang belum termanfaatkan atau menghadapi kendala untuk berpartisipasi, seperti kurangnya kesempatan kerja, keterampilan, atau faktor sosial dan budaya.

Gambar 3.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Berau (persen), 2019-2023



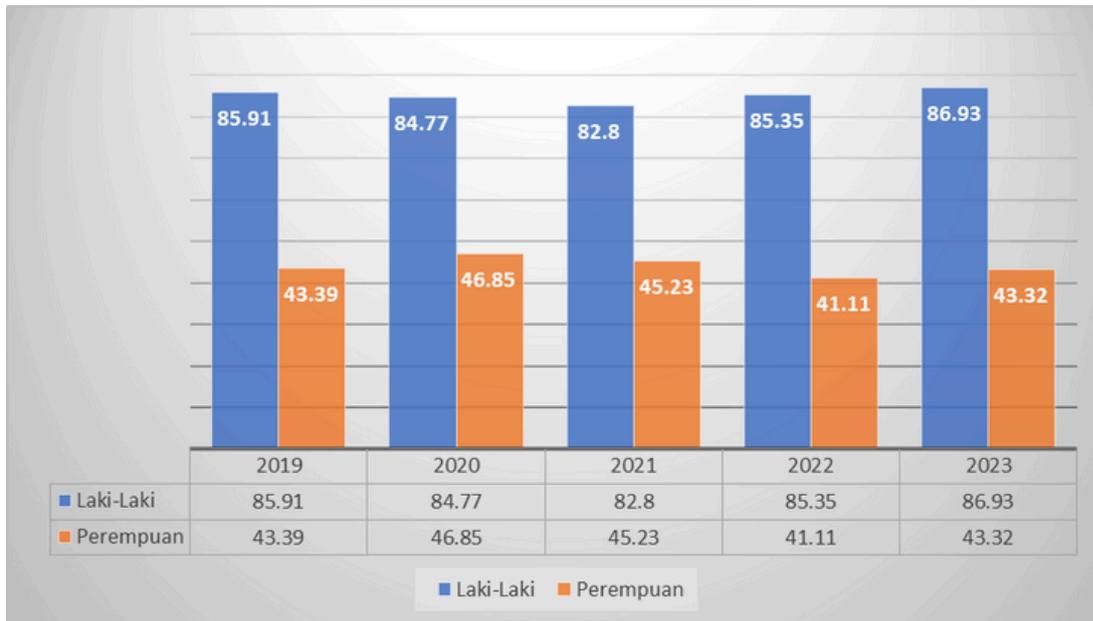
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Berdasarkan Gambar 3.9, terlihat selama periode tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan angka dari tahun 2020 ke 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Berau mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 67,4 dan merupakan titik tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022, TPAK menurun menjadi 64,97 pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi disebabkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja dan berkurangnya peluang kerja di beberapa sektor ekonomi.

Pada tahun 2023 terjadi pemulihan sehingga tercatat nilai TPAK Kabupaten Berau sebesar 66,91. Hal ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dari tahun ke tahun, angka TPAK Kabupaten Berau rata-rata berada di atas 64 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 64-65 orang termasuk angkatan kerja dan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Namun, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan TPAK tetap diperlukan, terutama melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang lebih inklusif.

Gambar 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Berau Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Apabila dikaitkan dengan isu gender, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dari pada TPAK perempuan selama tahun 2019 hingga 2023. Walaupun fluktuatif selama kurun waktu lima tahun ini, namun persentase laki-laki tetap lebih tinggi dari perempuan. Salah satu penyebab dari fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau saja tapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia pembagian tugas dalam keluarga memposisikan laki-laki yang berkewajiban bekerja untuk mencari nafkah. Dengan demikian, porsi laki-laki yang bekerja masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. TPAK perempuan dalam setiap tahunnya masih di bawah 50 persen yang dapat memberikan gambaran bahwa peran perempuan dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Berau masih rendah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jenis kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh penduduk perempuan di Kabupaten Berau adalah mengurus rumah tangga. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peran tradisional yang masih melekat, di mana perempuan diharapkan untuk berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, norma sosial turut memengaruhi perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering dianggap lebih cocok untuk pekerjaan tertentu, sehingga membatasi pilihan mereka dalam berpartisipasi di pasar kerja.

Jika melihat TPAK pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan untuk persentase TPAK laki-laki dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,14 poin persen dari 85,91 persen pada tahun 2019 menjadi 84,77 persen pada tahun 2020. Dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 82,80 persen. Hal ini dapat disebabkan pada masa pandemi banyak perusahaan yang tidak beroperasi secara penuh atau bahkan tidak beroperasi sama sekali yang mengakibatkan banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan cara memutus pekerja (PHK). Di sisi lain, banyak penduduk perempuan yang juga mengambil sisi positif adanya pandemi dengan membuka usaha kecil-kecilan (UMKM) demi menyambung hidup. Sehingga menyebabkan TPAK perempuan mengalami peningkatan selama 3 tahun tersebut. Namun kondisi kembali pulih di tahun 2022 dan 2023 dimana TPAK laki-laki mengalami peningkatan kembali.



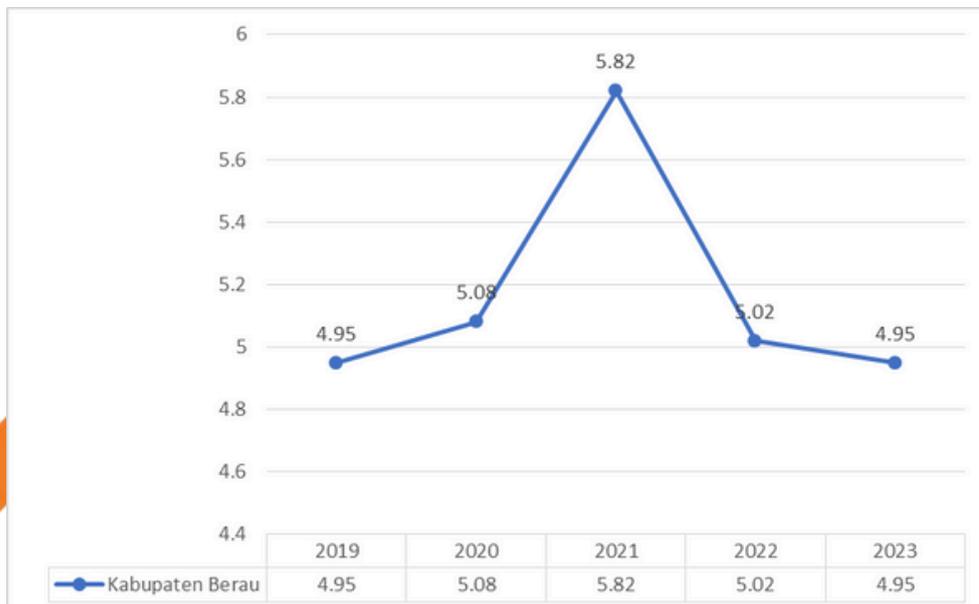


f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu tugas pemerintah yang sangat berat adalah mengatasi dan mengurangi pengangguran di segala aspek kehidupan. Pada aspek ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat, sehingga pendapatan pajak bagi pemerintah menjadi rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi karena adanya penurunan permintaan atau konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa serta kemungkinan rendahnya stimulus atau pendorong pertumbuhan ekonomi dari belanja fiskal. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila masalah pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Pengangguran diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran menjadi perhatian khusus bagi pemerintah suatu wilayah karena semakin banyak jumlah pengangguran, semakin besar pula beban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dapat memicu peningkatan kriminalitas dan berbagai masalah sosial lainnya, yang pada akhirnya berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi pengangguran di Kabupaten Berau dapat diukur menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Secara sederhana, TPT diartikan sebagai jumlah pengangguran untuk setiap 100 orang dalam angkatan kerja. Berikut ini disajikan grafik perkembangan nilai TPT di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau (persen), 2019-2023



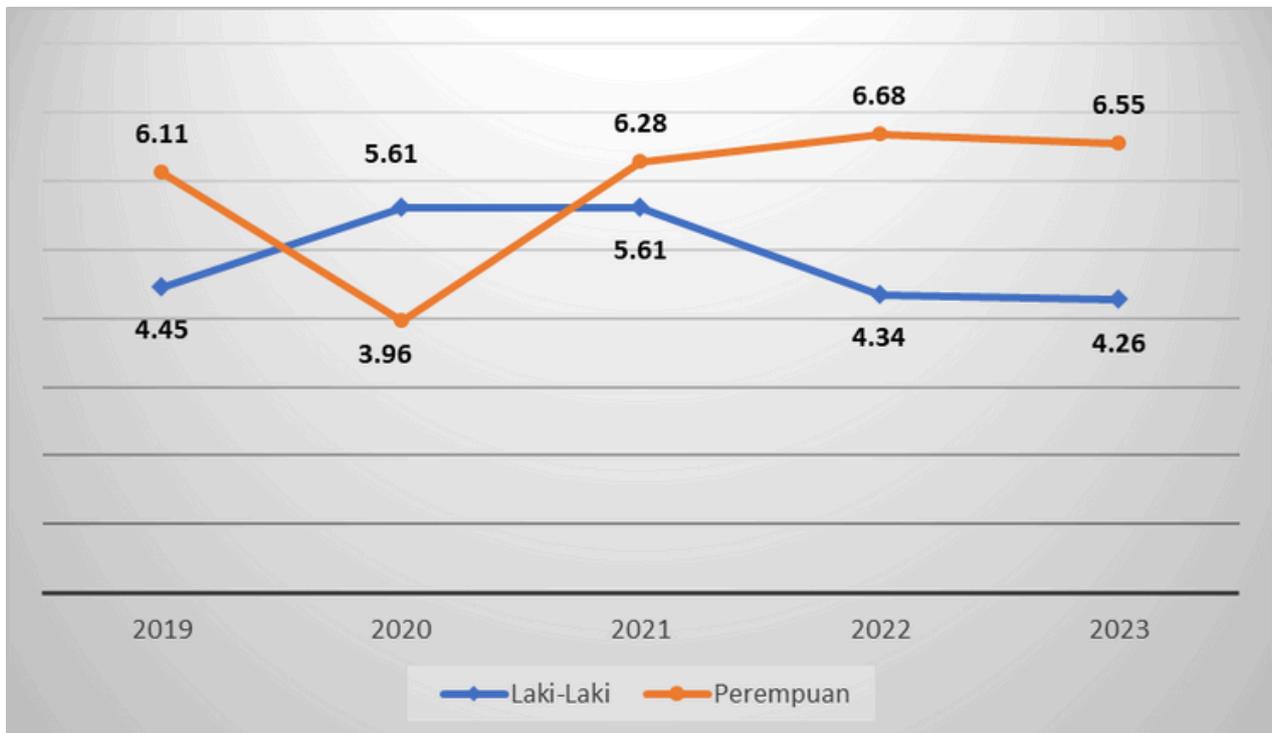
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



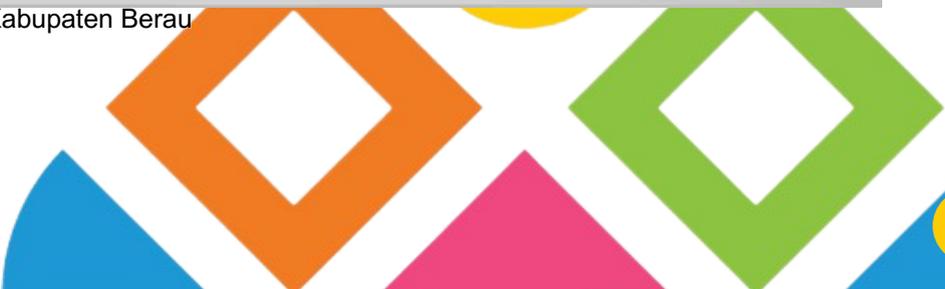
Berdasarkan Gambar 3.11, data TPT di Kabupaten Berau dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 4,95 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 5,08 persen pada tahun 2020. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan berbagai sektor ekonomi terhenti dan menurunnya peluang kerja. Dampak pandemi terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana TPT mengalami lonjakan yang lebih signifikan menjadi 5,82 persen dan merupakan angka TPT tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang menjadi beban dalam proses pembangunan ekonomi dan semakin sedikit angkatan kerja yang dapat berpartisipasi menggerakkan kegiatan ekonomi. Meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Berau sebagai dampak dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang memburuk akibat pandemi di tahun 2020 dan berimbas hingga 2021.

Namun, pada tahun 2022, TPT mengalami penurunan kembali menjadi 5,02 persen, yang mencerminkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang mulai memberikan dampak positif. Pada tahun 2023, TPT kembali mencatatkan angka yang sama dengan tahun 2019, yaitu 4,95 persen, menunjukkan bahwa kondisi pengangguran di Kabupaten Berau telah kembali stabil. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Berau tidak mengalami lonjakan yang drastis, dan secara umum, tingkat pengangguran berada di kisaran yang relatif rendah, yaitu sekitar 4-6 persen.

Gambar 3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Berdasarkan Gambar 3.12, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Berau menurut jenis kelamin dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya perbedaan tren antara laki-laki dan perempuan. TPT laki-laki mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPT laki-laki tercatat sebesar 4,45% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi 5,61%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia kerja. Angka tersebut tetap stabil pada tahun 2021 sebelum akhirnya mengalami penurunan bertahap menjadi 4,34% di tahun 2022 dan 4,26% di tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pemulihan lapangan pekerjaan untuk laki-laki.

Di sisi lain, TPT perempuan menunjukkan variasi yang lebih tajam. Pada tahun 2019, TPT perempuan tercatat sebesar 6,11% dan turun drastis menjadi 3,96% pada tahun 2020, berbeda dengan tren laki-laki pada periode yang sama. Namun, pada tahun 2021, TPT perempuan melonjak signifikan menjadi 6,28%, kemudian meningkat lagi ke angka tertinggi 6,68% pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 6,55% di tahun 2023. TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, kecuali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan kerentanan perempuan yang lebih besar di pasar tenaga kerja, terutama pasca pandemi COVID-19, yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses pekerjaan formal, beban domestik, serta tantangan struktural dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti peningkatan keterampilan, akses terhadap lapangan pekerjaan yang setara, serta pemberdayaan ekonomi perempuan guna menurunkan angka pengangguran di kalangan perempuan.



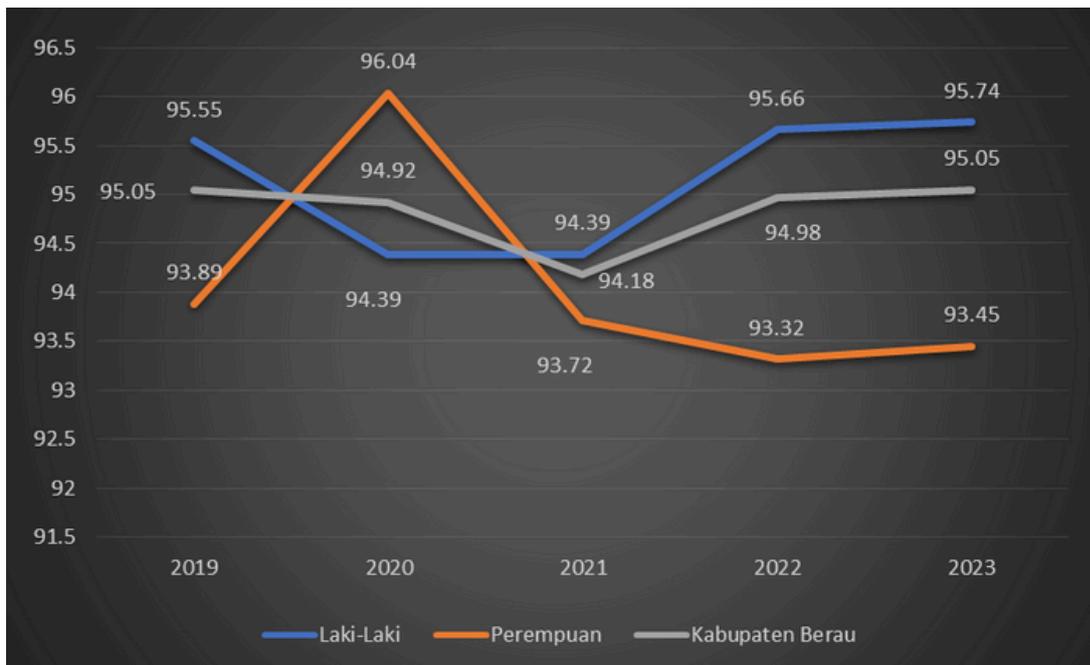


g. Tingkat Kesempatan Kerja

Memperluas kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak gejolak sosial misalnya kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Seiring dengan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang tersedia di Kabupaten Berau juga mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara kedua komponen tersebut, di mana semakin rendah tingkat pengangguran, semakin banyak pula kesempatan kerja yang dapat tersedia, dan sebaliknya, peningkatan pengangguran sering kali mencerminkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. TKK akan selalu berkaitan dengan TPT. Jika TPT semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

Gambar 3.13. Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Berau Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Berdasarkan Gambar 13, Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Berau menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2019 hingga 2023, meskipun terdapat perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada kelompok laki-laki, tingkat kesempatan kerja sedikit menurun dari 95,55 persen pada tahun 2019 menjadi 94,39 persen pada tahun 2020 dan 2021, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 95,66 persen dan terus naik tipis menjadi 95,74 persen pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai memberikan dampak positif.

Di sisi lain, tingkat kesempatan kerja pada kelompok perempuan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Setelah meningkat dari 93,89 persen pada tahun 2019 menjadi 96,04 persen pada tahun 2020, angka ini kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 93,72 persen dan 93,32 persen, sebelum sedikit meningkat menjadi 93,45 persen pada tahun 2023. Secara keseluruhan, tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Berau stabil dalam kisaran 94,18 persen hingga 95,05 persen, dengan tahun 2023 kembali mencatat angka yang sama seperti tahun 2019, yaitu 95,05 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 95 sampai dengan 96 orang yang memiliki kegiatan bekerja sedangkan 4 hingga 5 orang sisanya merupakan pengangguran. Dari angka TKK tersebut mengindikasikan sebagian besar bahkan hampir seluruh angkatan kerja sudah terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada.

Meskipun demikian, fluktuasi tingkat kesempatan kerja perempuan mencerminkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan untuk mendorong kesempatan kerja yang lebih inklusif, sehingga dapat memastikan keterlibatan yang lebih setara antara laki-laki dan Perempuan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau juga harus berupaya agar dapat mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya berorientasi pegawai atau buruh menjadi wirausahawan mandiri. Apalagi di era disrupsi seperti ini semakin banyak inovasi dan kreatifitas baru yang dihasilkan yang mengakibatkan dapat mengubah pekerja manusia menjadi mesin serta akan berpengaruh kepada sedikitnya lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada penduduk dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan dan memperluas usaha kecil menengah. Selain itu, bentuk lain dari dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kewirausahaan dapat berupa pemberian pinjaman modal dengan fasilitas perkreditan murah atau dengan membantu pemasaran yang baik dan dukungan teknologi untuk akses pasar digital yang lebih luas agar produk-produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikenal dan dikonsumsi masyarakat yang lebih luas.



BAB 4

ASPEK PELAYANAN UMUM



4.1 Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam teori ekonomi, disebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas, akan mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi. Salah satu indikator yang memegang peranan sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penggerak bagi pembangunan dan sebuah bekal yang utama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, serta berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan melibatkan berbagai elemen, yaitu interaksi tenaga pendidik (guru) dengan anak didik (siswa) yang mendorong terjadinya proses belajar, termasuk fasilitas sekolah. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan tentunya dengan fasilitas yang memadai. Data mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru di suatu wilayah menjadi indikator penting dalam mengevaluasi mutu pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Misalnya, jumlah sekolah yang cukup dapat memastikan bahwa akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah, sementara rasio guru terhadap murid yang ideal berkontribusi pada proses pembelajaran yang lebih efektif. Dengan dukungan data yang lengkap, pemerintah dapat merancang program pendidikan yang lebih terarah dan tepat, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Berau terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dapat dilihat dari banyaknya fasilitas sekolah yang terus ditingkatkan. Dapat dilihat pada Tabel 4.1.1, pada tingkat pendidikan yang paling dasar, fasilitas gedung Sekolah Dasar (SD)/sederajat memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Terdapat sebanyak 176 unit SD/sederajat di Kabupaten Berau pada tahun 2023. Jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hampir semua desa di Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan fasilitas sekolah dasar/sederajat. Sedangkan pada fasilitas sekolah SMP/sederajat mengalami kenaikan sebanyak 2 unit dari 68 unit pada tahun 2022 menjadi 70 unit pada tahun 2023. Adapun untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat, jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Berau selama tahun 2021 sampai dengan 2023 masih sama yaitu sebanyak 37 unit.



Tabel 4.1.1 Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar (SD)/Sederajat					
Sekolah	-	-	175	175	176
Guru	-	-	2.286	2.278	2.336
Murid	-	-	33.667	34.601	36.157
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat					
Sekolah	-	-	68	68	70
Guru	-	-	1.061	1.066	1.200
Murid	-	-	13.707	13.884	14.292
Sekolah Menengah Atas (Atas)/Sederajat					
Sekolah	-	-	37	37	37
Guru	-	-	816	908	978
Murid	-	-	11.363	11.198	11.564

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan Kementerian Agama Kabupaten Berau





Hubungan antara jumlah sekolah, guru, dan murid mencerminkan kapasitas dan aksesibilitas sistem pendidikan di Kabupaten Berau. Harapannya kenaikan jumlah sekolah dapat sejalan dengan jumlah guru dan murid yang ada di Kabupaten Berau. Pada jenjang SD/ sederajat jumlah guru mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 2.286 guru pada tahun 2019 menjadi 2.278 guru pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 2.236 guru pada tahun 2023. Pada jenjang SMP/ sederajat, peningkatan jumlah sekolah sejalan dengan bertambahnya jumlah guru dari 1.061 di tahun 2021 menjadi 1.200 guru di tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dengan jumlah fasilitas pendidikan yang bertambah. Sebaliknya, pada jenjang SMA/ sederajat, meskipun jumlah sekolah tetap stabil, namun jumlah guru mengalami peningkatan signifikan dari 816 guru di tahun 2021 menjadi 978 guru di tahun 2023. Kenaikan yang terjadi menunjukkan adanya fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar di SMA/ sederajat, guna memastikan kebutuhan pendidikan di jenjang ini tetap terpenuhi dengan baik.

Jumlah murid di jenjang SD/ sederajat di Kabupaten Berau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah murid tercatat sebanyak 33.667 dan terus meningkat menjadi 34.601 pada tahun 2022, hingga mencapai 36.157 pada tahun 2023.

Kemudian untuk jumlah murid pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di Kabupaten Berau menunjukkan dinamika yang menarik dari data yang tersedia. Pada jenjang SMP/ sederajat, jumlah murid mengalami kenaikan, dari 13.707 murid pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 menjadi 14.292 siswa. Kemudian, pada jenjang SMA/ sederajat, jumlah murid menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil, dari 11.363 di tahun 2021 turun menjadi 11.198 murid di tahun 2022. Lalu, mengalami kenaikan menjadi sebanyak 11.564 di tahun 2023. Peningkatan pada setiap jenjang sekolah mencerminkan bertambahnya partisipasi siswa, yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah baru.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana gambaran prasarana pendidikan di Kabupaten Berau, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Nilai rasio murid-guru yang semakin tinggi menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar yang semakin besar, atau dengan kata lain tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid semakin rendah sehingga dapat memengaruhi mutu pengajaran seorang guru.



Berdasarkan Tabel 4.1.2 menunjukkan rasio murid-guru di Kabupaten Berau. Pada tahun 2023, rasio murid-guru untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 14,99 atau dapat diartikan bahwa rata-rata seorang guru SD/ sederajat mengajar 14-15 murid. Sedangkan untuk jenjang SMP/ sederajat sebesar 11,91 atau dapat diartikan bahwa rata-rata seorang guru SMP/ sederajat mengajar 11-12 murid. Pada jenjang SMA/ sederajat rasio murid-guru sebesar 11,82 atau dapat dimaknai bahwa rata-rata seorang guru SMA/ sederajat mengajar sebanyak 11-12 murid. Terlihat bahwa tingkat pengawasan seorang guru pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat lebih sedikit dibandingkan dengan seorang guru di jenjang SD/ sederajat. Pada kenyataannya, hal tersebut merupakan kondisi yang baik karena peranan seorang guru pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat sangat penting, di mana pada jenjang ini akan terjadi proses perubahan pola pikir siswa dan pengembangan diri mereka menjadi lebih dewasa untuk mampu merancang dan mewujudkan masa depannya di jenjang berikutnya.

Tabel 4.1.2 Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	-	-	14,73	15,19	15,48
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	-	-	12,92	13,02	11,91
Sekolah Menengah Atas (Atas)/Sederajat	-	-	13,93	12,33	11,82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan Kementerian Agama Kabupaten Berau

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyatakan bahwa pada jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat idealnya seorang guru bertanggung jawab terhadap 15-20 murid. Rasio murid-guru di Kabupaten Berau masih memenuhi standar ideal. Meskipun rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi pada beberapa faktor yang mempengaruhi di suatu daerah. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan mempengaruhi manajemen kelas, proses belajar di kelas, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman tenaga pendidik juga perlu dipertimbangkan, karena pendidikan yang lebih terampil dan berpengalaman, akan bisa menangani kelas dengan jumlah yang lebih banyak daripada guru yang belum banyak pengalaman.





Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam tujuan pembangunan suatu negara. Tidak dapat di pungkiri bahwa sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu wilayah. Pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi diri siswa. Sehingga pentingnya sarana dan prasarana pendidikan yang merata di setiap wilayah. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan, dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi sekolah yang disumbangkan untuk kemajuan suatu bangsa. Melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat memberi gambaran secara umum penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Tugas pemerintah memastikan bahwa peserta didik dapat menjajaki pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk usia sekolah yang bersesuaian. Cakupan usia sekolah yaitu usia 7 – 12 tahun mengikuti pendidikan sekolah dasar, usia 13 – 15 tahun mengikuti pendidikan menengah pertama, usia 16 – 18 tahun mengikuti pendidikan menengah atas dan usia 19 – 24 tahun mengikuti pendidikan perguruan tinggi. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut juga dapat mewujudkan salah satu program SDGs tentang kesetaraan dalam memperoleh kesempatan belajar yang akan menjamin setiap anak-anak akan mendapatkan manfaat dari lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Tabel 4.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	99,25	99,37	99,18	99,95	99,65
SMP/MTs	97,80	97,59	97,35	97,67	96,80
SMA/SMK/MA	79,23	81,38	81,08	79,40	80,30
Perguruan Tinggi	14,85	14,44	16,22	15,56	17,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Pada Tabel 4.1.3 menunjukkan bahwa APS tingkat SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan jenjang sekolah lainnya. Pada tahun 2019, APS untuk kelompok usia ini sebesar 99,25, dan kemudian berfluktuasi hingga menjadi 99,65 pada tahun 2023. Nilai APS pada tingkat SD/ sederajat sebesar 99,65 menjelaskan bahwa dari total penduduk umur 7-12 tahun di Kabupaten Berau, terdapat sekitar 99,65 persen yang sedang bersekolah dan hanya 0,35 persen lainnya yang tidak bersekolah. Atau dapat diartikan, hampir semua anak umur 7-12 tahun masih bersekolah. APS yang juga cukup tinggi ditemukan pada tingkat SMP/ sederajat yang selalu berada pada angka di atas 95 persen setiap tahunnya selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Sedangkan, untuk nilai APS pada tingkat SMA/ sederajat masih terpaud di angka kurang dari 85 persen. Bahkan pada nilai APS di tingkat perguruan tinggi masih berada di angka kurang dari 20 persen.

Semakin menurunnya persentase APS di tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin mendekati usia dewasa, individu memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sering kali memunculkan dilema antara melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan waktu untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan. Bagi remaja usia 16-18 tahun atau biasa di tingkat sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang beruntung, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan rumah tangga untuk mengeluarkan biaya pendidikan, baik untuk kebutuhan pribadi siswa maupun biaya sekolah, terutama jika bersekolah di lembaga swasta. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, menyekolahkan anak juga berarti menanggung biaya tidak langsung atau opportunity cost, seperti waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja. Ketika biaya tidak langsung dirasa lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan dari pendidikan, orang tua sering kali menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada pendidikan anak mereka.

Tabel 4.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	106,89	105,78	106,84	106,46	106,48
SMP/MTs	82,85	82,89	81,50	87,39	85,26
SMA/SMK/MA	93,50	92,61	95,38	93,96	94,85
Perguruan Tinggi	24,90	24,20	25,63	21,56	22,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Indikator APK dapat menunjukkan seberapa besar kesempatan sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Seperti halnya nilai angka partisipasi sekolah, nilai APK tertinggi juga terdapat pada jenjang SD/ sederajat. Selama lima tahun terakhir, nilai APK di Kabupaten Berau konsisten berada di atas 100 persen. Pada tahun 2023, nilai APK tercatat mencapai 106,48 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/ sederajat sekitar 106,48 persen. Artinya, dari setiap 107 siswa SD/ sederajat, 100 siswa berada pada rentang usia ideal 7-12 tahun, sementara 7 siswa lainnya berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun. APK yang cenderung tinggi pada jenjang SD/ sederajat dikarenakan jenjang tersebut merupakan jenjang pendidikan dasar. Di Kabupaten Berau, fenomena ini didukung oleh tersedianya fasilitas SD di hampir seluruh desa, sehingga akses terhadap pendidikan dasar menjadi lebih mudah bagi masyarakat.

Pada jenjang pendidikan selain SMP/ sederajat, nilai APK Kabupaten Berau masih berkisar di angka kurang 100 persen. Pada tahun 2023, APK jenjang SMP/ sederajat juga merupakan satu satunya APK yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya nilai yaitu dari 87,39 persen menjadi 85,26 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan lainnya, mengalami peningkatan yaitu dari 106,46 persen menjadi 106,48 persen untuk jenjang SD/ sederajat, dari 93,96 persen menjadi 94,85 persen untuk jenjang SMA/ sederajat dan dari 21,56 persen menjadi 22,97 persen untuk jenjang perguruan tinggi.





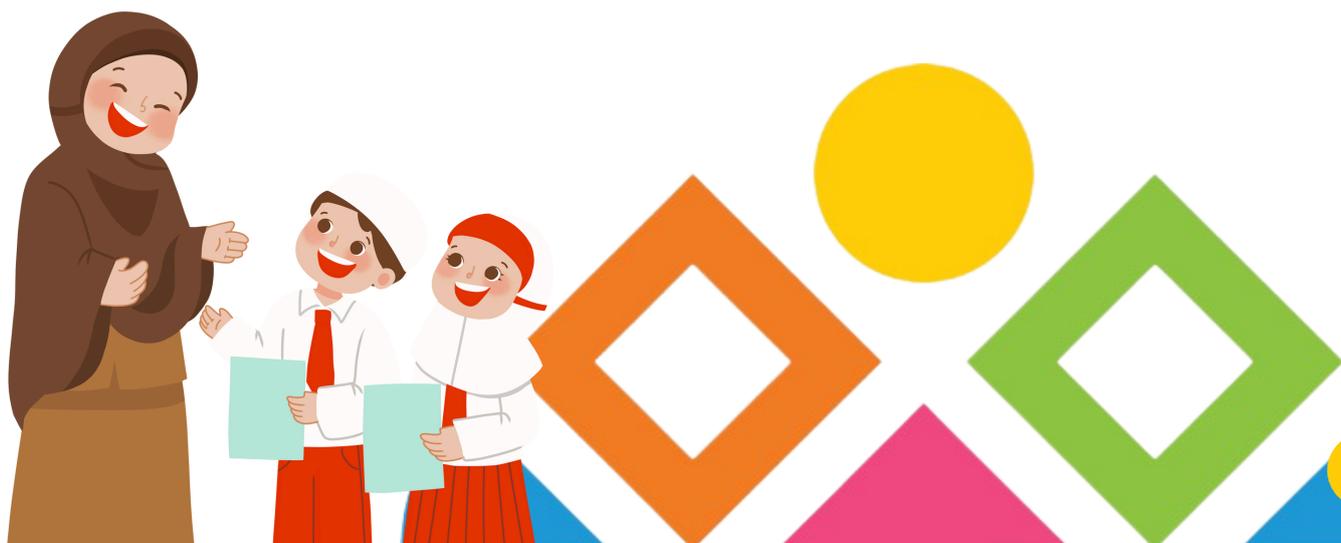
Selain itu, ada nilai Angka Partisipasi Murni (APM) yang didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM berkisar antara 0-100, yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Demikian halnya yang terjadi pada APS dan APK, APM jenjang SD/ sederajat juga merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2023, Kabupaten Berau memiliki nilai APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,18 persen, yang menggambarkan bahwa dari 100 penduduk yang berusia 7-12 tahun, terdapat 99 murid yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat sedangkan sisanya sebanyak 1 murid masih bersekolah SD/ sederajat dengan usia di luar rentang 7-12 tahun yang kemungkinan mengalami tinggal kelas, terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD. Sedangkan nilai APM pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 80,88 persen. Selanjutnya, untuk nilai APM untuk jenjang SMA/ sederajat sebesar 73,54. Dan terakhir pada jenjang perguruan tinggi, nilai APM sebesar 11,27.

Tabel 4.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	99,06	99,04	99,18	99,03	99,65
SMP/MTs	78,86	79,64	79,31	79,38	80,88
SMA/SMK/MA	70,82	71,19	71,39	71,56	73,54
Perguruan Tinggi	12,54	11,43	12,11	11,27	11,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Selain itu, perlu diketahui bahwa nilai APS, APK dan APM yang dihitung oleh BPS, menggunakan konsep kependudukan, bukan berdasarkan individu siswa yang terdapat pada masing-masing sekolah. Sebagai contoh, penduduk Kabupaten Bulungan tapi bersekolah di Kabupaten Berau, maka tidak dimasukkan dalam indikator pendidikan di Kabupaten Berau.





4.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berkualitas, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pelayanan publik di bidang kesehatan tidak hanya mencerminkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak dan tersedia bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Pentingnya fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal, baik dari segi infrastruktur, dan tenaga medis, adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Oleh karena itu, perhatian terhadap sektor ini bukanlah sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan juga bentuk kepedulian bersama demi masa depan yang lebih baik.

Fasilitas kesehatan yang layak akan mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan fasilitas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Berau telah menunjukkan komitmennya melalui pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, untuk memastikan akses layanan yang merata.

Tabel 4.2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Berau (Unit), 2019-2023

Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Pratama	1	1	1	1	1
Puskesmas Induk	21	21	21	21	21
Puskesmas Pembantu	112	112	112	112	112
Poskesdes	70	67	67	67	67
Apotek	62	62	71	72	72
Unit Transfusi Darah	1	1	1	1	1
Laboratorium Kesehatan	1	1	1	1	1
Puskesmas Keliling	33	32	32	14	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau



Berdasarkan Tabel 4.2.1, menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau pada tahun 2023 seperti rumah sakit ada tersedia sebanyak 1 unit, rumah sakit pratama sebanyak 1 unit, puskesmas induk sebanyak 21 unit, puskesmas pembantu sebanyak 112 unit, posyandu kesehatan desa (poskesdes) sebanyak 67 unit, terdapat juga unit transfuse darah sebanyak 1 unit, laboratorium kesehatan sebanyak 1 unit, dan puskesmas keliling sebanyak 14 unit. Pada fasilitas poskesdes terjadi penurunan sebanyak 3 unit dari tahun 2019 menjadi hanya 67 unit yang aktif beroperasi hingga tahun 2023. Kemudian, untuk apotek yang mengalami kenaikan dari 62 unit di tahun 2029 menjadi 72 apotek di tahun 2023. Penurunan juga terjadi pada fasilitas puskesmas keliling, pada tahun 2019 ada sebanyak 33 unit menjadi hanya 14 unit yang aktif beroperasi. Penurunan jumlah fasilitas poskesdes dan puskesmas keliling di Kabupaten Berau menunjukkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan seperti memperhatikan tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, menyediakan anggaran untuk operasional dan biaya perawatan kendaraan, dan memperbaiki kondisi fisik bangunan yang tidak layak untuk melanjutkan pelayanan.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Berau harus sejalan dengan jumlah tenaga kesehatan yang memadai untuk memastikan layanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poskesdes, dan puskesmas keliling memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga pendukung lainnya, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Keseimbangan antara jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan sangat penting, karena ketersediaan fasilitas tanpa dukungan tenaga medis yang cukup akan mengurangi efektivitas pelayanan. Sebaliknya, tenaga kesehatan yang berlimpah tanpa fasilitas yang memadai dapat menghambat produktivitas mereka dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, data mengenai jumlah fasilitas kesehatan perlu dilengkapi dengan informasi jumlah tenaga kesehatan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kesiapan pendukung sistem kesehatan di Kabupaten Berau dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Berau (Orang), 2019-2023

Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter Umum	74	86	108	93	118
Dokter Spesialis	19	23	25	28	52
Dokter Gigi	16	18	22	22	28
Dokter Gigi Spesialis	3	4	1	5	23
Perawat	621	661	666	687	786
Bidan	310	339	339	371	406

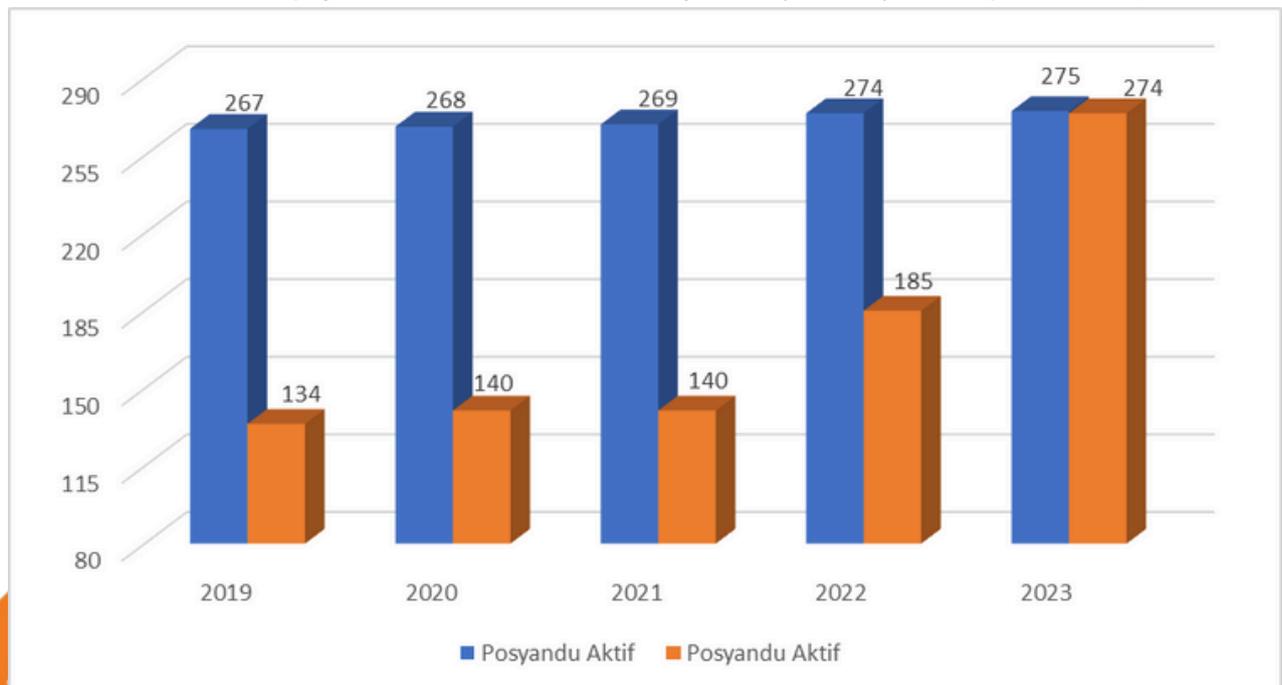
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau



Berdasarkan data pada Tabel 4.2.2, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Berau mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023 di hampir semua tenaga kesehatan. Jumlah dokter umum meningkat dari 74 orang pada 2019 menjadi 118 orang pada 2023, sementara dokter spesialis mengalami lonjakan, pada tahun 2019 sebanyak 19 orang menjadi 52 orang. Kenaikan serupa juga terjadi pada dokter gigi dari 16 orang di tahun 2019 bertambah menjadi 28 orang. Selain itu, dokter gigi spesialis juga mengalami lonjakan dari 3 orang saja di tahun 2019 menjadi 23 orang. Kemudian, untuk perawat dan bidan juga mengalami kenaikan, dengan masing-masing jumlahnya di tahun 2019 sebesar 621 orang dan 310 orang naik menjadi 786 orang dan 406 orang di tahun 2023. Bahkan, pada tahun 2023, perawat sebagai tenaga Kesehatan terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan lainnya. Peningkatan pada tenaga kesehatan di Kabupaten Berau merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan melalui penambahan tenaga medis. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Berau dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Berau tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dengan dukungan tenaga medis yang lebih banyak dan terampil, pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat, seperti posyandu, dapat lebih optimal. Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan UKBM, yaitu memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Dengan demikian, keterkaitan antara jumlah tenaga kesehatan dan keberhasilan UKBM menjadi bukti pentingnya sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Gambar 4.2.1 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBSM) di Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau



Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, edukasi kesehatan, serta pelayanan ibu hamil dan menyusui. Selain itu, Posyandu juga berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam mendorong perilaku hidup sehat. Di Kabupaten Berau, selama lima tahun terakhir, perkembangan jumlah posyandu dan posyandu aktif semakin bertambah. Pada tahun 2023 terdapat 275 unit Posyandu, dengan sebanyak 274 unit di antaranya aktif beroperasi. Aktivitas posyandu yang aktif mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, terutama di wilayah pedesaan. Namun, memastikan semua posyandu berfungsi optimal tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, baik dari segi penguatan tenaga pendukung maupun penyediaan sarana dan prasarana.

Secara keseluruhan, sektor kesehatan di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan positif, baik dari segi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang didukung oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang terus diperbaiki memberikan dampak signifikan terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau. Di sisi lain, keberlanjutan UKBM seperti Posyandu juga menjadi bukti kuatnya peran masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan secara mandiri. Namun, tantangan seperti pemerataan akses di daerah terpencil dan optimalisasi operasional fasilitas kesehatan yang ada masih perlu mendapat perhatian khusus. Dengan komitmen pemerintah, dukungan tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan mampu terus meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau.



4.3 Infrastruktur

Suatu daerah ketika ingin mengembangkan dan menata wilayahnya, maka tahap awal yang dilakukan adalah pengembangan infrastruktur jalan. Hal ini bertujuan untuk membuka kerisolasian daerah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peran pentingnya terlihat karena perannya dalam mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik, pendidikan serta kesehatan masyarakat. Di titik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting karena berkorelasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan suatu daerah. Infrastruktur jalan dibagi menjadi dua jenis yakni jalan berdasarkan fungsinya dan statusnya. Berdasarkan fungsinya, jalan raya dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Masing-masing jenis jalan tersebut masih dibagi menjadi jalan primer serta jalan sekunder. Perbedaannya terletak pada kecepatan dan ukuran lebar badan jalannya. Sedangkan jika melihat statusnya, jalan raya dibagi menjadi lima jenis, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota serta jalan desa.

Jalan nasional merupakan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi, ibu kota negara dengan ibu kota provinsi, atau jalur strategis yang mendukung kepentingan nasional. Pengelolaan jalan nasional berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, dengan fokus pada konektivitas skala besar, seperti transportasi logistik, jalur pariwisata utama, atau akses menuju pelabuhan dan bandara internasional. Sementara itu, jalan provinsi menghubungkan wilayah antar-kabupaten atau antar-kota dalam satu provinsi. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dengan peran mendukung konektivitas di tingkat regional. Adapun jalan kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antar-desa atau kawasan dalam satu kabupaten, berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat lokal, seperti distribusi hasil pertanian, akses ke fasilitas pendidikan, hingga menjadi akses mendapatkan fasilitas kesehatan. Jalan kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten, dengan prioritas pada kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel 4.3.1 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas (Km), 2019-2023

Berdasarkan Kelas	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jalan Nasional	259,31	259,31	259,31	259,31	262,13
Jalan Provinsi	241,86	241,86	241,86	241,86	250,11
Jalan Kabupaten	1678,32	1678,32	1678,32	1678,32	1678,32

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau



Berdasarkan Tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Berau, untuk jalan nasional pada tahun 2023 mengalami penambahan 2,82 km dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 262,13 km. Selanjutnya, untuk jalan provinsi, dari tahun 2019 sampai 2022 tidak mengalami perubahan, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 150,11 km. Dengan adanya penambahan jarak jalan nasional dan jalan provinsi ini, memberikan dampak positif juga bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau menjadi lebih terhubung ke jalan utama, dengan ini diharapkan juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kemudian, untuk jalan kabupaten dari tahun 2019 hingga 2023 juga tidak mengalami perubahan dengan panjang jalan berdasarkan kewenangan sebesar 1.678,32 km.

Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten memiliki peran yang berbeda dalam mendukung konektivitas dan perekonomian, kondisi fisik jalan di setiap tingkatan menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas mobilitas yang dilakukan di daerah. Jalan dengan kondisi baik dapat memastikan kelancaran mobilitas dan efisiensi transportasi, sementara jalan dalam kondisi sedang masih dapat digunakan akan tetapi membutuhkan perawatan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sebaliknya, jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, seperti berlubang, retak, atau bergelombang, dapat menghambat aktivitas ekonomi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memperpanjang waktu tempuh. Oleh karena itu, pemantauan dan perbaikan kondisi jalan secara berkala di semua kelas jalan menjadi prioritas penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

Tabel 4.3.2 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi (Km), 2019-2023

Berdasarkan Kelas	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jalan Baik	846,79	487,13	496,13	501,63	501,63
Jalan Sedang	191,39	610,61	615,11	621,61	623,61
Jalan Rusak Ringan	543,23	462,11	484,9	378,11	367,11
Jalan Kabupaten	96,91	118,48	82,19	176,97	176,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau





Selama lima tahun terakhir, Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau terus menerus dilakukan. Terlihat pada tabel 4.3.2, kondisi jalan baik dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan secara bertahap dari 487,13 km pada tahun 2020 menjadi 501,63 km pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Berau. Selain itu, jalan dengan kondisi sedang juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 191,39 km pada tahun 2019 meningkat menjadi 623,61 km pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan perbaikan jalan rusak telah dilakukan bertahap dan menjadikan jalan yang lebih layak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau.

Pada kondisi jalan rusak ringan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Panjang jalan rusak ringan menurun dari 543,23 km pada tahun 2019 menjadi 367,11 km pada tahun 2023. Penurunan pada kondisi jalan rusak ringan merupakan hasil proyek perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Sedangkan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 96,91 km di tahun 2019 menjadi 176,97 km pada tahun 2023. Meski demikian, perhatian lebih sangat diperlukan dari pemerintah daerah setempat untuk mengurangi panjang jalan rusak berat yang masih cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Karena dengan berkurangnya panjang jalan rusak, aksesibilitas antarwilayah menjadi lebih lancar, sehingga waktu tempuh dan biaya transportasi dapat berkurang. Hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mobilitas pendidikan dan kesehatan serta memperkuat konektivitas antara pusat produksi dan pasar.

Selain itu, penurunan jalan rusak juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan dapat diminimalisasi, memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Dampak positif lainnya terlihat pada sektor sosial, seperti kemudahan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Perbaikan infrastruktur jalan ini juga mendorong perkembangan desa-desa dengan status tertinggal di Kabupaten Berau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan peluang baru untuk investasi dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Berau.

Adapun kondisi jalan yang terbagi menjadi kategori baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat sangat dipengaruhi oleh jenis material atau permukaan jalan yang digunakan. Di Kabupaten Berau, panjang jalan berdasarkan material atau jenis permukaan, seperti jalan beraspal, beton, kerikil, atau tanah, memiliki peran penting dalam menentukan daya tahan dan kualitas jalan. Oleh karena itu, analisis kondisi jalan perlu dilengkapi dengan informasi tentang jenis permukaan jalan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif terkait kebutuhan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Berau.



Jalan beraspal dan beton cenderung memiliki kondisi yang lebih baik dan memerlukan perawatan lebih sedikit dibandingkan jalan dengan permukaan kerikil atau tanah, yang lebih rentan terhadap kerusakan akibat cuaca dan beban kendaraan yang melintas. Pada Tabel 4.3.3, terjadi peningkatan panjang pada jalan beton dari 85,94 km pada tahun 2019 menjadi 140,48 km pada tahun 2023. Kemudian untuk jalan beraspal juga mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, panjang jalan beraspal sebesar 426,16 km meningkat tiap tahun, hingga di tahun 2023 menjadi 515,53 km. Adanya peningkatan panjang jalan dengan jenis permukaan beton dan aspal dapat menunjukkan upaya peningkatan kualitas jalan yang berdampak langsung pada pengurangan jalan rusak dan peningkatan jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Berau.

Tabel 4.3.3 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Material/ Janis Permukaan (Km), 2019-2023

Berdasarkan Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beton	85,94	92,41	95,99	113,03	140,48
Aspal	426,16	442,75	452,62	480,83	515,53
Kerikil	137,02	176,80	201,89	256,77	323,42
Tanah	1029,21	966,36	927,82	827,79	698,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau

Namun, masih ada jalan dengan permukaan kerikil dan tanah yang masih mendominasi, meskipun panjangnya cenderung berkurang. Panjang jalan permukaan kerikil, dari 137,02 km pada tahun 2019 berkurang menjadi 176,80 km di tahun 2020 kemudian di tahun berikutnya bertambah kembali hingga menjadi 323,42 km di tahun 2023. Terjadinya penambahan pada jalan permukaan kerikil menggambarkan adanya tahapan perbaikan infrastruktur pada jalan-jalan di Kabupaten Berau sekaligus mengurangi jalan dengan permukaan tanah. Terlihat pada tabel 4.3.3 bahwa jalan permukaan tanah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 1.029,21 km pada tahun 2019 menjadi 698,89 km pada 2023. Pengurangan panjang jalan permukaan tanah menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, mengingat jalan tanah cenderung lebih rentan terhadap kerusakan berat. Dengan terus meningkatkan penggunaan material jalan berkualitas tinggi seperti beton dan aspal, pemerintah daerah dapat memperbaiki dan mempertahankan kondisi jalan agar lebih tahan lama sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat di Kabupaten Berau.



4.4 Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sektor penting dalam Pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Perumahan yang tertata dengan baik tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di Kabupaten Berau, sektor ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga, terutama melalui pengembangan perumahan berbasis kebutuhan masyarakat, pemajaaan kawasan kumuh, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau memegang peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada poin 11 yang menargetkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan, melindungi lingkungan, dan menciptakan ruang hidup yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Berau. Untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya adalah dengan mengurangi kawasan rumah tidak layak huni. Hal ini sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Rumah yang tidak layak huni seringkali tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, seperti minimnya ventilasi, struktur bangunan yang rapuh, serta kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit infeksi, serta meningkatkan risiko bencana, seperti kebakaran atau robohnya bangunan, yang membahayakan penghuni. Sehingga program untuk mengurangi kawasan tersebut tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih layak dan manusiawi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memperbaiki permukiman ini, pemerintah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, meminimalkan kemiskinan, serta menciptakan kawasan yang lebih aman, inklusif, dan produktif bagi penghuninya.

Tabel 4.4.1 Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Layak Huni	48.788	49.149	49.267	50.678	51.752
Rumah Tidak Layak Huni	5.456	5.396	5.278	5.130	4.569

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau



Berdasarkan Tabel 4.4.1 terlihat perkembangan jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Berau dari tahun 2019 hingga 2023. Terdapat peningkatan signifikan pada jumlah rumah layak huni selama lima tahun terakhir, yaitu dari 48.788 unit pada tahun 2019 menjadi 51.752 unit pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah rumah tidak layak huni menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 5.456 unit pada tahun 2019 menjadi 4.569 unit pada tahun 2023. Penurunan pada rumah tidak layak huni mencerminkan upaya pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, dalam meningkatkan kualitas permukiman melalui program perbaikan dan pembangunan rumah layak huni.

Kondisi semakin berkurangnya rumah tidak layak huni di Kabupaten Berau sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pada poin 11. Penurunan jumlah rumah tidak layak huni menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam memperbaiki kualitas permukiman, sehingga dapat meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Hal tersebut juga mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Berau. Dengan terus mengurangi kawasan rumah tidak layak huni, diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati lingkungan tempat tinggal yang lebih baik di masa depan.

Kondisi rumah layak huni dan tidak layak huni di Kabupaten Berau memiliki keterkaitan erat dengan situasi pemukiman kumuh, karena rumah tidak layak huni sering kali berada di kawasan dengan infrastruktur dan lingkungan yang kurang memadai. Penurunan jumlah rumah tidak layak huni dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya perbaikan kualitas perumahan. Keberadaan permukiman kumuh mencerminkan tantangan dalam penyediaan hunian yang layak, khususnya terkait akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih. Oleh karena itu, program penataan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan peningkatan rumah layak huni menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan sehat bagi masyarakat, yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs).



Tabel 4.4.2 Kondisi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Areal Pemukiman Kumuh (Ha)	125,40	28,26	1,06	-	0
Jumlah Keluarga Tinggal di Pemukiman Kumuh (KK)	-	1.872,00	-	-	1.872,00
Jumlah Penduduk Tinggal di Pemukiman Kumuh (Jiwa)	-	6.566,00	-	-	6.566,00
Luas Areal Pemukiman Kumuh Tertata (Ha)	58,90	156,00	183,24	-	28,26

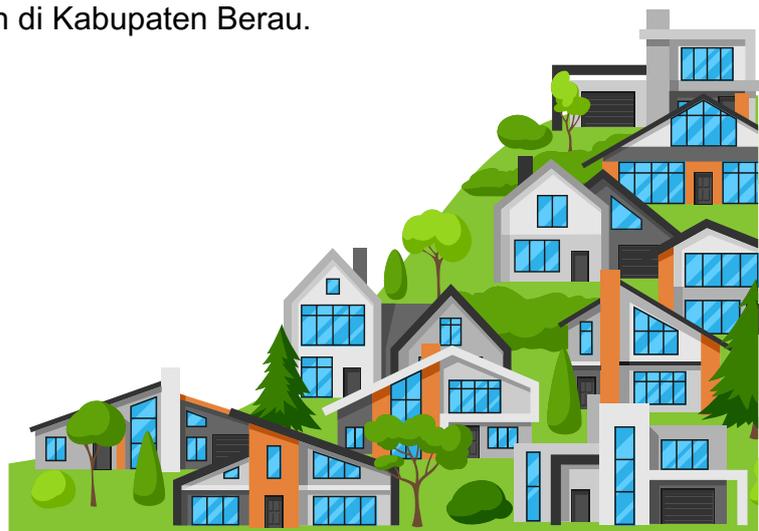
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

Pemukiman kumuh di Kabupaten Berau pada periode 2019-2023 tergambar dari Tabel 4.4.2, meskipun terdapat keterbatasan data di beberapa tahun. Luas areal permukiman kumuh menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2021 hingga hanya 1,06 hektar, dan kemudian pada tahun 2023 sudah tidak ada luas areal permukiman kumuh. Karena status kumuh dipengaruhi oleh 7 indikator, yaitu:

1. Bangunan (Rumah);
2. Jalan lingkungan;
3. Drainase;
4. Persampahan;
5. Sanitasi;
6. Air minum; dan
7. Proteksi Kebakaran (Pemadam Kebakaran).

Setelah dilakukan perhitungan secara numerik yang ada, status kawasan kumuh sudah dapat dianggap tidak kumuh.

Sementara itu, jumlah keluarga dan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh hanya tercatat pada tahun 2020 dan 2023 serta tidak mengalami perubahan, dengan masing-masing 1.872 keluarga dan 6.566 jiwa. Kemudian untuk luas areal permukiman kumuh tertata, yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 183,24 hektar, mengalami penurunan menjadi angka 28,26 hektar di tahun 2023. Meskipun data yang tersedia tidak lengkap, tren ini mengindikasikan adanya upaya penataan dan pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Berau.





4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah tiga pilar penting bagi kehidupan bermasyarakat. Ketentraman mencakup kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut atau ancaman. Ketertiban umum mengacu pada penegakan aturan dan norma sosial yang menjamin keteraturan dalam bermasyarakat. Sementara itu, perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi warga dari berbagai risiko, seperti bencana, kriminalitas, dan gangguan lainnya. Ketiga aspek ini berfungsi menjaga stabilitas sosial, memberikan rasa aman, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.5.1 Jumlah Kejadian Kebakaran Pemukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	0	0	0
Talisayan	3	1	3
Tabalar	2	1	1
Biduk-Biduk	1	1	1
Pulau Derawan	0	0	2
Maratua	0	0	1
Sambaliung	3	9	5
Tanjung Redeb	7	15	11
Gunung Tabur	5	2	2
Segah	3	1	1
Teluk Bayur	6	3	5
Batu Putih	0	0	0
Biatan	0	1	3
Kabupaten Berau	30	34	35

Catatan : ... : Data tidak tersedia

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau



Ketiga aspek ini merupakan elemen yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat. Salah satu ancaman nyata yang dapat mengganggu ketiga elemen ini adalah bencana, termasuk kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa yang terjadi akibat api yang tidak terkendali, yang dapat merusak properti, lingkungan, bahkan mengancam nyawa. Penyebab kebakaran dapat bervariasi, seperti korsleting listrik, kelalaian manusia, atau faktor alam. Pada tahun 2021, kejadian kebakaran pemukiman terjadi sebanyak 30 kali kebakaran. Kemudian pada tahun 2022, terjadi sebanyak 34 kejadian kebakaran pemukiman. Sedangkan pada tahun 2023, kejadian kebakaran pemukiman terjadi sebanyak 35 kali kebakaran dengan sebaran kejadian per wilayah kejadian kebakaran dapat di lihat pada Tabel 4.5.1. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir, kejadian kebakaran pemukiman terbanyak terjadi di Kecamatan Tanjung Redeb.

Dengan informasi banyaknya kejadian kebakaran, menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran, kehati-hatian dari masyarakat, edukasi, dan infrastruktur pencegahan untuk meminimalkan risiko kebakaran. Kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat mengenai potensi bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya sangat diperlukan agar setiap individu dapat lebih waspada dan bertindak secara tepat jika terjadi ancaman kebakaran. Selain itu, edukasi yang intensif terkait cara-cara mencegah dan menangani kebakaran harus terus digalakkan. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pemerintah juga memiliki peran vital dalam menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai.

Tabel 4.5.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana Kebakaran di Kabupaten Berau, 2019-2023

Prasarana dan sarana	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mobil Pemadam Kebakaran	9	9
Mobil Pemadam Kebakaran Karhutla	17	17
Mobil Slip On	12	12
Mobil Peralatan	12	12
Mobil komando	9	9
Mobil Pemadam Kebakaran Tangga	1	1
Mobil Pemadam Kebakaran Roda 3				3	3
Mobil Pemadam Kebakaran Rescue				1	1

Catatan : ... : Data tidak tersedia

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau



Selain menyediakan fasilitas dalam menghadapi potensi bencana, efektivitas penanganan kebakaran juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang kompeten, seperti keberadaan personel BPBD, Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Berau. Personel BPBD yang terjuna langsung saat terjadi kejadian bencana hendaknya terus ditingkatkan kemampuannya dengan pemberian pelatihan, kursun maupun out station di luar Kabupaten Berau, agar lebih memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penanganan bencana. Sedangkan personel Satpol PP dan Linmas juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya tanggap darurat, termasuk dalam situasi kebakaran, selain bertugas menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kinerja mereka juga memastikan regulasi terkait keselamatan dan mitigasi bencana dijalankan dengan baik. Sinergi antara sarana prasarana, personil yang terlatih, dan penegakan aturan menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

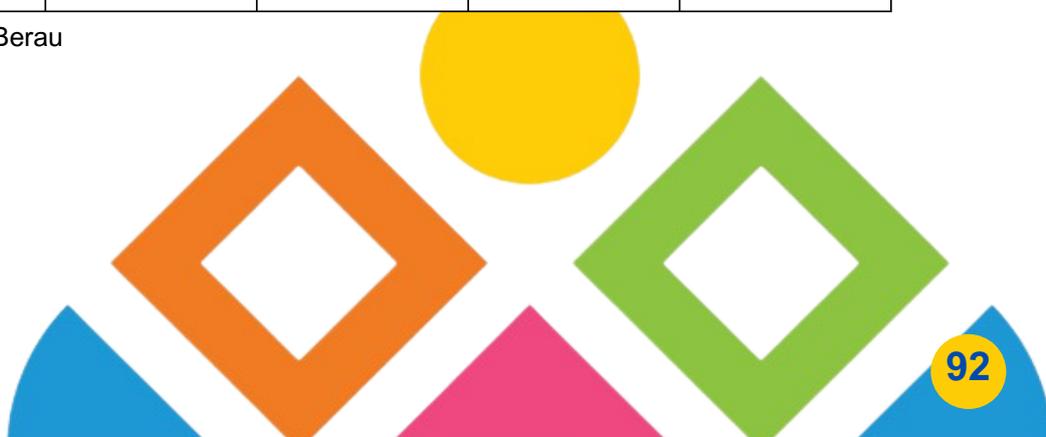
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar.

Pos sektor damkar di Kabupaten Berau tersebar di 12 kecamatan (Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Tabalar, kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-biduk) dan telah di lengkapi oleh sarana prasarana damkar yaitu Mobil Pemadam Kebakaran Karhutla, Mobil slip on dan mobil peralatan. Khusus untuk kecamatan Tanjung Redeb dilengkapi pula dengan mobil pemadam kebakaran, mobil dorkas 3 dan mobil komando.

Tabel 4.5.3 Jumlah Satpol PP dan Limnas di Kabupaten Berau, 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satpol PP	129	148	172	172	197
Linmas	350	350	350	350	350

Sumber: Satpol PP Kabupaten Berau





Satuan Polisi Pamong Praja atau dikenal dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas pokok dan fungsi Satpol PP mencakup penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pengawasan terhadap kebijakan daerah yang berkaitan dengan ketentraman. Satpol PP berperan sebagai pelaksana kebijakan kepala daerah, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik. Berdasarkan Tabel 4.5.3, untuk jumlah anggota satpol PP selama lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan jumlah personal, dari tahun 2019 sebanyak 129 orang menjadi 197 orang di tahun 2023. Dengan adanya penambahan pegawai Satpol PP, diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan lebih tanggap, cepat dan mengayomi.

Selain itu, Perlindungan Masyarakat atau disingkat dengan Linmas adalah bagian penting dari perlindungan warga yang bertugas membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, pemeliharaan ketertiban umum, dan upaya pertahanan negara. Linmas bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan, dengan fungsi utamanya meliputi bantuan darurat dan koordinasi dengan instansi terkait. Kolaborasi antara Satpol PP dan Linmas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap terhadap berbagai situasi darurat. Jika dilihat dari Tabel 4.5.3, untuk banyaknya Linmas di Kabupaten Berau tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, dengan jumlah Linmas sebanyak 350 orang.

Tabel 4.5.4 Jumlah Penegakan Perda di Kabupaten Berau, 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelanggaran (kasus)	17	24	27	35	106
Penyelesaian (kasus)	17	24	27	35	106
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Berau



Peran Satpol PP dan Linmas sebagai ujung tombak dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Di Kabupaten Berau, jumlah penegakan Perda mencerminkan seberapa baik fungsi ini dijalankan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas penanganannya. Dengan sinergi antara tugas Satpol PP dan Linmas, penegakan Perda tidak hanya menjadi bentuk formal dari regulasi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlihat pada Tabel 4.5.4, bahwa seluruh kasus pelanggaran telah dilakukan penyelesaian. Meskipun setiap tahunnya semakin bertambah pelanggaran kasus, namun seluruhnya dapat diselesaikan di tahun terjadinya kasus. Di mana pada tahun 2023, terjadi sebanyak 106 kasus pelanggaran dan tindak lanjut penyelesaian kasus juga sebanyak 106. Sehingga persentase penegakan Perda di tahun 2023 sebesar 100 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Berau semakin baik.





4.6 Sosial

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang berbasis data. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan mendukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini disalurkan berdasarkan data yang terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencatat masyarakat rentan sosial-ekonomi di setiap kecamatan. Di Kabupaten Berau, bantuan ini disalurkan secara merata kepada keluarga-keluarga di berbagai kecamatan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bantuan PKH diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu dan memenuhi syarat, seperti memiliki anggota keluarga berupa ibu hamil, anak usia dini (0 sampai dengan 6 tahun), anak sekolah, lansia di atas 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat. Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga membuka peluang mereka untuk memperbaiki taraf hidup.

Tabel 4.6.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima Bantuan PKH Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	187	154	167	149	120
Talisayan	235	109	215	202	178
Tabalar	248	203	221	267	238
Biduk-Biduk	370	330	337	369	325
Pulau Derawan	247	200	263	254	232
Maratua	206	197	205	210	190
Sambaliung	359	323	403	498	408
Tanjung Redeb	189	162	190	258	212
Gunung Tabur	414	375	434	504	375
Segah	263	219	234	244	168
Teluk Bayur	243	177	189	360	277
Batu Putih	209	178	196	205	180
Biatan	139	103	123	131	110
Kabupaten Berau	3.309	2.730	3.177	3.651	3.031

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau



Di Kabupaten Berau, jumlah KPM yang memperoleh PKH dan individu yang tercatat dalam DTKS mengalami dinamika selama lima tahun terakhir. Sehingga membahas pelayanan yang diberikan pemerintah di bidang sosial menjadi hal yang perlu untuk di analisis karena akan memberikan gambaran penting tentang keberhasilan program penurunan kemiskinan di tingkat kabupaten. Pemberian PKH yang telah dijalankan di 13 kecamatan, secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.6.1, dimana menunjukkan bahwa jumlah KPM yang menerima bantuan PKH selama periode 2019 hingga 2023 sangat berfluktuatif meskipun terlihat bahwa trennya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan KPM di beberapa kecamatan. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebanyak 3.013 KPM yang menerima bantuan PKH. Hal tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk semakin menargetkan bantuan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui pengelolaan yang terarah dan sinergi dari berbagai pihak, program PKH tetap bisa menjadi instrumen penting untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin sekaligus mendorong pemberdayaan mereka menuju kemandirian. Data PKH di Kabupaten Berau juga tidak terlepas dari peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam penentuan keluarga penerima manfaat. Dengan sinkronisasi data yang baik, kedua informasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya pemerintah dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan intervensi penurunan kemiskinan. Di Kabupaten Berau, DTKS mencakup data masyarakat di setiap kecamatan yang masuk dalam kategori rentan sosial-ekonomi. Masyarakat yang berhak terdaftar dalam DTKS adalah mereka yang tergolong miskin atau hampir miskin berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki akses pekerjaan tetap, serta kondisi sosial lain yang memengaruhi kesejahteraan mereka.





Berdasarkan Tabel 4.6.2, menunjukkan adanya penurunan jumlah jiwa yang terdaftar dalam DTKS di tahun 2023, yaitu menjadi sebanyak 47.991 jiwa yang mengalami penurunan sebesar 11.925 jiwa dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan langkah pemerintah dalam meningkatkan validasi dan akurasi data sehingga bantuan dapat semakin tepat sasaran. Kemudian, sebagai langkah strategis untuk mendukung penurunan kemiskinan, pemutakhiran data DTKS secara berkala menjadi sangat penting. Validasi data di tingkat kecamatan memastikan bahwa bantuan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, dinas sosial, dan masyarakat, DTKS memainkan peran strategis dalam membangun kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Berau. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pihak swasta dalam membantu kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)

Tabel 4.6.2 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau (Jiwa), 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	1.837	1.820	2.273	2.518	2.138
Talisayan	2.202	2.189	3.494	4.049	3.611
Tabalar	1.841	1.535	2.724	3.023	2.874
Biduk-Biduk	2.664	1.438	4.230	4.532	3.963
Pulau Derawan	2.014	1.562	3.665	4.192	3.832
Maratua	1.748	1.722	2.115	2.223	205
Sambaliung	3.551	3.522	7.718	8.608	7.612
Tanjung Redeb	2.030	1.654	6.531	7.808	7.524
Gunung Tabur	4.741	4.628	7.578	7.953	7.022
Segah	2.445	1.792	3.914	4.337	347
Teluk Bayur	2.338	2.166	4.802	5.263	4.964
Batu Putih	1.654	1.592	2.407	2.705	2.272
Biatan	1.143	1.131	1.926	2.705	1.627
Kabupaten Berau	30.208	26.751	53.377	59.916	47.991

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau



4.7 Ketenagakerjaan

Keadaan ketenagakerjaan menjadi elemen kunci dalam pembangunan suatu wilayah yang memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perubahan dinamika ekonomi dan teknologi, ketenagakerjaan terus mengalami perubahan. Otomatisasi pekerjaan menggunakan teknologi dapat mempengaruhi pekerjaan di berbagai sektor. Umumnya, keadaan ketenagakerjaan pada dapat diamati dari aspek ketersediaan (supply) dan aspek kebutuhan (demand). Kondisi idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, artinya bahwa jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Apabila kondisi ini belum terpenuhi maka akan terjadi pengangguran. Oleh karena itu, ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan utama di setiap wilayah.

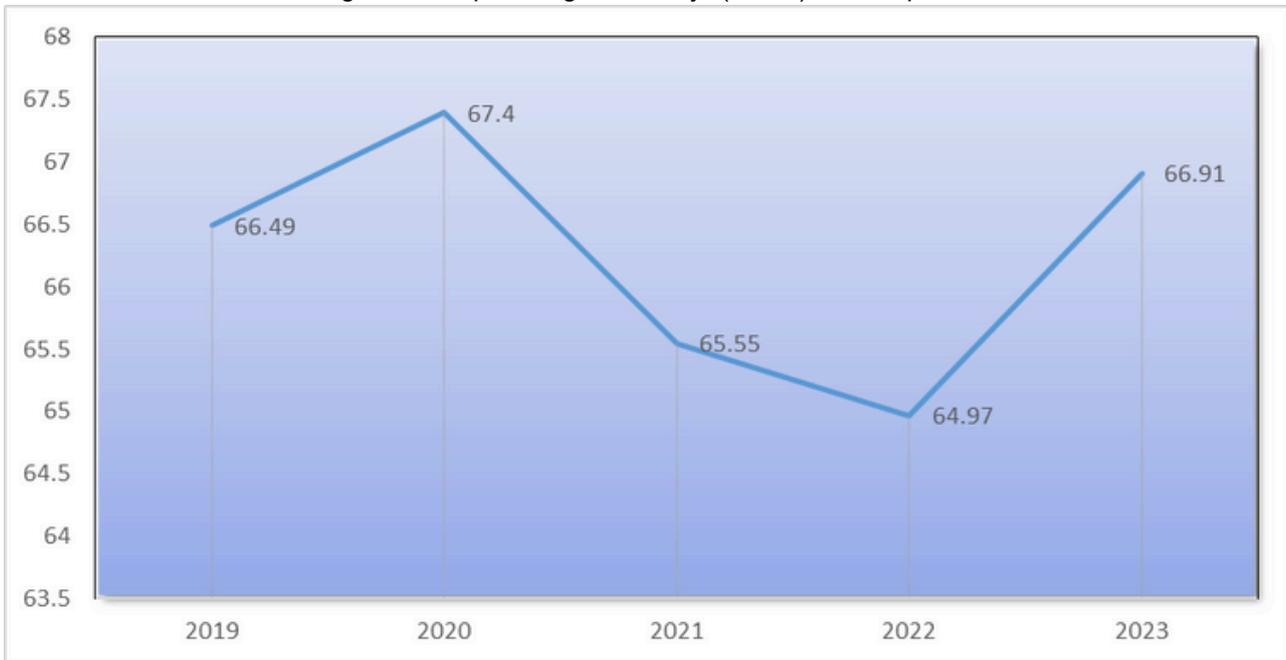
Indikator yang sering digunakan untuk memahami kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), karena dapat mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis tren dan pola ketenagakerjaan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK. Dengan kata lain, semakin tinggi TPAK akan menunjukkan bahwa semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui nilai TPAK di suatu wilayah, maka dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika angkatan kerja, sehingga membantu dalam merancang strategi Pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.





Berdasarkan Gambar 4.7.1 terlihat bahwa TPAK di Kabupaten Berau pada tahun 2023 adalah sebesar 66,91 persen. Artinya, bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, ada sekitar 66 hingga 67 orang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang memiliki kegiatan seminggu yang lalu untuk bekerja ataupun menganggur. Jadi untuk penduduk usia kerja yang memiliki kegiatan utama bersekolah, mengurus rumah tangga, berolah raga, kursus, piknik, melakukan kegiatan sosial, lanjut usia, dan cacat jasmani tidak termasuk ke dalam kategori angkatan kerja. Angka di tahun 2023, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 64,97 persen. Dimana persentase di tahun 2022 merupakan TPAK terkecil dalam lima tahun terakhir. Namun, dengan terjadinya peningkatan kembali di tahun 2023, menunjukkan semakin besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Gambar 4.7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

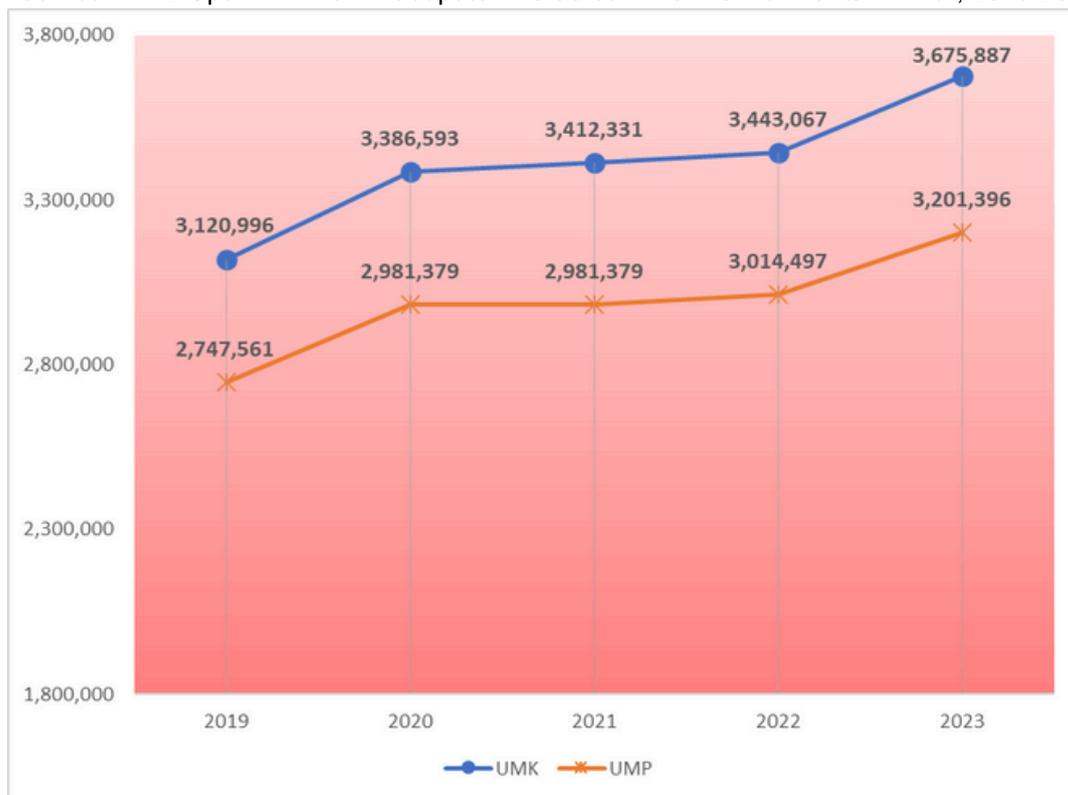




Persentase TPAK yang meningkat di Kabupaten Berau pada tahun 2023, mencerminkan adanya peran angkatan kerja dalam mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau. Keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi indikator dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi kerja yang layak dengan membuat kebijakan yang tepat. Kebijakan ini tidak hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja usia produktif dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan TPAK menjadi sinyal positif yang menunjukkan perlunya perencanaan berkelanjutan berbasis data ketenagakerjaan, sehingga produktivitas dan kesejahteraan penduduk dapat terus ditingkatkan.

Di Indonesia, ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur seperti hak dan kewajiban tenaga kerja, upah, jam kerja, kondisi kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Dalam undang-undang tersebut, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan undang-undang ini, pemerintah berupaya melindungi hak-hak pekerja sekaligus memastikan kesejahteraan tenaga kerja agar tercapai kondisi kerja yang layak dan berkelanjutan. Kemudian, perlu untuk disadari bahwa keberadaan tenaga kerja usia produktif sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan produktivitas suatu kegiatan. Terkait peningkatan produktivitas dan kemandirian penduduk, pemerintah perlu melakukan perencanaan khusus mengenai hal tersebut. Dasar dari perencanaan kebijakan terkait yaitu diperlukan data dan informasi mengenai keadaan kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Gambar 4.7.2 Upah Minimum Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Berau



Sebagai wujud upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dengan memperhatikan upah atau gaji minimum yang didapatkan pekerja. Selama lima tahun terakhir, upah minimum Kabupaten Berau telah mengalami peningkatan secara bertahap, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah minimum di Kabupaten Berau ini bahkan terus berada di atas rata-rata upah minimum provinsi. Hal ini menunjukkan adanya daya saing dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Berau dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur. Untuk upah minimum Kabupaten Berau pada tahun 2019 sebesar Rp3.120.996, meningkat menjadi Rp3.386.593 di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp3.412.331 dan terus mengalami kenaikan menjadi Rp3.443.067 di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp3.675.887.

Peningkatan upah minimum ini membawa dampak positif, antara lain meningkatkan daya beli masyarakat dan memotivasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas serta dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga pekerja. Peningkatan upah minimum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang menetapkan bahwa variabel-variabel utama dalam menetapkan upah minimum meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak. Faktor-faktor ini digunakan untuk memastikan bahwa upah minimum tetap relevan dengan kondisi ekonomi daerah dan mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Berau.

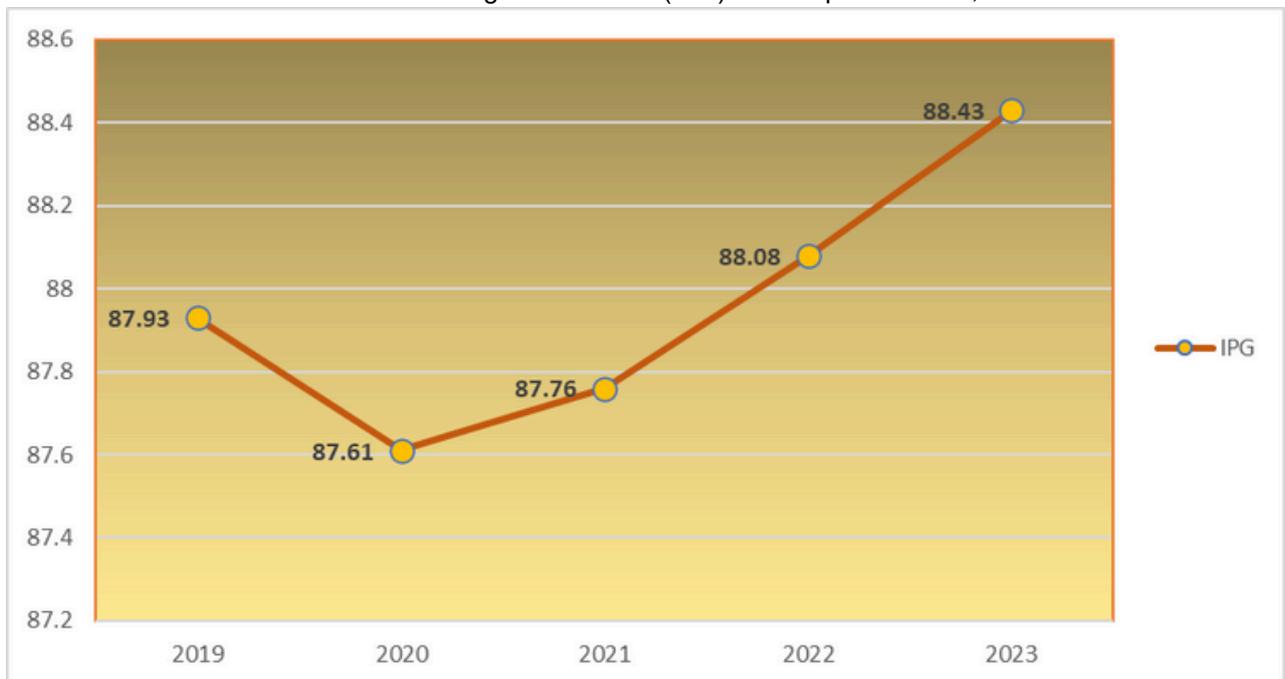




4.8 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi landasan hukum penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah menciptakan kesetaraan gender, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Apabila suatu daerah memperhatikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka akan terjadi peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi perempuan, serta terwujudnya generasi anak yang lebih sehat dan berpendidikan. Sebaliknya, jika daerah tidak memperhatikan pentingnya pemberdayaan Perempuan dan anak, maka yang akan muncul adalah potensi resistensi budaya di masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya menerima perubahan peran gender. Sehingga menjadi topik yang penting untuk membahas pelayanan umum pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Gambar 4.8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau





Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Berau. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Sebagai sebuah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara pembangunan perempuan dengan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun, apabila semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, IPG Kabupaten Berau menunjukkan tren yang meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan IPG tertinggi berada di level 88,43 di tahun 2023, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang berada pada 88,08. Kenaikan nilai IPG yang terjadi menunjukkan kemajuan dalam aspek kesetaraan gender di Kabupaten Berau. Sangat diperlukan gerakan cepat dan konsisten dari seluruh elemen perangkat daerah untuk terus melakukan peningkatan komponen-komponen pembangunan perempuan serta memperluas kesempatan pada perempuan untuk menyalurkan kemampuannya di lingkungan masyarakat. Peningkatan IPG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, namun sayangnya di lingkungan masyarakat juga masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menandakan bahwa aspek perlindungan dan keamanan perempuan perlu diperkuat melalui upaya terpadu, seperti peningkatan layanan pengaduan, dukungan hukum, dan edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan anti-kekerasan.

Tabel 4.8.1 Jumlah Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengaduan	13	13	52	16	24
Ditindaklanjuti	13	13	52	16	24
Belum ditindaklanjuti	0	0	0	0	0

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Berau





Berdasarkan Tabel 4.8.1, jumlah pengaduan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Berau menunjukkan dinamika dari tahun 2019 hingga 2023. Pengaduan stabil pada 13 kasus di tahun 2019-2020, melonjak menjadi 52 kasus di 2021, kemudian menurun drastis ke 16 kasus pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 24 kasus di 2023. Seluruh pengaduan selama periode ini berhasil ditindaklanjuti, menunjukkan kinerja pelayanan umum yang responsive dalam memastikan setiap korban menerima bantuan. Lonjakan pada 2021 bisa dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, sementara terjadinya penurunan dapat menjadi indikasi program pencegahan yang lebih efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya langkah preventif, seperti edukasi masyarakat dan penguatan layanan berbasis korban terhadap perempuan di Kabupaten Berau.

Tabel 4.8.2 Jumlah Pengaduan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Berau, 2019

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengaduan	13	13	52	16	24
Ditindaklanjuti	13	13	52	16	24
Belum ditindaklanjuti	0	0	0	0	0

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Berau

Selain pemberdayaan perempuan, pemerintah Kabupaten Berau juga perlu fokus untuk memperhatikan pelayanan umum pada perlindungan anak. Di kehidupan sehari-hari, anak-anak juga tidak luput menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikisnya. Kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, tidak hanya dapat melukai fisik mereka tetapi juga berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang, kesehatan mental, dan masa depan mereka. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang serius melalui layanan pengaduan yang ramah anak, pendampingan psikologis, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Berdasarkan Tabel 4.8.2, pada tahun 2019 terdapat 55 pengaduan yang telah ditindaklanjuti, tahun 2020 tercatat ada 67 pengaduan yang juga ditindaklanjuti. Kemudian di tahun 2021, sebanyak 65 pengaduan telah ditindaklanjuti sementara di tahun 2021 tercatat 56 pengaduan juga ditindaklanjuti. Di tahun 2023, terdapat 63 pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Banyaknya kasus yang diajukan dan langsung ditindaklanjuti menunjukkan bahwa keseriusan, kepedulian dan respon cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Selama lima tahun terakhir, adanya data pengaduan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan ini terus terjadi, sehingga memerlukan langkah komprehensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, diperlukan langkah sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk melindungi anak-anak sebagai aset masa depan bangsa.



Kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekitar dimana anak menjadi korban atau bahkan kekerasan yang dilakukan para orang tua yang didengar dan dilihat anak akan berdampak pada tingkah laku anak dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku dan emosional anak akan sulit terkontrol sejak dini, bahkan dapat mendorong anak-anak untuk melakukan kekerasan kepada orang lain disekitarnya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak terjat ke dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi.

Anak yang berstatus tersangka atau berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Untuk anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Berdasarkan data pada Tabel 4.8.3, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Berau menunjukkan dinamika selama periode 2019-2023. Sebagai pelaku, jumlah anak menurun dari 12 anak pada 2019 menjadi hanya 2 anak pada 2023. Namun, sebagai korban, angkanya tetap tinggi, mencapai puncaknya pada 2021 dan 2023 dengan 61 anak. Sementara itu, selama lima tahun terakhir tidak ada data mengenai anak sebagai saksi yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 4.8.3 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anak Sebagai Pelaku	12	10	4	2	2
Anak Sebagai Korban	43	57	61	55	61
Anak Sebagai Saksi	0	0	0	0	0

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Berau



Dari data yang disampaikan, mengindikasikan bahwa sebagian anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dapat terdorong untuk berperilaku menyimpang akibat trauma atau lingkungan yang tidak mendukung pemulihan mereka. Tingginya angka anak sebagai korban juga menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan anak, termasuk pemberian pendampingan psikologis dan pendidikan rehabilitatif, agar anak-anak ini dapat pulih tanpa harus terjerumus dalam tindakan kriminal. Sinergi antara perlindungan hukum, pemberdayaan keluarga, dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi angka anak yang berhadapan dengan hukum dan mencegah dampak jangka panjang terhadap generasi muda di Kabupaten Berau.

Tabel 4.8.4 Jumlah Petugas KB di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Petugas Lapangan KB	9	1	1	1	1
Penyuluh KB	7	15	15	15	15

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Berau

Memberikan pelayanan mengenai Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan juga dilakukan melalui penyediaan petugas lapangan KB dan penyuluh KB di Kabupaten Berau. Program KB bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dengan mengatur jarak kelahiran anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2019, jumlah petugas lapangan KB mencapai 9 orang, namun turun drastis menjadi 1 orang pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Sementara itu, jumlah petugas penyuluhan KB menunjukkan angka yang lebih konsisten, dengan 7 orang di tahun 2019, meningkat menjadi 15 orang pada tahun 2021 hingga di tahun 2023 mengalami penambahan menjadi 16 orang. Dengan hadirnya petugas lapangan KB dan penyuluh KB di masyarakat diharapkan dapat mengajak, mengubah pandangan dan persepsi masyarakat mengenai KB, dan mendorong keluarga berpartisipasi dalam program KB serta mematuhi jadwal penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga semi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.





Salah satu usaha yang dilakukan agar program perencanaan keluarga dapat berjalan dengan baik adalah menggalakkan kepada individu atau pasangan yang menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan merencanakan jumlah serta jarak kelahiran anak dalam konteks Keluarga Berencana (KB), dimana pelakunya disebut sebagai akseptor. Akseptor dapat berupa akseptor KB baru, yang pertama kali memilih atau menggunakan metode KB, atau akseptor KB aktif, yang terus menggunakan kontrasepsi untuk periode tertentu. Mereka bisa memilih dari berbagai metode kontrasepsi, seperti pil KB, kondom, IUD (Intrauterine Device), suntik KB, dan jenis lainnya, sesuai dengan preferensi dan kondisi kesehatan calon pengguna.

Tabel 4.8.3 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Akseptor KB baru	3.896	3.762	3.762	1.675	2.394
Akseptor KB Aktif	34.746	35.134	31.974	19.109	28.538
Pasangan Usia Subur	45.396	47.323	44.674	35.387	44.363

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Berau

Berdasarkan Tabel 4.8.5, untuk jumlah akseptor KB, data menunjukkan tren yang berbeda pada tiga kategori, yaitu akseptor KB baru, akseptor KB aktif, dan pasangan usia subur (PUS). Jumlah akseptor KB baru mengalami penurunan signifikan dari 3.896 orang pada 2019 menjadi 1.675 orang di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 2.394 orang. Sementara itu, akseptor KB aktif menunjukkan penurunan yang lebih tajam, dari 34.746 orang pada 2019 menjadi 19.109 orang pada 2022, lalu mengalami peningkatan menjadi 28.538 orang di tahun 2023. Angka ini mencerminkan penurunan minat atau partisipasi aktif dalam program KB. Begitu juga dengan pasangan usia subur (PUS) yang mengalami penurunan dari 47.323 orang pada 2020 menjadi 35.387 orang pada 2022, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 44.363 orang. Kondisi fluktuasi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk berpartisipasi dalam program KB.





4.9 Perlindungan Hidup

Kabupaten Berau sebagai kabupaten yang populasi penduduknya terus bertambah, pembangunan infrastruktur yang sangat masif dilakukan, serta banyaknya lahan dibuka baik untuk perumahan, perkebunan serta areal pertambangan menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan konsumsi masyarakat dan sektor lapangan usaha yang semakin tumbuh seperti perdagangan, akomodasi makan minum, industri besar maupun rumah tangga serta pariwisata di Kabupaten Berau, volume sampah yang dihasilkan pun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir, pengelolaan sampah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Berau berupaya untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS dan TPA, serta memperbaiki sistem pengangkutan sampah guna mengatasi permasalahan lingkungan ini. Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Tabel 4.9.1 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Berau 2019-2023

Pengelolaan Sampah	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah TPS (Unit)	26	26	26
Daya Tampung TPS (M3)	443	443	443
Jumlah TPA (Unit)	3	3	3
Volume Sampah yang terangkut (m3/hari)	21,92	22,55	...
Volume Produksi Sampah (ton/hari)	131,57	136,44	140,499

Catatan : ... Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau melibatkan sejumlah fasilitas seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta penanganan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Tabel 4.9.1 menunjukkan data pengelolaan sampah di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut, Kabupaten Berau memiliki 26 unit TPS dengan daya tampung 443 meter kubik per unit. Jumlah TPA yang ada tetap sebanyak tiga unit pada periode tersebut, menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan pembuangan sampah akhir atau dengan kata lain daya tampung yang masih mencukupi dengan lokasi TPA yang ada walaupun volume sampah bertambah setiap tahunnya.

Volume sampah yang terangkut pada tahun 2021 tercatat sebesar 21,92 m³ per hari, dan meningkat sedikit menjadi 22,55 m³ per hari pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan volume sampah yang terangkut, data untuk tahun 2023 mengenai volume sampah yang terangkut tidak tersedia. Selain itu, produksi sampah yang dihasilkan per hari juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, volume produksi sampah tercatat sebesar 131,57 ton per hari, meningkat menjadi 136,44 ton pada tahun 2022, dan mencapai 140,499 ton pada tahun 2023. Peningkatan volume sampah ini mencerminkan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan populasi, yang mengharuskan peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Berau mengalami tantangan dalam hal volume yang semakin meningkat, upaya pengelolaan yang dilakukan tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai infrastruktur pengelolaan sampah yang terus ditingkatkan, seperti peningkatan kapasitas TPS dan pengangkutan sampah yang lebih efisien. Namun, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk terus berinovasi dan menggalakan serta melakukan sosialisasi dalam pengolahan sampah, termasuk pemilahan sampah sejak rumah tangga dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 4.9.2 Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Berau, 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kualitas Udara	89,82	85,87	85,32	83,76	85,17
Indeks Kualitas Lahan	91	89,78	94,64	94,64	94,64
Indeks Kualitas Air	59,44	56,19	56,09	53,48	53,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dalam suatu wilayah. Adanya kualitas lingkungan ini berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Selain berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, kualitas lingkungan hidup juga memiliki peran besar terhadap kelangsungan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup merujuk pada kondisi ekosistem dan sumber daya alam yang ada, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan maka dapat digunakan Indeks Lingkungan Hidup. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan.
2. Membantu dalam mendisain program lingkungan.
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang juga fokus pada pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menempatkan hal ini sebagai pengaruhutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara, air, serta lahan. Ini penting, mengingat Kabupaten Berau memiliki banyak potensi alam yang harus dijaga keberlanjutannya, seperti hutan tropis, sungai, dan lahan pertanian. Selain itu, sektor pariwisata alam yang berkembang pesat di daerah ini juga bergantung pada kualitas lingkungan yang baik.

Tabel 4.9.2 menunjukkan perkembangan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun terakhir, yang meliputi tiga komponen utama: udara, lahan, dan air.

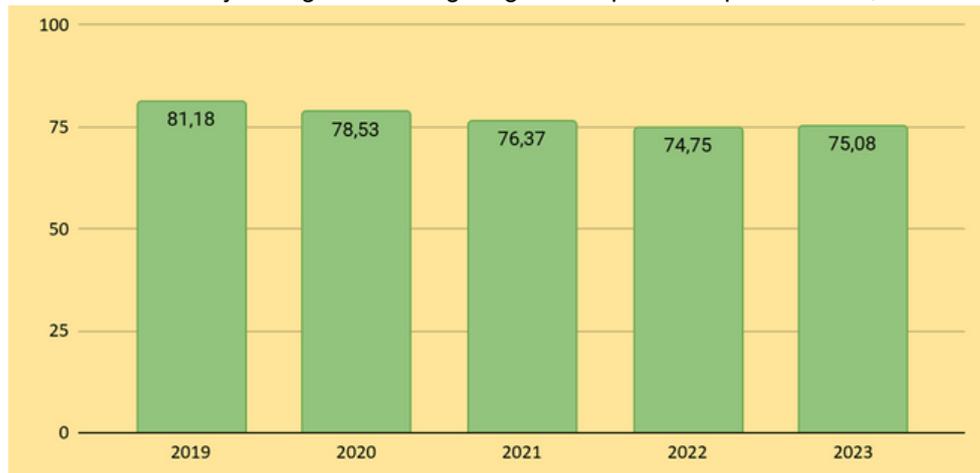




- Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IKU berada pada angka yang cukup baik, yakni 89,82, yang mencerminkan kualitas udara yang sehat. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan, yakni 85,87 dan 85,32. Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, nilai IKU kembali sedikit membaik menjadi 83,76 dan 85,17, menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mengendalikan polusi udara.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan angka yang stabil dan cenderung baik, dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 94,64, yang mencerminkan pengelolaan lahan yang efektif. Secara keseluruhan, kualitas lahan di Kabupaten Berau tetap berada dalam kategori sangat baik, meskipun sedikit fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.
- Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang konsisten sepanjang periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IKA tercatat sebesar 59,44, namun terus menurun hingga 53,33 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan kualitas air, yang mungkin disebabkan oleh faktor polusi atau kegiatan manusia di sekitar sumber daya air.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan dalam kualitas udara dan air, Kabupaten Berau masih mampu mempertahankan kualitas lahan yang baik. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat terus berupaya menjaga kualitas lingkungan, terutama kualitas air yang menunjukkan tren menurun. Melalui kebijakan yang lebih terarah, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengurangan polusi, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Berau dapat terus ditingkatkan di masa depan.

Gambar 4.9.1 Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kinerja pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik melalui pengelolaan sampah, pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam, serta pemeliharaan ekosistem yang ada. Salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menunjukkan sejauh mana kualitas lingkungan di suatu daerah terjaga.

Di Kabupaten Berau, perhatian terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan dampak negatif dari kerusakan ekosistem. Sejak tahun 2019, pemerintah Kabupaten Berau telah menerapkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, hingga pengendalian emisi gas rumah kaca.

Gambar 4.9.1 menunjukkan perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Berau tercatat sebesar 81,18, yang menunjukkan kualitas lingkungan yang cukup baik. Namun, seiring berjalannya waktu, IKLH mengalami penurunan secara bertahap, dengan nilai 78,53 pada tahun 2020 dan 76,37 pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut meskipun lebih rendah pada tahun 2022, dengan nilai IKLH sebesar 74,75. Pada tahun 2023, IKLH sedikit mengalami perbaikan menjadi 75,08.

Penurunan yang terjadi pada IKLH selama periode 2019-2022 menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Berau. Faktor-faktor seperti peningkatan jumlah sampah, kerusakan ekosistem, dan perubahan pola konsumsi dapat menjadi penyebabnya. Meskipun demikian, pada tahun 2023, adanya sedikit perbaikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan implementasi program-program berbasis lingkungan yang lebih intensif kemungkinan besar berkontribusi terhadap stabilisasi dan sedikitnya perbaikan pada tahun 2023. Meskipun nilai IKLH Kabupaten Berau belum mencapai level optimal, upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan yang lebih baik patut di apresiasi, dan diharapkan akan terus berlanjut di masa mendatang dengan penerapan kebijakan yang lebih efektif.





Pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2019. Meskipun terdapat penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2019 hingga 2022, terdapat sejumlah program dan kebijakan yang diimplementasikan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Berau terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Pengelolaan Sampah

- **Program Zero Waste:** Pemerintah Kabupaten Berau menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Program ini mencakup penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, peningkatan fasilitas daur ulang, serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse (TPSR) di beberapa titik strategis.
- **Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST):** Dalam rangka mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, TPST dibangun untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah rumah tangga dan sampah industri skala kecil.

2. Penghijauan dan Konservasi Alam

- **Program Rehabilitasi Hutan dan Penghijauan:** Pemerintah Kabupaten Berau aktif dalam program penghijauan dengan menanam pohon di area-area yang rawan erosi dan deforestasi. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam, termasuk di kawasan pesisir dan perbukitan yang terdampak deforestasi.
- **Konservasi Hutan Mangrove:** Mengingat pentingnya ekosistem mangrove di pesisir Berau, pemerintah daerah telah mengimplementasikan program konservasi mangrove untuk mencegah abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati.

3. Pengendalian Polusi dan Emisi Gas Rumah Kaca

- **Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Udara Bersih:** Upaya pengendalian polusi udara telah dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas transportasi umum, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi emisi dari kendaraan dan industri.
- **Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK):** Kabupaten Berau juga terlibat dalam program nasional untuk mengurangi emisi GRK. Salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya di fasilitas publik dan rumah tangga, serta melakukan penghentian pembakaran hutan dan lahan yang seringkali menjadi sumber utama polusi udara.



4. Pendidikan dan Sosialisasi Lingkungan

- **Kampanye Kesadaran Lingkungan:** Pemerintah Kabupaten Berau juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Kampanye ini mencakup penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan pentingnya menjaga keberagaman ekosistem.
- **Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat:** Untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, berbagai pelatihan diberikan kepada masyarakat, khususnya mengenai cara-cara untuk mengelola sampah, pertanian ramah lingkungan, dan cara-cara menjaga sumber daya alam yang ada.

5. Pemantauan dan Penilaian Kinerja Lingkungan

- **Monitoring Kualitas Lingkungan:** Pemerintah daerah telah mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara, air, dan tanah untuk mendeteksi pencemaran sejak dini. Selain itu, data terkait kualitas lingkungan juga dikumpulkan secara berkala untuk dianalisis dalam rangka perbaikan kebijakan.
- **Evaluasi Program Pengelolaan Lingkungan:** Setiap tahun, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

6. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

- **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Pemerintah Kabupaten Berau juga bekerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan, seperti penyediaan teknologi ramah lingkungan, pengolahan sampah berbasis industri, dan penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan.
- **Program Kemitraan dengan Masyarakat Lokal:** Program seperti pemberdayaan kelompok masyarakat di desa-desa pesisir untuk menjaga ekosistem laut dan hutan turut dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

7. Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan

- **Pembangunan Fasilitas Ramah Lingkungan:** Di sektor infrastruktur, pemerintah kabupaten juga berupaya membangun fasilitas publik yang ramah lingkungan, seperti taman kota, jalur sepeda, dan pengelolaan air bersih yang lebih efisien.





Meskipun IKLH menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, implementasi berbagai program pengelolaan lingkungan hidup ini telah membawa beberapa dampak positif. Perbaikan yang terjadi pada IKLH pada tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Berau mulai memberikan hasil, dengan adanya perbaikan kualitas udara, penurunan polusi sampah, serta keberhasilan penghijauan dan rehabilitasi hutan.

Ke depannya, diharapkan program-program ini terus berkembang dengan pendekatan yang lebih komprehensif, serta melibatkan lebih banyak sektor terkait dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih inovatif dan berbasis pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berbagai macam program dan sarana prasarana pendukung telah dilakukan dan dilengkapi Pemerintah Kabupaten Berau agar peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat terus meningkat dan dapat berkesinambungan. Salah satu sarana dan prasarana yang coba terus ditingkatkan jumlah maupun kualitasnya adalah alat angkut sampah/pengelola sampah.

Tabel 4.9.3 Jumlah Alat Angkut Sampah/Pengelola Sampah di Kabupaten Berau (Unit), 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023	Keterangan
(1)	(4)	(5)	(6)	
Truk Pengangkut Sampah	13	13	24	Tahun 2021 dan 2022 : 7 unit Beroperasi, dan 6 Unit Rusak. Tahun 2023 : 19 Unit Beroperasi 5 unit Rusak
Amroll Truck	8	8	11	Tahun 2021 dan 2022 : 7 unit Beroperasi dan 1 Unit Rusak. Tahun 2023 9 unit beroperasi dan 2 Unit Rusak
Pick Up Pengangkut Sampah	2	2	5	Tahun 2023 . 4 unit Beroperasi dan 1 unit Rusak
Motor Sampah Roda Tiga	5	5	14	Tahun 2023 . 13 unit Beroperasi dan 1 rusak unit
Gerobak Sampah	5	5	2	
Loader	1	1	1	
Excavator	2	2	2	
Bulldozer	1	1	2	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Alat angkut sampah di Kabupaten Berau mencakup berbagai jenis kendaraan yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah tersebut yang terdiri dari berbagai jenis, seperti truk pengangkut, amroll truck, pick up, motor sampah roda tiga, serta alat berat seperti loader, excavator, dan bulldozer. Fungsi utama alat ini adalah untuk memastikan kebersihan lingkungan di lingkup wilayah Kabupaten Berau dengan mengangkut sampah dari tempat tinggal dan area umum menuju tempat pembuangan atau pengolahan lebih lanjut.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di Kabupaten Berau, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan sampah yang lebih baik pun semakin meningkat. Sebagai langkah strategis untuk menjaga kebersihan kota dan lingkungan sekitar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau mulai memperbaharui dan menambah jumlah alat angkut sampah untuk mengoptimalkan kebersihan wilayah. Dengan harapan, pengelolaan sampah mengalami perbaikan signifikan. Tabel 3 menunjukkan perkembangan jumlah alat angkut sampah di Kabupaten Berau dari 2021 hingga 2023, yang mencerminkan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021, jumlah truk pengangkut sampah yang beroperasi tercatat sebanyak 7 unit, dengan 6 unit dalam kondisi rusak. Namun, pada tahun 2023, jumlah truk yang beroperasi meningkat signifikan menjadi 19 unit, dengan 5 unit dalam kondisi rusak, yang menunjukkan bahwa DLHK dalam hal ini berupaya melakukan peningkatan kapasitas dan efisiensi dalam pengangkutan sampah. Hal serupa juga dapat dilihat pada jenis amroll truck, yang berfungsi untuk mengangkut sampah dalam jumlah besar. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat 7 unit yang beroperasi, dengan satu unit rusak. Pada tahun 2023, jumlah unit amroll truck yang beroperasi meningkat menjadi 9 unit, meskipun ada 2 unit yang dalam kondisi rusak. Peningkatan jumlah unit yang beroperasi ini tentunya berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Berau.

Alat angkut lain, seperti pick up pengangkut sampah dan motor sampah roda tiga, juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, hanya ada 2 unit pick up pengangkut sampah, namun pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 5 unit, dengan 4 unit beroperasi dan 1 unit rusak. Untuk motor sampah roda tiga, pada tahun 2021 terdapat 5 unit, yang tetap beroperasi hingga tahun 2023 dengan penambahan 9 unit baru, menjadikan totalnya menjadi 14 unit dengan 1 unit rusak. Alat berat seperti loader, excavator, dan bulldozer, yang digunakan untuk menangani sampah dalam jumlah besar atau untuk membersihkan area yang lebih luas, juga tercatat mengalami perkembangan yang stabil, dengan jumlah yang tetap atau sedikit meningkat dalam periode tersebut. Meskipun ada alat yang mengalami kerusakan, namun keberadaan alat berat ini tetap mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien. Secara keseluruhan, melalui data ini telah menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penambahan dan pemeliharaan alat angkut yang memadai. Peningkatan jumlah dan kualitas alat angkut ini diharapkan dapat mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan yang lebih baik, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau.



4.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menjangkau unit terkecil, peranan desa menjadi salah satu yang terpenting. Desa dibutuhkan untuk membangun pemikiran penduduk dalam berkeinginan berkembang dan berkontribusi lebih kepada perekonomian melalui produktivitas tenaga kerja dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya alam yang dimiliki desa. Dalam mengukur potensi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDESA PDTT) menyajikan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan di tingkat desa. Indikator ini sering digunakan sebagai alat evaluasi untuk memahami sejauh mana sebuah desa telah berkembang dalam berbagai aspek. IDM mencakup beberapa dimensi utama pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Dibangun oleh beberapa dimensi, IDM menjadi salah satu indeks komposit yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sebuah desa.

Tabel 4.10.1 Jumlah Klasifikasi Kampung Menurut Tingkat Kemajuan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Tingkat Kemajuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(4)			(5)	(6)
Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Tertinggal	20	1	1	1	1
Berkembang	55	50	47	46	43
Maju	23	38	41	42	39
Mandiri	1	11	11	11	17

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau



Tabel 4.10.1 menggambarkan perkembangan status dan kondisi kampung di Kabupaten Berau selama kurun waktu 2019 hingga 2023 berdasarkan status IDM. Dimana klasifikasi tingkat kemajuan terdiri dari lima kategori, yakni Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Penentuan status IDM untuk sebuah desa diukur secara kuantitatif dengan menggunakan pengukuran kategori desa sangat tertinggal dengan nilai di bawah 0,4907; kategori desa tertinggal dengan nilai berada pada rentang 0,5989 hingga 0,4907; kategori desa berkembang dengan nilai berada pada rentang 0,7072 hingga 0, 5989; kategori desa maju dengan nilai berada pada rentang 0,8155 hingga 0, 7072; dan kategori desa mandiri dengan nilai berada lebih dari 0,8155. Setiap kategori ini menunjukkan sejauh mana sebuah wilayah telah mencapai kemajuan dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakatnya. Pengklasifikasian kampung atau kelurahan berdasarkan tingkat kemajuan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memantau dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Melalui status perkembangan klasifikasi ini maka bertujuan agar setiap wilayah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan lebih fokus pada pencapaian kemajuan yang berkelanjutan.

Selama lima tahun terakhir telah terlihat perubahan yang menggembirakan dalam perkembangan tingkat kemajuan di Kabupaten Berau. Pada tahun 2019, terdapat satu kampung yang tergolong Sangat Tertinggal, namun status ini tidak lagi ditemukan pada tahun 2020 hingga 2023, yang menandakan bahwa upaya pembangunan yang masif dan terukur telah berhasil mengurangi kampung yang berada dalam kondisi sangat tertinggal. Pada kategori Tertinggal, angka yang tercatat cenderung stabil, dengan hanya tersisa satu kampung yang masih masuk kategori tersebut pada tiap tahunnya dari 2020 hingga 2023, dimana pada tahun 2019 tercatat ada 20 kampung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya maksimal agar kampung yg ada di wilayah Kabupaten Berau mengalami peningkatan baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan SDA dan peningkatan SDA penduduknya. Walau hingga tahun 2023 masih terdapat 1 kampung yang masih menghadapi kesulitan dalam mencapai peningkatan kategori, namun pemerintah daerah harus tetap memberi perhatian dan dukungan yang lebih maksimal. Sementara itu, kategori Berkembang mencatatkan penurunan yang perlahan dari 55 kampung pada 2019 menjadi 43 kampung pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sejumlah kampung yang sebelumnya berada di kategori berkembang telah berhasil mencapai status yang lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal di Kabupaten Berau semakin membuahkan hasil yang positif.





Pada kategori Maju, terdapat fluktuatif jumlah kampung yang masuk dalam kategori ini, di mana jumlah kampung yang masuk dalam kategori ini meningkat dari 23 pada tahun 2019 menjadi 42 pada tahun 2022. Hal Ini mencerminkan bahwa banyak kampung di Kabupaten Berau yang sudah mengalami kemajuan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 39 kampung yang masuk kategori ini, akan tetapi kampung ini telah mengalami peningkatan menjadi kampung mandiri. Kategori Mandiri menunjukkan perkembangan yang sangat positif Status Mandiri ini menunjukkan bahwa semakin banyak kampung yang telah berhasil mengelola sumber daya mereka secara mandiri dan mencapai kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2023, terdapat 17 kampung yang tercatat mandiri, meningkat pesat dari hanya 1 kampung pada 2019. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau mengalami perkembangan yang signifikan dalam tingkat kemajuan kampung. Meskipun masih ada beberapa kampung yang tergolong tertinggal atau berkembang, semakin banyak kampung yang berhasil mencapai status maju dan mandiri, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.10.2 Jumlah Klasifikasi Kampung dan Kelurahan Menurut Tingkat Perkembangannya di Kabupaten Berau, 2019-2023

Tingkat Perkembangan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Swadaya	83	60	34	21	59
Swakarya	24	46	67	83	44
Swasembada	3	4	9	6	7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian kampung dan kelurahan melalui berbagai program pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah klasifikasi tingkat perkembangan kampung dan kelurahan, yang terbagi menjadi tiga kategori: swadaya, swakarya, dan swasembada. Data yang tercatat antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam perkembangan kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau.





Tabel 4.10.2 memberikan informasi mengenai klasifikasi kampung dan kelurahan menurut tingkat perkembangannya di Kabupaten Berau, dimana menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2019 hingga 2023. Pada kategori swadaya, yang menunjukkan ketergantungan pada bantuan eksternal, jumlah kampung mengalami penurunan dari 83 pada tahun 2019 menjadi hanya 21 kampung pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan upaya intensif pemerintah dalam memperkuat kapasitas pengelolaan desa dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Meskipun demikian, pada tahun 2023, jumlah kampung swadaya kembali meningkat menjadi 59, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan pencapaian kemandirian yang telah dicapai sebelumnya.

Sementara itu, kategori swakarya menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang konsisten. Dari 24 kampung pada 2019, jumlah kampung swakarya meningkat tajam menjadi 83 pada 2022. Ini menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang lebih mandiri. Namun, pada tahun 2023, jumlah kampung swakarya menurun menjadi 44. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan atau tantangan dalam mempertahankan kemandirian yang telah dicapai.

Pada kategori swasembada, yang mencerminkan tingkat kemandirian tertinggi, meskipun jumlah kampung masih relatif kecil, terdapat tren positif. Jumlah kampung dalam kategori ini meningkat dari 3 kampung pada tahun 2019 menjadi 7 kampung pada 2023. Peningkatan ini, meskipun terbatas, menunjukkan bahwa beberapa kampung telah berhasil mencapai kemandirian penuh dalam pengelolaan pembangunan dan sumber daya mereka.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perkembangan yang signifikan di Kabupaten Berau dalam hal pemberdayaan kampung dan kelurahan. Meskipun terdapat fluktuasi antara kategori, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kapasitas pengelolaan desa dan mendorong kemandirian terlihat jelas, meskipun tantangan tetap ada. Pencapaian ini menunjukkan arah positif yang perlu didorong lebih lanjut untuk mencapai kemandirian yang lebih merata di seluruh kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau.

Tabel 4.10.3 Jumlah Kepala Desa/Kampung & Lurah Berprestasi di Kabupaten Berau, 2019-2023

Kepala Kampung/Lurah	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Kampung Berprestasi	1	1	1	3	3
Lurah Berprestasi	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau



Pencapaian dan dedikasi pemimpin kampung atau kelurahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya serta memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam bentuk penghargaan Kepala Kampung dan Lurah Berprestasi. Kepala kampung atau lurah yang berprestasi adalah mereka yang berhasil menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan kampung atau kelurahan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. Selama periode tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Berau terus memberikan penghargaan kepada kepala kampung atau lurah yang berhasil mencapai prestasi tertentu, baik dalam hal administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, maupun program-program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.10.3 menunjukkan jumlah kepala kampung/lurah berprestasi di Kabupaten Berau menunjukkan tren yang positif dalam hal apresiasi terhadap kinerja pemerintah di tingkat kampung dan kelurahan. Pada tahun 2019 hingga 2021, baik kepala kampung maupun lurah yang berprestasi tercatat sebanyak satu orang masing-masing. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana jumlah kepala kampung berprestasi meningkat menjadi tiga orang. Hal ini menandakan adanya kemajuan yang lebih besar dalam hal kepemimpinan dan inovasi di tingkat kampung, serta keberhasilan dalam program-program pemberdayaan yang dilaksanakan di wilayah tersebut, selain itu menunjukkan adanya usaha yang lebih besar dari para pemimpin lokal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang merata. Pencapaian ini tentu menjadi motivasi bagi kepala kampung dan lurah yang ada di Kabupaten Berau untuk terus giat melakukan inovasi, berkreatifitas, memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas pemerintahan di kampung atau kelurahan masing-masing.

Di sisi lain, meskipun jumlah kepala kampung berprestasi meningkat, jumlah lurah berprestasi tetap sama, yakni satu orang setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa penghargaan ini lebih terkonsentrasi pada kepala kampung. Hal ini dapat juga disebabkan oleh karakteristik wilayah kampung yang lebih beragam dan tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan kampung dibandingkan dengan kelurahan yang mungkin memiliki struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Selain itu karakteristik penduduk yang cukup beragam menjadikan tantangan tersendiri buat kelurahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di kelurahan sudah tertata dengan baik dan terkelola langsung oleh pemerintahan kabupaten menjadi keunggulan tersendiri bagi kelurahan.



Selain wilayah administrasi berupa kelurahan dan kampung, rukun tetangga juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar penduduk. RT bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungannya. RT dapat membantu mengatasi konflik antar warga, mengawasi keamanan lingkungan, dan menyampaikan informasi terkait kebijakan atau aturan yang berlaku. Selain itu, RT juga dapat menjadi jembatan antara penduduk dengan pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya. RT membantu menyampaikan informasi mengenai program-program sosial, kesehatan, atau pendidikan kepada penduduk. Selama dua tahun berturut-turut tidak terjadi penambahan atau pengurangan jumlah RT, tercatat terdapat 763 rukun tetangga di Kabupaten Berau. Kecamatan dengan jumlah RT terbanyak berada pada Kecamatan Tanjung Redeb dengan 124 RT dan Kecamatan Sambaliung 118 RT. Hal ini selaras dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Dikarenakan, kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi cenderung terbagi menjadi beberapa rukun tetangga yang cukup banyak pula.

Tabel 4.10.4 Jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	33	33
Talisayan	81	81
Tabalar	36	36
Biduk-Biduk	30	30
Pulau Derawan	33	33
Maratua	12	12
Sambaliung	118	118
Tanjung Redeb	124	124
Gunung Tabur	78	78
Segah	60	60
Teluk Bayur	86	86
Batu Putih	34	34
Biatan	38	38
Kabupaten Berau	763	763

Catatan : ... : Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau



4.11 Pemuda & Olahraga

Pengembangan fasilitas olahraga mulai mendapatkan perhatian lebih dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, ketersediaan lapangan olahraga di daerah ini terbatas pada olahraga tertentu seperti sepak bola dan bola voli. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan prestasi, serta adanya dukungan dari pemerintah, maka jumlah dan jenis lapangan olahraga semakin diperbanyak dan diperbaiki. Jumlah lapangan olahraga merujuk pada banyaknya fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan berbagai jenis olahraga. Lapangan ini dapat digunakan untuk kegiatan olahraga formal seperti pertandingan atau turnamen, serta untuk latihan dan rekreasi. Di Kabupaten Berau, jumlah lapangan olahraga mencakup berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola voli, basket, bulu tangkis, futsal, tenis, dan takraw, yang menunjukkan fasilitas yang semakin lengkap dan berkembang untuk mendukung aktivitas fisik masyarakat dalam berolahraga. Walaupun data lengkap mengenai jumlah lapangan olahraga pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, pencatatan yang ada pada 2022 dan 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Tabel 4.11.1 Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Berau, 2019-2023

Jumlah Lapangan Olahraga	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sepak Bola	90	92
Bola Volly	17	17
Basket	99	93
Bulu Tangkis	7	8
Futsal	8	9
Tenis	12	18

Catatan : ... : Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau



Tabel 4.11.1 menunjukkan perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Berau dimana terlihat perkembangan yang positif dalam hal penyediaan fasilitas olahraga selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah lapangan olahraga untuk sepak bola tercatat sebanyak 90 lapangan, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 92 lapangan. Hal ini menandakan adanya perhatian serius dalam menyediakan fasilitas untuk olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat ini. Sementara itu, lapangan bola voli mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari 13 lapangan pada tahun 2022 menjadi 164 lapangan pada tahun 2023. Peningkatan yang besar ini mencerminkan adanya antusiasme yang tinggi terhadap olahraga voli di daerah ini, serta mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan memperluas fasilitas olahraga agar lebih dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu lapangan olahraga voli yang tidak memerlukan wilayah yg cukup luas menyebabkan fasilitas ini dapat di bangun hampir di setiap desa.

Jenis olahraga lain, seperti futsal, tenis, dan takraw, juga mengalami perkembangan. Lapangan takraw, yang pada awalnya kurang mendapat perhatian, menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan jumlah lapangan mencapai 18 lapangan pada tahun 2023, dari 12 lapangan pada tahun sebelumnya. Fasilitas lapangan futsal dan tenis juga menunjukkan tren positif, meskipun peningkatan jumlah fasilitasnya tidak mengalami peningkatan signifikan. Namun ada juga lapangan olahraga yang mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan tahun 2022 yaitu lapangan bulu tangkis, dimana pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 99 lapangan akan tetapi mengalami penurunan jumlahnya menjadi 93 lapangan pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun data untuk tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Berau mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung perkembangan olahraga masyarakatnya. Dengan meningkatnya jumlah dan variasi fasilitas olahraga ini, diharapkan masyarakat akan semakin aktif dalam berolahraga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan prestasi olahraga di Kabupaten Berau.

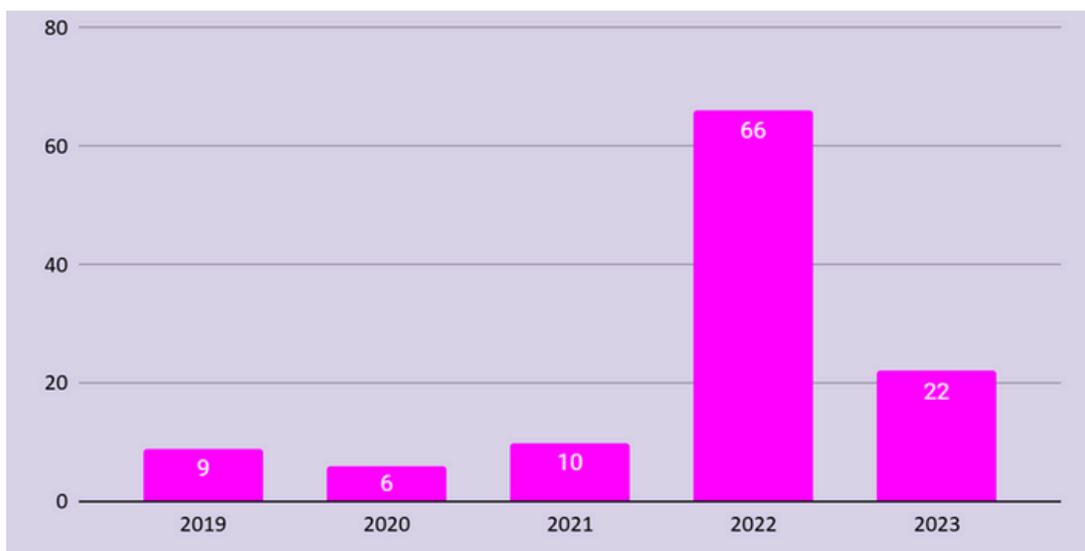
Secara keseluruhan, meskipun data untuk tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Berau mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung perkembangan olahraga. Dengan meningkatnya jumlah dan variasi fasilitas ini, diharapkan masyarakat akan semakin aktif dalam berolahraga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan prestasi olahraga di daerah tersebut.





Pengembangan fasilitas olahraga mulai mendapatkan perhatian lebih dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, ketersediaan lapangan olahraga di daerah ini terbatas pada olahraga tertentu seperti sepak bola dan bola voli. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan prestasi, serta adanya dukungan dari pemerintah, maka jumlah dan jenis lapangan olahraga semakin diperbanyak dan diperbaiki. Jumlah lapangan olahraga merujuk pada banyaknya fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan berbagai jenis olahraga. Lapangan ini dapat digunakan untuk kegiatan olahraga formal seperti pertandingan atau turnamen, serta untuk latihan dan rekreasi. Di Kabupaten Berau, jumlah lapangan olahraga mencakup berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola voli, basket, bulu tangkis, futsal, tenis, dan takraw, yang menunjukkan fasilitas yang semakin lengkap dan berkembang untuk mendukung aktivitas fisik masyarakat dalam berolahraga. Walaupun data lengkap mengenai jumlah lapangan olahraga pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, pencatatan yang ada pada 2022 dan 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Gambar 4.11.1 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Berau, 2019 – 2023



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau

Keaktifan masyarakat Kabupaten Berau dalam berolahraga dapat dilihat dari semakin banyaknya variasi kegiatan olahraga yang dilakukan. Jumlah kegiatan olahraga merujuk pada berbagai acara atau aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka mempromosikan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas olahraga di suatu daerah. Di Kabupaten Berau, kegiatan olahraga meliputi berbagai jenis kegiatan seperti turnamen, pelatihan, festival olahraga, hingga pertandingan antar klub atau komunitas olahraga. Peningkatan jumlah kegiatan olahraga menunjukkan adanya upaya nyata dalam memfasilitasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam dunia olahraga.



Kabupaten Berau, sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Timur, terus berkomitmen untuk memperkenalkan dan mengembangkan sektor olahraga di kalangan masyarakatnya. Meskipun jumlah kegiatan olahraga di daerah ini mengalami fluktuasi, dari 9 kegiatan di tahun 2019 menjadi 22 kegiatan pada tahun 2023, hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya olahraga sebagai sarana rekreasi dan pembinaan prestasi. Pada 2020 dan 2021, meskipun terdapat dampak dari pandemi COVID-19, sejumlah kegiatan olahraga tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk kompetisi dalam skala terbatas atau acara yang digelar secara daring.

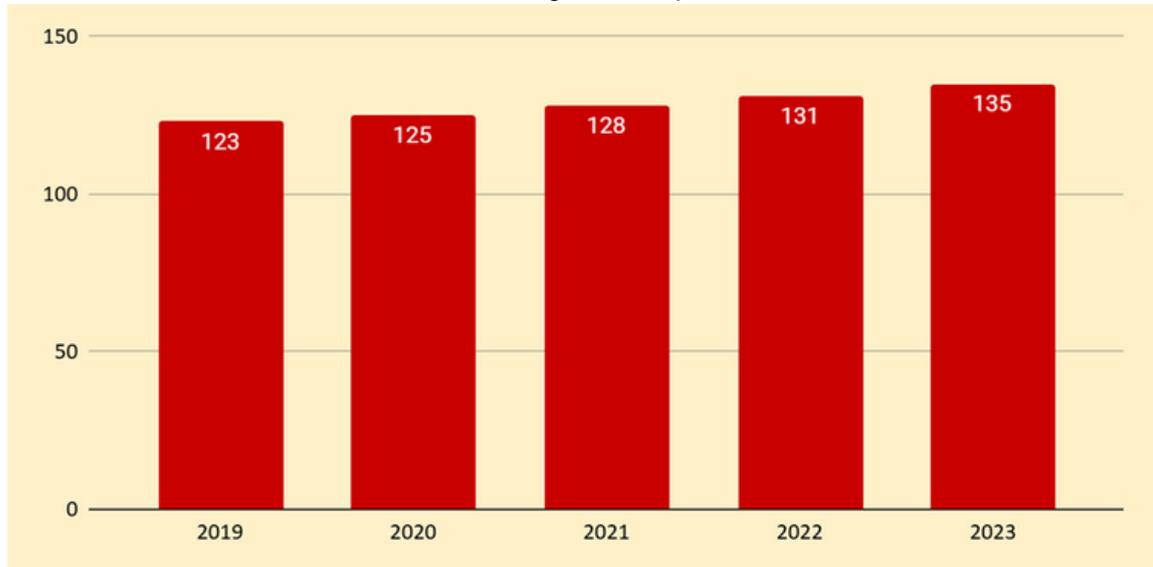
Gambar 4.11.1 menunjukkan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Berau mencerminkan perubahan yang signifikan dalam upaya pengembangan olahraga di daerah tersebut. Pada tahun 2019, terdapat 9 kegiatan olahraga, yang menunjukkan bahwa pengembangan olahraga pada tahun-tahun tersebut masih bersifat terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dengan tercatatnya 66 kegiatan olahraga, meskipun terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 22 kegiatan. Lonjakan yang tajam pada 2022 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelonggaran pembatasan sosial akibat pandemi, yang memungkinkan lebih banyak kegiatan olahraga dilaksanakan di lapangan.

Kenaikan jumlah kegiatan olahraga ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong keterlibatan warga dalam berbagai jenis olahraga. Selain itu, keberagaman jenis kegiatan yang diselenggarakan, baik yang berbentuk kompetisi maupun kegiatan rekreasi, memperkaya pengalaman olahraga masyarakat setempat. Penurunan pada 2023, meskipun demikian, tetap mencerminkan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun terdapat fluktuasi, data ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengembangan olahraga di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat terus tumbuh seiring dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang.

Kenaikan jumlah kegiatan olahraga ini juga menunjukkan semakin masifnya masyarakat untuk berolahraga dan mencoba olahraga yang belum ada sebelumnya. Namun demikian peran serta organisasi olahraga juga berperan penting seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang memberi ruang gerak kepada cabang olahraga untuk terus aktif dan berkembang. Melalui KONI maka dapat melakukan pembinaan dengan membentuk klub untuk setiap cabang olahraga sehingga setiap klub olahraga dapat termotivasi untuk terus meningkat cabang olahraganya masing-masing.



Gambar 4.11.2 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Berau, 2019 - 2023



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau

Jumlah klub olahraga mengacu pada banyaknya organisasi atau komunitas yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan olahraga di suatu daerah. Di Kabupaten Berau, jumlah klub olahraga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai jenis olahraga, baik yang bersifat rekreasi maupun kompetitif. Klub-klub olahraga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlatih, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan membangun semangat kebersamaan antarwarga. Kabupaten Berau, telah mengalami perkembangan signifikan dalam pembangunan dan pengembangan sektor olahraga. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah klub olahraga dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan potensi atlet dan pembinaan olahraga di daerah tersebut. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berbagai jenis olahraga mulai populer, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, hingga olahraga tradisional, yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat.





Berdasarkan Gambar 4.11.2 terlihat jumlah klub olahraga di Kabupaten Berau menunjukkan adanya tren positif yang konsisten dalam perkembangan kegiatan olahraga di daerah tersebut. Pada tahun 2019, tercatat ada sebanyak 123 klub olahraga, dan terus meningkat menjadi sebanyak 135 klub pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Selain itu, hal ini juga mencerminkan peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan program yang mendukung pengembangan olahraga di berbagai tingkatan. Pada tahun 2020 hingga 2022, meskipun menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19, jumlah klub olahraga tetap mengalami peningkatan, dengan adanya penyesuaian dalam bentuk kegiatan yang dilakukan, seperti pelatihan daring atau penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan. Peningkatan jumlah klub ini juga diiringi dengan semakin beragamnya jenis olahraga yang diminati oleh masyarakat, tidak hanya terbatas pada olahraga mainstream seperti sepak bola dan bola basket, tetapi juga olahraga rekreasi dan kebugaran seperti yoga dan fitness. Peningkatan jumlah klub olahraga ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat basis olahraga lokal, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan prestasi atlet. Dengan keberadaan lebih banyak klub olahraga, diharapkan dapat muncul lebih banyak atlet berbakat yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus membangun komunitas yang lebih sehat dan produktif.





4.12 Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dan dijadikan sektor alternatif untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah, hal ini sebagai upaya bagi sebuah daerah untuk menjadi menggantikan sektor yang berbasis sumber daya alam tak tergantikan seperti Kabupaten Berau yang hingga saat ini masih sangat tergantung kepada sektor usaha pertambangan batu bara. Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Berau kini berbenah untuk melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan nilai lebih dari pariwisata di Bumi Batiwakkal agar menjadi daya pikat tersendiri bagi para wisatawan maupun pihak perusahaan asing serta kerjasama antar negara luar. Terlebih lagi pada saat ini dengan telah terbentuknya Ibukota Nusantara, tentu sedikit banyak akan berdampak positif terhadap wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Berau, dimana diharapkan destinasi wisata menjadi salah satu yang akan memiliki dampak positif tersebut.

Kabupaten Berau sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata mempunyai peluang dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian. Selain itu, Kabupaten Berau yang memiliki berbagai karakteristik seperti daerah perkotaan, pedalaman, pesisir, dan kepulauan, juga dapat memberikan potensi pariwisata yang berbeda-beda baik itu wisata alam maupun wisata budaya. Ini menjadikan sektor pariwisata Kabupaten Berau memiliki potensi untuk menjadi wisata nasional.

Selain itu, sesuai dengan misi kedua Kabupaten Berau, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal, maka pemerintah daerah berharap sektor pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Berau dimana masyarakat bisa membuka usaha kecil, menjadi tour guide, membuat tempat penginapan, dan hal-hal yang terkait dengan pariwisata. Dalam upaya mendukung terlaksananya misi pemerintah tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Berau memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai stakeholder dan juga penduduk Kabupaten Berau. Kabupaten Berau setidaknya mempunyai berbagai ragam potensi objek wisata yang bisa dikembangkan, dimana potensi obyek-obyek wisata tersebut tersebar di 13 kecamatan



Tabel 4.12.1 Jumlah Jenis Objek Wisata di Kabupaten Berau, 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	22	22	27	27	27
Talisayan	11	11	13	12	12
Tabalar	7	7	9	9	9
Biduk-Biduk	23	23	25	25	25
Pulau Derawan	19	19	47	26	26
Maratua	24	24	85	41	41
Sambaliung	8	8	10	11	12
Tanjung Redeb	14	14	16	15	15
Gunung Tabur	7	7	9	10	10
Segah	11	11	13	13	13
Teluk Bayur	12	12	12	14	14
Batu Putih	12	12	16	17	17
Biatan	2	2	3	3	4
Kabupaten Berau	172	172	285	223	225

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

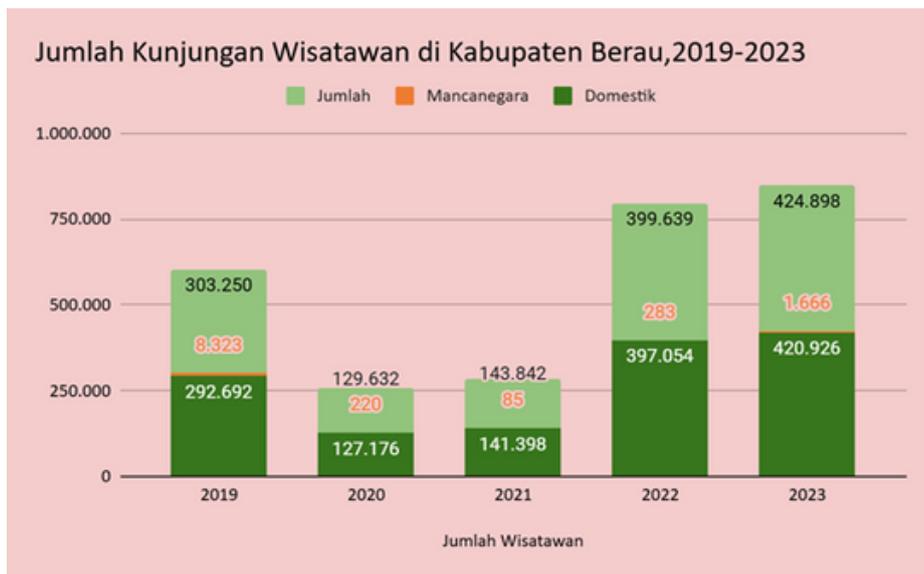
Jumlah jenis objek wisata di Kabupaten Berau menunjukkan variasi yang signifikan selama periode 2019-2023, yang mencerminkan perkembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Objek wisata di Berau meliputi berbagai macam jenis, mulai dari destinasi alam hingga wisata bahari, yang tersebar di berbagai kecamatan. Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah objek wisata di seluruh Kabupaten Berau tercatat sebanyak 172 jenis. Jumlah ini tetap stabil hingga tahun 2020, namun mengalami lonjakan drastis pada tahun 2021 menjadi 285 jenis objek wisata, seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, meskipun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan menjadi 223 dan 225 objek wisata.

Beberapa kecamatan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama Kecamatan Maratua, yang mencatatkan 85 objek wisata pada tahun 2021, meskipun jumlahnya berkurang menjadi 41 pada tahun 2022 dan 2023 setelah spot diving dihapuskan dari kategori objek wisata umum. Pulau Derawan juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam dari 47 objek wisata pada 2021 menjadi 26 objek wisata pada 2022-2023. Di sisi lain, Kecamatan Kelay, Biduk-Biduk, dan Tabalar menunjukkan kestabilan jumlah objek wisata, yang mencerminkan pengelolaan pariwisata yang lebih terstruktur di kecamatan tersebut.



Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi jumlah objek wisata, Kabupaten Berau menunjukkan potensi pariwisata yang besar, dengan sektor ini terus berkembang untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Perubahan ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan pengelolaan objek wisata, serta penyesuaian terhadap tren wisata, seperti pengeluaran spot diving dari kategori objek wisata umum pada tahun 2022 dan 2023.

Gambar 4.12.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Berau, 2019 - 2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

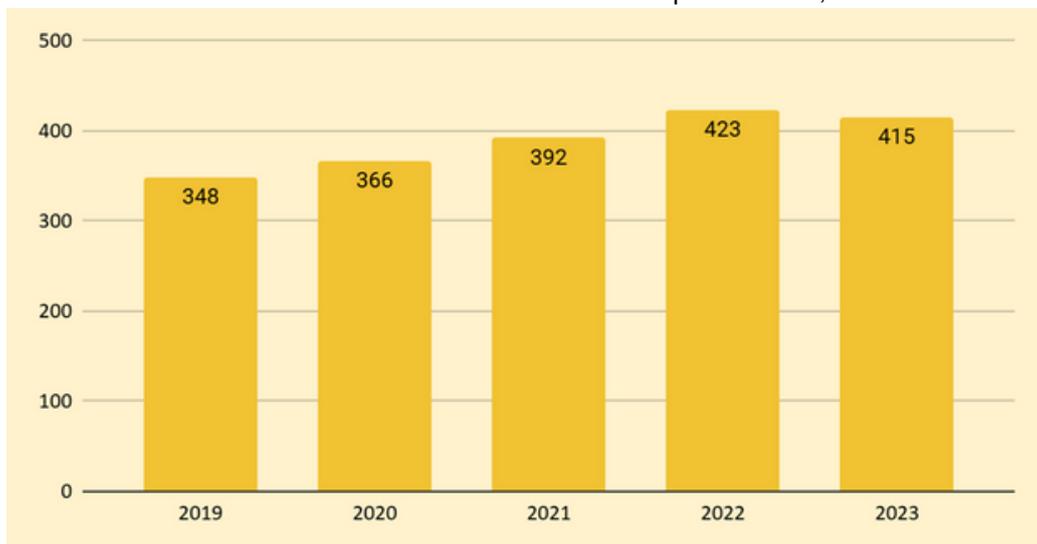
Salah satu indikator yang digunakan apakah suatu wilayah menarik untuk dikunjungi adalah dengan jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan yang tinggi dapat menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan wilayah tersebut karena para wisatawan akan membelanjakan uangnya untuk sekedar membeli oleh-oleh, atau untuk makan dan minum. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan memiliki tren yang menaik. Hal ini menandakan bahwa banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing, tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Berau. Kunjungan wisatawan yang meningkat menunjukkan daya tarik Kabupaten Berau sebagai destinasi wisata yang terus berkembang, mencerminkan keberhasilan dalam mempromosikan potensi alam dan budaya lokal. Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Berau yang selalu meningkat.



Jumlah kunjungan wisatawan merujuk pada total pengunjung yang datang ke suatu daerah untuk tujuan rekreasi atau wisata dalam periode tertentu. Kunjungan wisatawan mencakup dua kategori utama, yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat fluktuatif yang cukup tinggi terutama di tahun 2020 dan 2021. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kondisi pandemi dimana salah satunya adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi menyebabkan kunjungan ke daerah wisata menjadi menurun. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 292.692 orang, yang kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, yaitu sebanyak 127.176 orang, akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor pariwisata global. Namun, pada tahun 2021, sektor pariwisata Berau mulai pulih dengan jumlah wisatawan domestik mencapai sebanyak 141.398 orang. Pemulihan ini berlanjut dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 (397.054 wisatawan) dan terus mengalami peningkatan tahun 2023 (420.926 wisatawan).

Data jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Berau menunjukkan tren pemulihan yang positif setelah dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, Kabupaten Berau tercatat menerima 8.323 wisatawan mancanegara. Meskipun terjadi penurunan signifikan pada 2020 dan 2021 akibat pembatasan perjalanan, angka wisatawan mulai menunjukkan pemulihan pada 2022 dengan 283 wisatawan, dan mengalami lonjakan lebih lanjut pada 2023 dengan total 1.666 wisatawan. Peningkatan ini mencerminkan optimisme terhadap sektor pariwisata Kabupaten Berau yang semakin berkembang, serta menunjukkan potensi yang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke depan. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ini mengindikasikan daya tarik destinasi wisata Kabupaten Berau yang semakin kuat, serta dampak positif dari upaya promosi dan pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah setempat. Dengan pertumbuhan yang stabil, Kabupaten Berau diprediksi akan terus menjadi tujuan wisata favorit bagi banyak orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Gambar 4.12.2 Jumlah Hotel dan Akomodasi di Kabupaten Berau, 2019 - 2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau



Salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah aspek konsep keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya pembangunan suatu wilayah meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup. Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat aspek pariwisata berkelanjutan dimana pembangunan keberlanjutan dapat dicapai melalui kepariwisataan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dicapai dengan menyeimbangkan ketiga elemen utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Berau. Dimana pariwisata di Kabupaten Berau tetap memperhatikan dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi penduduk di sekitar tempat destinasi pariwisata. Salah satu dampak positif bagi penduduk di sekitar tempat destinasi pariwisata adalah dengan penyediaan tempat akomodasi yang langsung dikelola oleh mereka. Akomodasi yang dimaksud tidak hanya mencakup hotel, tetapi juga berbagai jenis penginapan lain yang digunakan oleh pengunjung seperti losmen, villa, cottage dan guest house.

Jumlah hotel dan akomodasi di suatu daerah merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan sektor pariwisata dan penyediaan fasilitas bagi wisatawan. Di Kabupaten Berau, jumlah hotel dan akomodasi yang terus meningkat menunjukkan perkembangan sektor pariwisata yang positif, di mana kebutuhan akan fasilitas penginapan seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Berau, jumlah pengunjung yang datang, baik domestik maupun internasional, semakin meningkat. Peningkatan ini turut mendorong pembangunan dan perluasan fasilitas akomodasi di daerah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, sektor perhotelan di Berau semakin menunjukkan kemajuan yang pesat.





Berdasarkan Gambar 4.12.2 terlihat bahwa perkembangan jumlah hotel dan akomodasi di Kabupaten Berau dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 348 unit hotel dan akomodasi, yang kemudian meningkat menjadi 366 unit pada tahun 2020. Angka ini terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 392 unit pada tahun 2021, 423 unit pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 415 unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023, tren keseluruhan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan jumlah hotel dan akomodasi ini mencerminkan adanya perkembangan pesat di sektor pariwisata Kabupaten Berau. Dengan lebih banyaknya pilihan akomodasi, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, menunjukkan bahwa Kabupaten Berau semakin siap menjadi destinasi wisata unggulan di Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor perhotelan, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan jumlah hotel pada 2023, namun melihat tren jangka panjang menunjukkan bahwa Kabupaten Berau berhasil meningkatkan kapasitas akomodasi, yang sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata. Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan kesiapan Kabupaten Berau untuk menerima lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional.



4.13 Pertanian Padi dan Palawija

Sektor pertanian di Kabupaten Berau memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, dengan padi sebagai salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani setempat. Tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah juga memiliki kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan dan pendapatan petani. Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor pertanian di Berau mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kebijakan pertanian, teknologi, serta kondisi alam dan pasar. Meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga produk pertanian sering terjadi, sektor pertanian Berau terus berusaha meningkatkan produksi dan produktivitasnya

Tabel 4.13.1 Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi, dan Palawija Tahun 2019-2023

Padi	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (Ha)	4.771,22	6.461,68	5.756,54	6.229,84	6.027,48
Produksi (Ton)	16.739,31	23.352,73	22.364,87	21.135,98	20.498,89
Produktivitas (Kw/Ha)	35,08	36,14	38,85	33,93	34,01
Jagung	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (Ha)	9.765,50	8.971,30	10.558,50	10.570,20	3.568,00
Produksi (Ton)	75.363,00	48.881,75	63.023,55	51.073,73	19.335,91
Produktivitas (Kw/Ha)	75,15	55,09	59,73	35,89	53,76
Kedelai	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (Ha)	10,00	32,00	19,50	3,00	5,00
Produksi (Ton)	15,00	48,00	49,17	4,83	7,44
Produktivitas (Kw/Ha)	13,79	14,54	15,94	14,29	14,85
Kacang Tanah	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (Ha)	206,00	142,10	121,30	62,90	17,90
Produksi (Ton)	242,00	171,00	153,16	86,75	26,58
Produktivitas (Kw/Ha)	16,01	12,15	12,03	13,17	13,26

Sumber : BPS Kabupaten Berau





Luas panen, produksi, dan produktivitas adalah indikator penting dalam sektor pertanian yang menggambarkan keberhasilan dan efisiensi usaha tani dalam menghasilkan komoditas pertanian. Luas panen menunjukkan area lahan yang dibudidayakan, produktivitas mengukur jumlah hasil per satuan luas (biasanya dalam kuintal per hektar), dan produksi adalah jumlah total hasil yang dipanen dalam suatu tahun. Di Kabupaten Berau, data ini mencakup komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah, yang memberikan gambaran tentang potensi dan kinerja sektor pertanian di daerah tersebut.

Berdasarkan data produksi padi dan palawija di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat adanya fluktuasi yang menunjukkan dinamika sektor pertanian. Padi, sebagai komoditas utama, mengalami fluktuasi pada luas panen dan produksi. Pada tahun 2019, luas panen padi tercatat sebesar 4.771,22 hektar dengan produksi 16.739,31 ton. Namun, pada 2020, luas panen meningkat signifikan menjadi 6.461,68 hektar, menghasilkan 23.352,73 ton padi. Meskipun ada penurunan produksi pada tahun-tahun berikutnya, dengan 20.498,89 ton pada 2023, produktivitas padi relatif stabil, meskipun sedikit menurun dari 36,14 kuintal per hektar (2020) menjadi 34,01 kuintal per hektar pada 2023. Ini mencerminkan upaya peningkatan efisiensi produksi meskipun ada tantangan dalam pengelolaan lahan dan perubahan iklim.

Komoditas tanaman Jagung mengalami tren penurunan yang cukup drastis pada 2023. Luas panen Jagung pada 2023 hanya tercatat 3.568 hektar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti pada 2019 yang mencapai 9.765,50 hektar. Produksi jagung juga mengalami penurunan signifikan, dari 75.363 ton pada 2019 menjadi hanya 19.335,91 ton pada 2023. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga dan cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan penurunan luas tanam dan hasil panen.

Kedelai menunjukkan kinerja yang lebih stabil dengan produktivitas yang relatif baik. Pada tahun 2023, meskipun luas panen kedelai menurun menjadi hanya 5 hektar, produktivitasnya meningkat menjadi 14,85 kuintal per hektar, menunjukkan efisiensi yang baik dalam produksi kedelai meskipun penurunan luas lahan. Kacang tanah juga mengalami penurunan luas panen yang cukup tajam pada 2023, dengan hanya 17,90 hektar yang dipanen. Produksi kacang tanah pun turun menjadi 26,58 ton, namun produktivitasnya tetap berada di angka 13,26 kuintal per hektar, menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan hasil yang optimal meskipun luas lahan terbatas.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan luas panen pada beberapa komoditas, sektor pertanian di Kabupaten Berau menunjukkan potensi yang baik dalam peningkatan produktivitas. Penurunan luas panen pada jagung dan kacang tanah mungkin disebabkan oleh perubahan dalam pola tanam atau peralihan ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Namun, efisiensi yang terjaga dalam produksi padi dan kedelai menandakan adanya potensi yang besar untuk meningkatkan hasil pertanian dengan teknologi yang tepat dan strategi peningkatan produktivitas yang lebih baik. Dengan dukungan kebijakan pertanian yang mendukung serta perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam, sektor pertanian di Kabupaten Berau dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.



4.14 Hortikultura

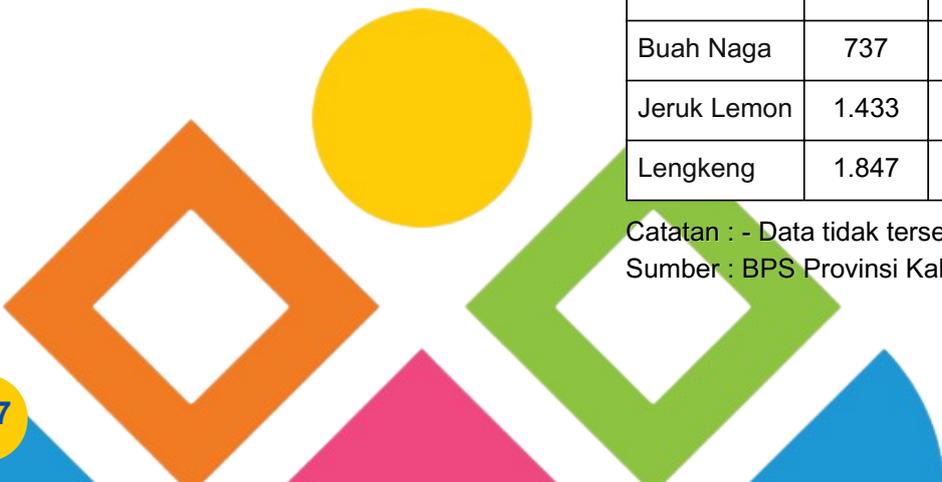
Seiring berjalannya waktu, produksi buah-buahan di Kabupaten Berau semakin beragam dengan meningkatnya minat petani terhadap komoditas baru dan permintaan pasar. Pada awalnya yang dibudidayakan hanya buah-buahan tropis seperti durian, mangga, rambutan, pisang, dan pepaya. Namun dengan semakin luasnya pengetahuan petani, dan kemudahan teknologi pertanian, membuat ragam buah-buahan semakin banyak di budidayakan. Selain itu, Kabupaten Berau yang memiliki iklim tropis juga mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman buah, baik buah lokal maupun buah yang mulai dikenalkan pada pasar global. Meskipun sektor ini menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar, keberlanjutan pertanian buah tetap terjaga. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau agar dapat meningkatkan produksi buah-buahan sehingga mencukupi tingkat kebutuhan konsumen, salah satunya pembagian bibit maupun pelatihan kepada petani lokal agar lebih bisa memanfaatkan teknologi tepat guna.

Tabel 4.14.1 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau Tahun 2019-2023 (kwintal)

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Alpukat	13.140	6.834	2.359	1.126	703
Belimbing	246	263	132	97	98
Duku/Langs at/Kokosan	42.072	36.850	27.215	28.516	25.128
Durian	21.079	12.233	4.425	4.608	4.297
Jambu Air	1.385	1.836	975	1.153	1.336
Jambu Biji	1.373	2.575	1.747	1.811	1.925
Jengkol	26	5	126	127	170
Jeruk Besar	1.438	3.659	2.190	361	361
Jeruk Siam/Kepron	24.819	16.162	6.350	5.235	5.103
Mangga	2.709	2.695	2.243	2.181	2.242
Manggis	441	435	18	1	1
Nangka/Cempedak	-	-	14.746	6.055	5.510
Nanas	49	31	670	706	709
Pepaya	26.979	28.799	13.530	12.357	12.875
Pisang	9.186	9.368	37.171	32.700	34.349
Rambutan	9.472	10.264	23.665	12.143	15.934
Salak	724	761	596	775	1.793
Sawo	89.279	50.290	3.284	1.231	1.250
Sirsak	28.767	12.045	1.048	425	422
Sukun	425	413	5.833	1.647	1.697
Buah Naga	737	857	236	76	109
Jeruk Lemon	1.433	1.095	-	-	1
Lengkeng	1.847	2.480	42	29	41

Catatan : - Data tidak tersedia

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur





Produksi buah-buahan dan sayuran merujuk pada jumlah hasil yang dipanen dari tanaman buah dan sayuran yang dihitung dalam satuan kwintal (Kw). Di Kabupaten Berau, berbagai jenis buah dan sayuran diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor. Hasil produksi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, teknologi pertanian, dan pola tanam yang diterapkan oleh petani. Keberagaman komoditas ini juga menunjukkan potensi Kabupaten Berau sebagai daerah dengan kekayaan hasil pertanian yang beragam.

Sektor pertanian buah-buahan di Kabupaten Berau memiliki sejarah panjang, dengan komoditas buah-buahan tropis seperti durian, mangga, rambutan, pisang, dan pepaya sebagai komoditas utama yang telah lama dibudidayakan. Seiring berjalannya waktu, produksi buah-buahan di Berau semakin beragam dengan meningkatnya minat petani terhadap komoditas baru dan permintaan pasar. Kabupaten Berau yang memiliki iklim tropis mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman buah, baik buah lokal maupun buah yang mulai dikenalkan pada pasar global. Meskipun sektor ini menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar, keberlanjutan pertanian buah tetap terjaga.

Data produksi buah-buahan di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik, meskipun terdapat fluktuasi produksi pada beberapa komoditas. Secara umum, pisang, pepaya, dan rambutan tercatat sebagai komoditas dengan produksi yang cukup tinggi dan terus meningkat. Pisang misalnya, menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan, dari 9.186 kw pada 2019 menjadi 34.349 kw pada 2023, yang mencerminkan keberhasilan dalam budidaya pisang yang sesuai dengan permintaan pasar. Pepaya juga mengalami penurunan sementara, namun tetap stabil dengan produksi sekitar 12.875 kw pada 2023.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti alpukat, belimbing, dan durian menunjukkan penurunan produksi yang cukup signifikan. Alpukat, misalnya, mengalami penurunan tajam dari 13.140 kw pada 2019 menjadi hanya 703 kw pada 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan pola tanam atau penurunan minat petani terhadap komoditas tersebut. Durian juga mengalami penurunan produksi dari 21.079 kw pada 2019 menjadi 4.297 kw pada 2023, meskipun tetap menjadi salah satu buah unggulan dengan permintaan tinggi di pasar lokal.

Komoditas buah lain seperti jeruk, nangka, sirsak, dan salak mengalami fluktuasi produksi, namun tidak ada penurunan yang signifikan. Nangka dan cempedak, yang mulai tercatat pada 2021, menunjukkan potensi yang baik meskipun produksinya masih relatif kecil dibandingkan dengan komoditas utama. Begitu pula dengan jeruk keprok, yang meskipun mengalami penurunan pada 2022 dan 2023, tetap memiliki kontribusi yang penting bagi diversifikasi hasil pertanian.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa jenis komoditas, sektor produksi buah di Kabupaten Berau menunjukkan tren yang positif dengan keberagaman komoditas yang diproduksi. Peningkatan hasil produksi pada beberapa komoditas seperti pisang dan rambutan menjadi indikator keberhasilan sektor ini dalam memenuhi kebutuhan pasar. Keberagaman jenis buah yang dihasilkan juga memberikan peluang bagi petani untuk memaksimalkan potensi lahan mereka serta memperluas pasar. Mengingat potensi besar yang dimiliki, sektor pertanian buah di Kabupaten Berau berpotensi untuk terus berkembang dengan dukungan yang tepat dari teknologi pertanian dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan produksi.



4.15 Perkebunan

Sejarah perkebunan di Kabupaten Berau telah mengalami transformasi yang signifikan sejak awal 2000-an. Sektor perkebunan mulai berkembang pesat dengan introduksi kelapa sawit sebagai komoditas unggulan. Pada tahun 2010-an, kelapa sawit semakin mendominasi luas areal perkebunan, mengalahkan komoditas lain seperti karet dan kelapa dalam. Meskipun demikian, tanaman tradisional seperti karet dan kelapa dalam tetap menjadi bagian penting dari struktur perkebunan di daerah ini, dengan keberadaan perkebunan rakyat yang terus berkembang areal luasannya. Seiring waktu, komoditas kelapa sawit, khususnya, telah menjadi andalan, dengan peningkatan luas area perkebunan dan hasil yang terus meningkat. Meskipun tantangan dalam hal harga pasar dan keberlanjutan lingkungan ada, sektor perkebunan di Berau terus berusaha berkembang dengan dukungan dari pemerintah dan petani lokal

Tabel 4.15.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ha), 2019 - 2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
1. Karet					
Rakyat	2.853.50	2.927.50	2.367.50	2.362.50	2.303.50
Plasma	460.00	208.20	208.20	208.20	297.000
PBS	2.865.41	2.048.50	2.089.84	2.843.04	2.843.04
Jumlah Karet	6.178.91	5.184.20	4.665.54	5.413.74	5.443.54
2. Kelapa Dalam					
	2.443.17	2.428.18	2.390.17	2.390.17	2.341.17
3. Kepala Sawit					
Swadaya	19.246.80	19.029.76	19.663.80	19.622.76	21.019.80
Plasma	17.807.00	19.251.00	21.584.58	20.516.80	21.751.60
PBS	98.037.58	101.033.73	105.503.29	106.104.68	108.614.75
Jumlah Sawit	135.090.76	139.314.49	146.751.67	146.244.24	151.386.15
4. Kakao					
	1.625.05	1.253.05	984.30	1.003.80	987.80
5. Lada					
	2.568.60	2.568.60	2.611.60	2.598.60	2.227.50
6. Kopi					
	87.50	80.50	59.50	80.00	79.00
7. Pala					
	304.00	299.00	321.20	373.20	333.20
8. Kemiri					
	5.00	5.00	4.50	4.50	4.50
9. Cengkeh					
	2.00	3.50	3.50	6.50	6.50
Total	148.304.99	151.136.52	157.791.98	158.114.75	162.809.36

Sumber : BPS Kabupaten Berau



Luas areal tanaman perkebunan mencerminkan jumlah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan tertentu dalam satuan hektar (ha). Di Kabupaten Berau, sektor perkebunan meliputi berbagai komoditas, seperti karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, lada, kopi, pala, kemiri, dan cengkeh. Luas areal yang tercatat pada setiap tahun menunjukkan perkembangan sektor perkebunan yang disusahakan serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Data luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama pada komoditas kelapa sawit dan karet. Kelapa sawit menunjukkan peningkatan luas areal yang signifikan, dari 135.090,76 ha pada tahun 2019 menjadi 151.386,15 ha pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pengembangan perkebunan skala besar (PBS) serta pertumbuhan pada sektor swadaya dan plasma. Pada tahun 2023, kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan utama dengan areal yang terus meluas, baik untuk skala swadaya maupun plasma, meskipun sedikit ada penurunan pada beberapa area plasma di tahun 2020.

Sedangkan tanaman karet tetap menunjukkan stabilitas dengan sedikit fluktuasi pada luas arealnya. Pada tahun 2023, total luas areal karet tercatat mencapai 5.443,54 ha, yang didominasi oleh perkebunan karet rakyat (2.303,50 ha) dan PBS (2.843,04 ha). Meskipun ada penurunan pada areal perkebunan karet rakyat dari tahun 2019 hingga 2021, namun 2 tahun berikutnya mulai mengalami peningkatan walaupun kontribusi peningkatan berasal lebih banyak dari perkebunan PBS.

Komoditas lainnya, seperti kelapa dalam, kakao, dan lada, menunjukkan tren yang relatif stabil dalam hal luas areal, meskipun ada sedikit penurunan pada areal tanaman lada di tahun 2023, yang tercatat hanya 2.227,50 ha. Komoditas pala, kemiri, dan cengkeh memiliki areal yang lebih kecil, tetapi tetap berkontribusi pada diversifikasi sektor perkebunan di daerah ini.

Secara keseluruhan, sektor perkebunan di Kabupaten Berau menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, terutama pada kelapa sawit yang mendominasi luas areal perkebunan, diikuti oleh karet dan kelapa dalam. Pengelolaan yang lebih baik, didukung oleh teknologi dan peningkatan kapasitas produksi, berpotensi untuk meningkatkan hasil perkebunan serta kesejahteraan petani di daerah ini. Luas areal yang terus berkembang memberikan gambaran positif mengenai masa depan sektor perkebunan di Kabupaten Berau, menjadikannya salah satu komoditas utama yang berkontribusi perekonomian daerah.





Tabel 4.15.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ton), 2019 - 2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
1. Karet					
Rakyat	205,40	81,90	720,96	343,67	460,19
Plasma	-	-	-	-	-
PBS	-	-	6.228,97	79,03	-
Jumlah Karet	205,40	81,90	6.949,93	422,70	460,19
2. Kelapa Dalam	4.747,70	3.482,74	1.569,29	1.794,24	1.942,58
3. Kepala Sawit					
Swadaya	249.641,37	255.503,77	302.008,63	374.878,34	291.235,95
Plasma	267.739,98	237.149,62	297.321,18	298.638,42	332.313,57
PBS	1.648.802,66	1.731.172,80	1.634.349,85	1.840.500,42	2.262.691,41
Jumlah Sawit	2.202.184,01	2.223.826,19	2.223.679,66	2.514.017,29	2.886.240,93
4. Kakao	680,35	787,66	513,63	600,87	416,81
5. Lada	1.066,55	827,02	1.256,80	1.326,00	1.180,23
6. Kopi	14,58	11,66	12,80	8,51	6,05
7. Pala	1,33	0,15	10,66	16,10	4,57
8. Kemiri	1,02	0,80	0,84	1,30	0,90
9. Cengkeh	-	0,40	1,12	1,70	1,50
Total	2.208.900,92	2.229.018,51	2.243.994,73	2.518.188,71	2.890.256,76

Catatan : - Data tidak tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Produksi perkebunan merujuk pada jumlah hasil tanaman yang dihasilkan dari usaha perkebunan yang dihitung dalam satuan ton. Di Kabupaten Berau, sektor perkebunan mencakup berbagai komoditas seperti karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, lada, kopi, pala, kemiri, dan cengkeh. Komoditas perkebunan ini menjadi salah satu sumber utama perekonomian daerah, menyumbang pendapatan petani lokal, dan berperan dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik serta ekspor.

Berdasarkan Tabel 4.15.2 data produksi perkebunan di Kabupaten Berau dari 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada komoditas kelapa sawit dan karet, yang menjadi andalan utama. Kelapa sawit menunjukkan peningkatan produksi yang konsisten, dengan total produksi naik dari 2.202.184,01 ton pada 2019 menjadi 2.886.240,93 ton pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di berbagai sistem usaha (swadaya, plasma, dan PBS) yang terus berkembang, meskipun ada fluktuasi di beberapa tahun. Kenaikan terbesar terlihat pada kelompok PBS yang menghasilkan 2.262.691,41 ton pada 2023, menunjukkan kemajuan signifikan dalam skala industri besar.



Produksi karet menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2021, meskipun ada beberapa tahun dengan fluktuasi. Pada 2019, produksi karet dari sektor rakyat tercatat 205,40 ton, dan meskipun menurun pada tahun 2020 menjadi 81,90 ton, terjadi lonjakan luar biasa pada 2021 dengan produksi mencapai 720,96 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan hasil yang sangat baik dari sektor rakyat. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 343,67 ton, produksi kembali meningkat pada 2023 menjadi 460,19 ton, yang menunjukkan pemulihan yang positif. Meskipun data untuk sektor plasma dan PBS tidak tersedia pada sebagian tahun, pada 2021, PBS berhasil menghasilkan 6.228,97 ton, memberi kontribusi besar terhadap total produksi karet di Kabupaten Berau.

Beberapa komoditas lain seperti kakao, lada, dan pala mengalami fluktuasi produksi, Meskipun produksi kakao mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, namun produksi kakao masih menunjukkan potensi yang baik. Pada 2019, produksi kakao tercatat 680,35 ton, yang kemudian meningkat menjadi 787,66 ton pada 2020. Produksi kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 dan 2023, namun tetap berada dalam kisaran yang wajar, yaitu 416,81 ton pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa komoditas kakao masih memiliki ruang untuk tumbuh, terutama dengan adanya upaya peningkatan dalam teknik budidaya dan pengolahan. Lada juga menunjukkan kinerja yang baik sepanjang periode ini. Produksi lada pada 2019 tercatat 1.066,55 ton dan meskipun ada sedikit penurunan pada 2020 (827,02 ton), produksi kembali meningkat pada 2021 dan 2022, dengan masing-masing angka 1.256,80 ton dan 1.326,00 ton. Pada 2023, produksi lada sedikit menurun menjadi 1.180,23 ton, namun tetap berada dalam kisaran yang positif, menunjukkan keberlanjutan produksi yang stabil. Pala menunjukkan lonjakan produksi yang signifikan pada tahun 2022. Pada 2019, produksi pala hanya tercatat 1,33 ton, tetapi mengalami penurunan drastis pada 2020 menjadi 0,15 ton. Namun, produksi pala meningkat tajam pada 2021 dengan 10,66 ton dan terus meningkat pada 2022 menjadi 16,10 ton. Meskipun ada penurunan pada 2023 menjadi 4,57 ton, produksi pala tetap mencatatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan potensi perkembangan yang besar.

Selama lima tahun terakhir, sektor perkebunan di Kabupaten Berau menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan peningkatan yang signifikan pada komoditas kelapa sawit dan karet. Keberagaman komoditas yang diproduksi, serta peran pentingnya perkebunan dalam ekonomi daerah, memberikan landasan kuat untuk pembangunan sektor ini di masa depan. Dengan terus mengoptimalkan pengelolaan lahan dan teknologi pertanian yang berkelanjutan, sektor perkebunan di Kabupaten Berau berpotensi memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan petani.



4.16 Peternakan

Sektor peternakan unggas di Kabupaten Berau, khususnya dalam produksi telur, sudah lama menjadi bagian penting dari kegiatan agraris masyarakat. Ayam kampung dan itik merupakan jenis unggas yang paling banyak dibudidayakan untuk keperluan produksi telur. Seiring dengan perkembangan zaman, para peternak di Kabupaten Berau mulai meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi telur unggas dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien serta menerapkan sistem pemeliharaan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap telur unggas baik untuk konsumsi lokal maupun untuk distribusi ke pasar luar daerah.

Tabel 4.16.1 Produksi Telur Unggas Menurut jenis unggas di Kabupaten Berau (kg), 2019-2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Ayam Kampung	180.050,00	170.538,00	160.837,88	144.018,35	145.458,83*
Itik	207.451,00	284.489,00	256.722,80	154.658,79	156.206,97*

Catatan : * angka sementara
 Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Produksi telur unggas adalah jumlah total telur yang dihasilkan oleh unggas yang dipelihara, yang dihitung dalam satuan kilogram (kg). Di Kabupaten Berau, jenis unggas yang banyak dipelihara untuk produksi telur adalah ayam kampung dan itik. Telur unggas merupakan salah satu komoditas pangan utama yang kaya akan protein, yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Produksi telur unggas juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah, selain sebagai sumber pangan yang relatif terjangkau.

Berdasarkan Tabel 4.16.1 diketahui data produksi telur unggas di Kabupaten Berau dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang menarik pada dua jenis unggas utama, yaitu ayam kampung dan itik. Pada ayam kampung, produksi telur mengalami penurunan secara bertahap, dimulai dari 180.050 kg pada 2019, turun menjadi 170.538 kg pada 2020, dan terus menurun hingga 160.837,88 kg pada 2021. Pada 2022, produksi telur ayam kampung tercatat 144.018,35 kg, dan sedikit meningkat menjadi 145.458,83 kg pada 2023 (angka sementara). Penurunan yang terjadi selama beberapa tahun ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fluktuasi permintaan pasar, pergeseran pola konsumsi, serta potensi masalah dalam pemeliharaan atau kesehatan ternak. Meskipun demikian, ayam kampung tetap menjadi sumber utama produksi telur di Kabupaten Berau, dan angka produksi yang sedikit meningkat pada 2023 menunjukkan adanya pemulihan dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut.



Sementara itu, pada itik, produksi telur menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Pada 2019, produksi telur itik tercatat sebesar 207.451 kg, dan mengalami lonjakan yang signifikan pada 2020 dengan 284.897 kg. Pada 2021, produksi telur itik menurun menjadi 256.722,80 kg, namun kembali menurun lebih lanjut pada 2022 menjadi 154.658,79 kg, dengan sedikit kenaikan pada 2023 menjadi 156.206,97 kg. Meskipun ada penurunan yang cukup tajam pada 2022, itik tetap menjadi komoditas penting dalam produksi telur di Kabupaten Berau. Penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan permintaan pasar atau kendala dalam pemeliharaan itik, namun stabilitas angka produksi di 2023 menunjukkan adanya potensi untuk perbaikan dan pertumbuhan sektor ini di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan produksi telur pada kedua jenis unggas, yaitu ayam kampung dan itik, data ini juga menunjukkan potensi untuk pemulihan dan pengembangan lebih lanjut. Produksi telur unggas di Kabupaten Berau masih berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan pangan lokal, dan dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam pemeliharaan serta pemanfaatan teknologi yang tepat, sektor ini memiliki prospek positif di masa mendatang.

Selain telurnya yang sangat bermanfaat dan terus ditingkatkan untuk diproduksi, kebutuhan masyarakat akan daging unggas juga cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari permintaan masyarakat akan produksi daging untuk konsumsi pangan harian yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor peternakan unggas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau, telah berkembang pesat seiring dengan permintaan masyarakat akan daging unggas yang stabil. Ayam kampung dan ayam petelur telah lama menjadi komoditas utama dalam produksi daging unggas di daerah ini, sementara itik juga mulai diperkenalkan untuk memenuhi variasi konsumsi daging. Seiring waktu, para peternak di Kabupaten Berau terus mengoptimalkan pemeliharaan unggas dengan berbagai metode untuk meningkatkan produksi daging unggas yang berkualitas, baik untuk konsumsi domestik maupun untuk kebutuhan pasar luar daerah.

Tabel 4.16.2 Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Berau (Kg), 2019-2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Ayam Kampung	310.765,00	294.348,00	277.605,79	232.003,18	234.323,99*
Ayam Petelur	83.402,00	103.248,00	119.042,35	137.820,54	139.198,82*
Itik	15.588,40	14.666,00	13.215,68	11.620,95	11.737,28*

Catatan : * angka sementara
 Sumber : BPS Provinsi Kaltim





Produksi daging unggas merujuk pada jumlah daging yang dihasilkan dari peternakan unggas, yang dihitung dalam satuan kilogram (kg). Unggas yang biasanya dipelihara untuk tujuan produksi daging di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau, antara lain ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Produksi daging unggas sangat penting bagi kebutuhan pangan lokal dan regional, karena unggas merupakan sumber protein hewani yang relatif terjangkau dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar domestik.

Berdasarkan Tabel 4.16.2 data produksi daging unggas di Kabupaten Berau dari 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung stabil meskipun ada fluktuasi pada masing-masing jenis unggas. Ayam kampung mengalami penurunan produksi dari 310.765 Kg pada 2019 menjadi 294.348 Kg pada 2020, dan terus menurun pada 2021 dengan produksi 277.605,79 Kg hingga tahun 2022 yang mencapai produksi 232.003,18 Kg. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan permintaan pasar, kondisi kesehatan ternak, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun, produksi ayam kampung kembali stabil dengan sedikit peningkatan pada 2023 (234.323,99 Kg) meskipun masih berada di bawah level 2019. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir, ayam kampung tetap menjadi komoditas unggas yang penting di Kabupaten Berau.

Untuk ayam petelur, produksi daging ayamnya meningkat secara signifikan sejak 2019. Pada 2019, produksi ayam petelur tercatat sebesar 83.402 Kg, kemudian meningkat menjadi 103.248 Kg pada 2020. Pada 2021, produksi meningkat lagi menjadi 119.042,35 Kg, dan terus berkembang menjadi 137.820,54 Kg pada 2022. Angka sementara untuk 2023 menunjukkan sedikit kenaikan lagi menjadi 139.198,82 Kg. Peningkatan produksi ayam petelur ini menggambarkan keberhasilan dalam pemeliharaan ayam petelur yang efisien, serta tingginya permintaan terhadap daging ayam petelur sebagai sumber protein yang relatif terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, itik menunjukkan penurunan produksi dari 15.588 Kg pada 2019 menjadi 14.666 Kg pada 2020, dan terus menurun pada tahun berikutnya dengan 13.215,68 Kg pada 2021. Produksi itik sedikit meningkat menjadi 11.620,95 Kg pada 2022, dan diperkirakan akan sedikit naik pada 2023 menjadi 11.737,28 Kg. Penurunan produksi daging itik dapat disebabkan oleh berkurangnya permintaan pasar, kendala dalam pemeliharaan, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi industri itik di daerah ini. Meskipun demikian, itik tetap menjadi komoditas penting bagi sebagian masyarakat Berau, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging yang lebih beragam.

Secara keseluruhan, produksi daging unggas di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang positif pada ayam petelur, yang mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama periode lima tahun ini. Meskipun terdapat penurunan pada ayam kampung dan itik, keberhasilan dalam meningkatkan produksi ayam petelur memberikan harapan positif untuk pengembangan sektor unggas di Kabupaten Berau. Hal ini menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut dalam industri peternakan unggas, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan pemenuhan kebutuhan pasar yang terus berkembang.



Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan daging ternak unggas, ternyata juga terjadi pada kebutuhan daging ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi atau biasanya disebut sebagai ternak besar. Sektor peternakan ternak besar, termasuk di Kabupaten Berau, telah berkembang sejak lama sebagai bagian dari kegiatan agraris dan sumber daya alam. Peternakan, khususnya untuk komoditas daging, telah menjadi bagian penting dalam ekonomi Kabupaten Berau, yang didukung oleh faktor geografis dengan lahan luas untuk pemeliharaan ternak. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi daging ternak besar di Berau mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan pola konsumsi, kebijakan pemerintah terkait peternakan, serta perkembangan pasar daging baik di tingkat lokal maupun regional

Tabel 4.16.3 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Berau(Kg), 2019-2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi	742.301,00	614.346,00	595.863,00*	705.494,47	708.969,81
Kerbau	-	-	-	10.631,50	10.631,50
Kambing	44.718,00	37.305,00	27.602,00*	87.803,65	88.246,40
Domba	-	-	-	715,50	715,50
Itik	220.217,00	321.794,00	219.815,00*	263.774,68	265.123,09

Catatan : * angka sementara
 - Data tidak tersedia
 Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Berdasarkan Tabel 4.16.3 data produksi daging ternak di Kabupaten Berau antara 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang relatif positif, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa jenis ternak. Sapi menunjukkan penurunan produksi dari 742.301 kg pada 2019 menjadi 614.346 Kg pada 2020, yang bisa disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu distribusi dan pasokan daging ternak. Namun, pada 2021 terjadi penurunan lebih lanjut menjadi 595.863 Kg (angka sementara), yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti musim, kesehatan ternak, atau kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pengaturan distribusi ternak. Kembali terjadi peningkatan pada 2022 menjadi 705.494,47 Kg dan sedikit lebih tinggi pada 2023 dengan 708.969,81 Kg. Peningkatan produksi sapi pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan sektor peternakan sapi di Kabupaten Berau, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta peningkatan permintaan daging sapi.





Untuk kerbau, data tersedia mulai 2022 dengan produksi 10.631,50 Kg pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun produksi kerbau terbilang kecil dibandingkan dengan jenis ternak lain, ini menunjukkan adanya keberagaman dalam sektor peternakan di Berau dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam produksi daging kerbau. Pada kambing, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Produksi kambing turun dari 44.718 kg pada 2019 menjadi 37.305 kg pada 2020, namun melonjak tajam pada 2022 menjadi 87.803,65 kg dan bertahan stabil di 88.246,40 kg pada 2023. Peningkatan produksi kambing ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan atau perluasan usaha peternakan kambing di Berau, yang bisa jadi dipengaruhi oleh tren konsumsi daging kambing yang meningkat, baik di tingkat lokal maupun regional.

Produksi ternak Domba hanya tercatat pada 2022 dan 2023 dengan produksi 715,50 kg pada kedua tahun tersebut. Meskipun kecil, produksi daging domba ini menambah diversifikasi komoditas daging di Kabupaten Berau dan bisa berpotensi berkembang di masa mendatang. Untuk babi, produksi mengalami fluktuasi pada 2019-2021, dengan produksi 220.217 kg pada 2019, yang kemudian meningkat tajam pada 2020 menjadi 321.794 kg. Setelah itu, produksi daging babi menurun menjadi 219.815 kg pada 2021 (angka sementara), tetapi kembali meningkat pada 2022 menjadi 263.774,68 kg dan sedikit naik menjadi 265.123,09 kg pada 2023. Peningkatan produksi babi ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan daging babi, baik untuk konsumsi lokal maupun kebutuhan pasar yang lebih luas.

Dengan semakin meningkatnya jumlah produksi daging ternak besar di Kabupaten Berau, maka dapat menunjukkan dinamika yang positif. Peningkatan produksi daging kambing dan babi, serta masuknya komoditas kerbau dan domba, menandakan adanya potensi pertumbuhan dalam sektor peternakan Kabupaten Berau. Pemerintah dan peternak di daerah ini berpeluang untuk lebih mengoptimalkan potensi sektor peternakan sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah dan pemenuhan kebutuhan pangan.





4.17 Perikanan

Sektor perikanan tangkap di Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau, telah menjadi bagian integral dari mata pencaharian masyarakat pesisir sejak lama. Kabupaten Berau, yang terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, sehingga sektor perikanan menjadi salah satu sektor utama perekonomian masyarakat lokal. Perikanan telah lama menjadi bagian integral dari perekonomian lokal sejak zaman dahulu. Dengan wilayah pesisir yang luas dan kaya akan hasil laut, telah lama menjadi daerah penghasil ikan, udang, dan produk perikanan lainnya. Seiring waktu, produksi perikanan tangkap di daerah ini terus mengalami fluktuasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, teknologi, dan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang diterapkan oleh pemerintah. Produksi perikanan tangkap adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan di laut maupun perairan umum lainnya, yang dihitung dalam satuan ton. Produksi ini mencerminkan keberhasilan sektor perikanan dalam menyediakan sumber daya ikan untuk konsumsi manusia serta mendukung perekonomian daerah pesisir. Perikanan tangkap dibagi menjadi dua kategori utama: perikanan umum dan perikanan laut, masing-masing dengan spesifikasi dan dampak ekonomi yang berbeda.

Tabel 4.17.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Berau(Ton), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
a. Produksi Perikanan Umum	1.528,77	1.460,14	1.622,53	1.671,23	1.776,82
b. Produksi Perikanan Laut	20.529,49	18.988,84	21.779,62	22.618,82	12.164,26

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Berdasarkan Tabel 4.17.1 diketahui bahwa data produksi perikanan tangkap yang dibagi menjadi perikanan umum dan laut di Kabupaten Berau dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren positif yang mengindikasikan pertumbuhan sektor perikanan. Pada produksi perikanan umum, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 (1.460,14 ton), produksi kembali meningkat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Terlihat bahwa pada tahun 2021, jumlahnya naik menjadi 1.622,53 ton, kemudian terus meningkat menjadi 1.671,23 ton pada tahun 2022, dan mencapai 1.776,82 ton pada tahun 2023. Kenaikan produksi ini mencerminkan stabilitas dan peningkatan hasil perikanan umum, yang kemungkinan dipengaruhi oleh optimasi teknik penangkapan ikan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan sumber daya laut.



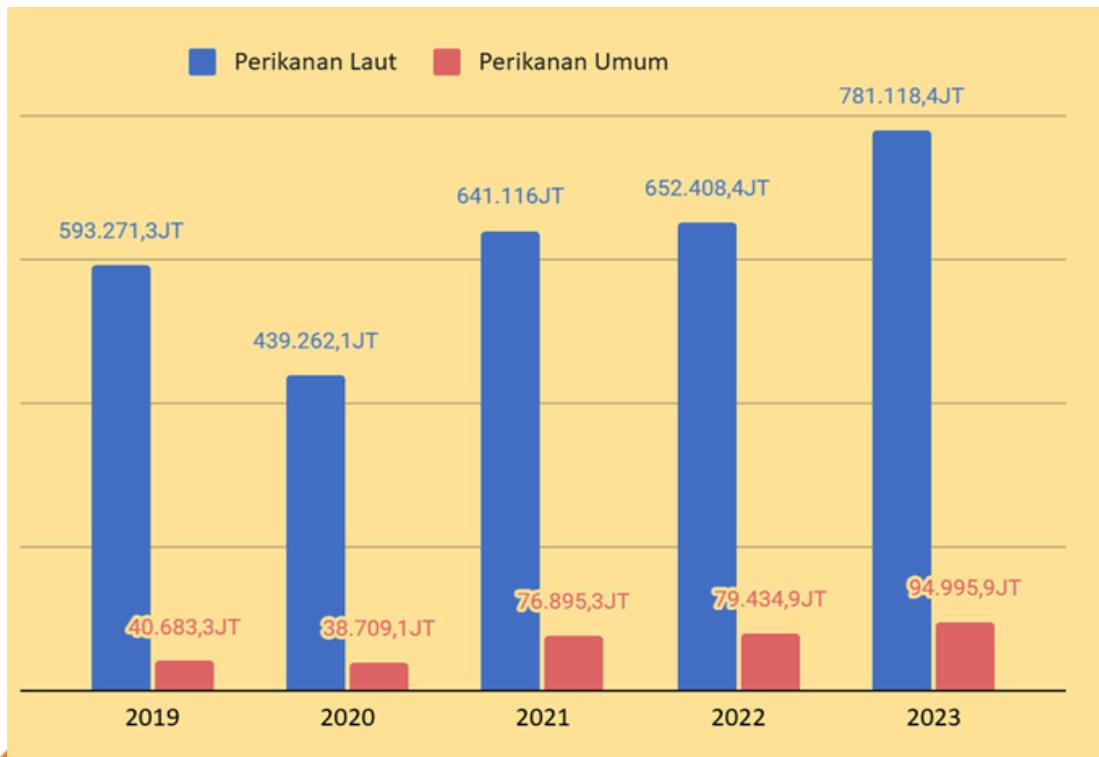


Sementara itu, produksi perikanan laut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 20.529,49 ton pada tahun 2019 menjadi 23.164,26 ton pada tahun 2023. Peningkatan ini tercatat stabil setiap tahunnya, dengan lonjakan dari 18.988,84 ton pada tahun 2020 menjadi 21.779,62 ton pada tahun 2021, dan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan yang konsisten dalam produksi perikanan laut ini menunjukkan keberhasilan sektor perikanan Kabupaten Berau dalam memanfaatkan potensi sumber daya lautnya, selain itu dengan adanya dorongan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan daya tampung Tempat Pengelolaan Ikan (TPI), peningkatan armada kapal penangkap ikan, serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Berau mencerminkan tren pertumbuhan yang menggembirakan, baik pada sektor perikanan umum maupun perikanan laut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Berau semakin berkembang, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis produk laut.

Peningkatan produksi hasil tangkapan, diharapkan seiring dengan peningkatan nilai hasil produksi perikananannya. Namun demikian besaran harga pada hasil laut ini atau nilai produksi perikananannya berfluktuasi tergantung pada faktor-faktor seperti musim tangkapan, kebijakan perikanan, dan kondisi lingkungan, yang berpengaruh pada hasil produksi setiap tahunnya

Gambar 4.17.1 Jumlah Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Berau(Rupiah), 2019-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Berau



Nilai produksi perikanan adalah jumlah total pendapatan atau hasil yang diperoleh dari sektor perikanan dalam suatu periode tertentu, yang dihitung dalam satuan mata uang (Rupiah). Nilai produksi ini mencakup hasil tangkapan ikan dan produk perikanan lainnya, baik yang berasal dari perikanan umum maupun perikanan laut. Sektor perikanan menjadi bagian penting dalam perekonomian Kabupaten Berau, mengingat daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Gambar 4.17.1 terlihat bahwa nilai produksi perikanan di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada kedua kategori perikanan, yaitu perikanan umum dan perikanan laut. Pada perikanan umum, nilai produksi pada tahun 2019 tercatat sebesar 40,68 miliar rupiah, kemudian menurun sedikit pada tahun 2020 menjadi 38,71 miliar rupiah, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas perikanan dan distribusi pasar. Namun, pada tahun 2021, nilai produksi perikanan umum meningkat tajam menjadi 76,89 miliar rupiah, dan terus naik pada tahun 2022 menjadi 79,43 miliar rupiah, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 94,99 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan yang pesat dalam sektor perikanan umum, yang mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta peningkatan permintaan baik di pasar domestik maupun ekspor.

Sementara itu, pada perikanan laut, nilai produksi juga mengalami fluktuasi yang positif meskipun lebih besar nilainya dibandingkan dengan perikanan umum. Pada tahun 2019, nilai produksi perikanan laut tercatat sebesar 593,27 miliar rupiah, dan meskipun terjadi penurunan pada 2020 menjadi 439,26 miliar rupiah, sektor ini kembali pulih dan meningkat tajam pada 2021 menjadi 641,12 miliar rupiah. Peningkatan ini berlanjut pada 2022 dengan nilai produksi mencapai 652,41 miliar rupiah dan semakin meningkat pada 2023 menjadi 781,12 miliar rupiah. Lonjakan nilai ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor perikanan laut, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keberhasilan program pengelolaan sumber daya laut, peningkatan teknologi perikanan, serta meningkatnya permintaan terhadap produk laut dari Kabupaten Berau, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Kenaikan yang signifikan dalam sektor perikanan laut mencerminkan pentingnya potensi kelautan Kabupaten Berau dalam mendukung perekonomian daerah, sementara peningkatan pada perikanan umum menunjukkan keberlanjutan dan diversifikasi sektor perikanan lokal.

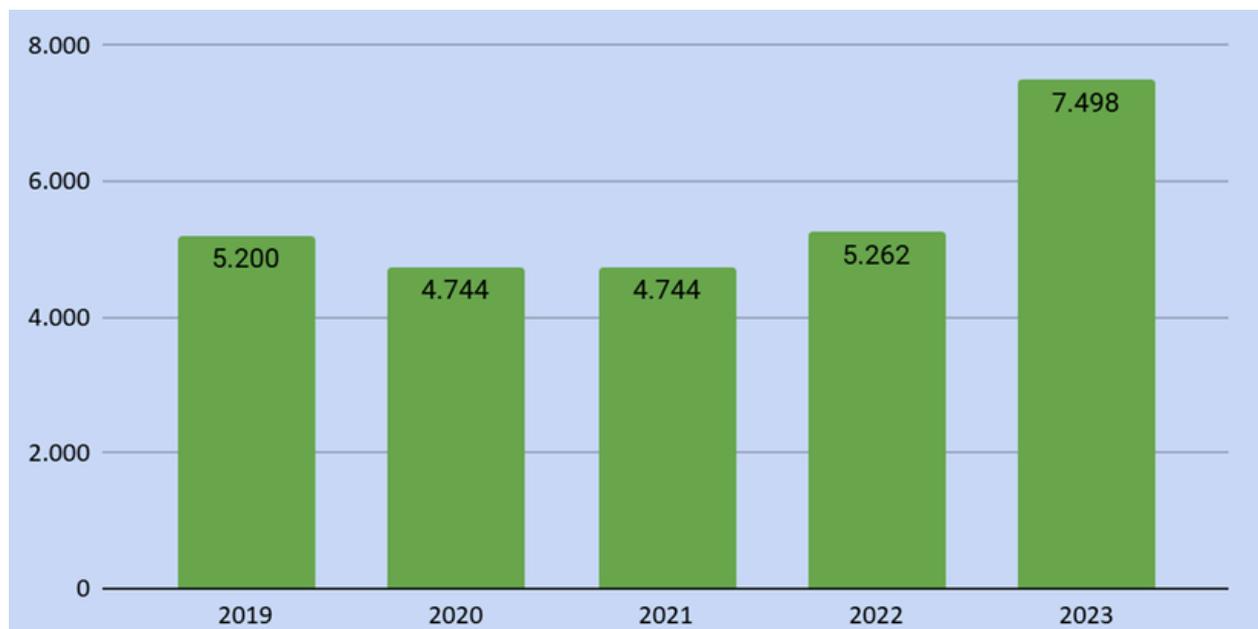
Komponen utama yang ada di sektor perikanan adalah nelayan. Dikarenakan besar kecilnya produksi perikanan dan nilainya sangat tergantung kepada banyaknya nelayan melakukan kegiatan menangkap ikan. Ketika kebutuhan ikan cukup besar, namun nelayan yang bepergian ke laut untuk melakukan kegiatan penangkapan sedikit, maka tingkat kebutuhan tersebut tidak akan mampu untuk dipenuhi, begitu juga di Kabupaten Berau.

Sebagai daerah yang terletak di pesisir timur Kalimantan, memiliki potensi laut yang melimpah dan menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional dan komersial. Maka kegiatan perikanan masih menjadi mata pencarian andalan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tersebut menjadi nelayan.



Jumlah nelayan dapat mencerminkan kesehatan sektor perikanan, serta dampak dari kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan permintaan pasar terhadap hasil laut. Namun demikian seiring dengan perkembangan teknologi, jumlah nelayan yang terlibat dalam sektor perikanan terus mengalami perubahan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah terkait perikanan, serta perubahan kondisi alam dan ekosistem laut.

Gambar 4.17.2 Jumlah Nelayan di Kabupaten Berau, 2019 - 2023



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar 4.17.2 memperlihatkan perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga 2023, dimana terlihat fluktuasi yang cukup signifikan, yang mencerminkan dinamika sektor perikanan di Kabupaten Berau. Pada tahun 2019, jumlah nelayan tercatat sebesar 5.200 orang. Namun, pada 2020 terjadi penurunan menjadi 4.744 orang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, yang menghambat aktivitas perikanan sehingga mengurangi permintaan, atau menyebabkan penurunan pendapatan nelayan.

Meskipun jumlah nelayan tetap stabil pada angka 4.744 orang pada 2021, terjadi peningkatan yang signifikan pada 2022, mencapai 5.262 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sektor perikanan, mungkin akibat pemulihan ekonomi setelah pandemi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hasil laut. Selanjutnya, pada 2023, jumlah nelayan melonjak drastis menjadi 7.498 orang, yang mencerminkan lonjakan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam sektor perikanan. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembukaan lapangan kerja baru, keberhasilan program pemerintah untuk mendukung nelayan, atau pertumbuhan sektor ekspor hasil laut yang meningkat. Peningkatan jumlah nelayan juga mencerminkan adanya potensi pertumbuhan yang positif di sektor ini, meskipun tantangan seperti perubahan iklim, kebijakan kelautan, dan masalah lingkungan masih dapat mempengaruhi keberlanjutan sektor perikanan Kabupaten Berau di masa depan.



4.18 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan dianggap sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sebagai pengganti Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Pembangunan pangan memiliki permasalahan dan tantangan yang besar. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan semakin terbatas karena adanya kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain. Selain itu, perubahan iklim global memiliki dampak semakin besar resiko gagal panen. Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, volume permintaan pangan meningkat secara berkelanjutan. Faktor lainnya, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan dan gizi meningkatkan permintaan pangan dari sisi keragaman, gizi, dan keamanan pangan.

Oleh karena itu, pembangunan pangan dan pencapaian ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang sangat penting, sebagai bagian dari pembangunan SDM berkualitas. Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman.

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan intelegensi manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.





Gambar 4.18.1 Pola Pangan Harapan di Kabupaten Berau



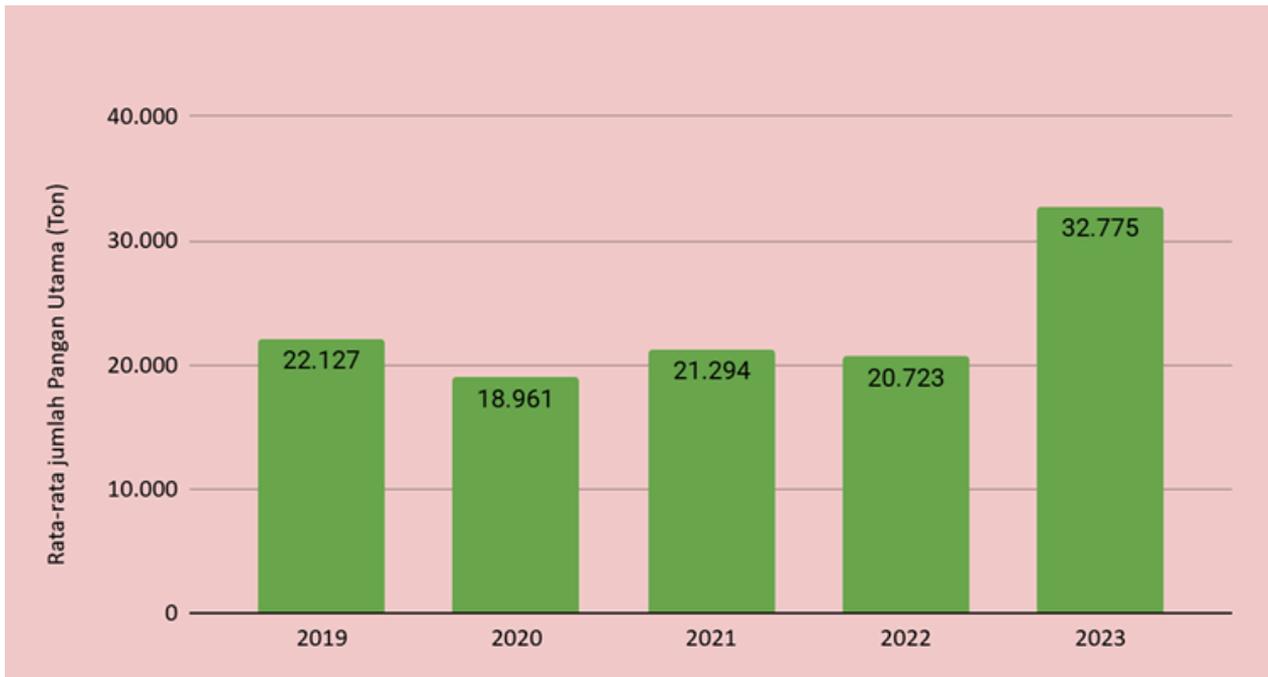
Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Berau

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberagaman dan kecukupan konsumsi pangan di suatu wilayah. PPH menggambarkan pola makan yang mencakup komponen pangan pokok yang ideal dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Berdasarkan data dari gambar 4.18.1, Pola Pangan Harapan di Kabupaten Berau menunjukkan angka yang relatif stabil namun mengalami sedikit fluktuasi selama lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2019, PPH tercatat sebesar 86,40, dan mengalami sedikit peningkatan pada 2020 menjadi 87,30. Namun, pada tahun 2021 PPH menurun menjadi 84,00, yang dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan konsumsi pangan. Meskipun demikian, PPH kembali menunjukkan tren positif pada 2022 dengan angka 89,50, dimana mencerminkan peningkatan keberagaman dan kecukupan pangan di Kabupaten Berau. Pada tahun 2023, angka PPH sedikit menurun menjadi 86,90, namun demikian masih tetap menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi bagi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, data ini mencerminkan komitmen Kabupaten Berau dalam memperbaiki pola pangan yang beragam dan menjamin keberagaman konsumsi pangan yang sehat bagi warganya.



Gambar 4.18.2 Rata-Rata Jumlah Pangan Utama per Tahun di Kabupaten Berau (Ton), 2019-2023

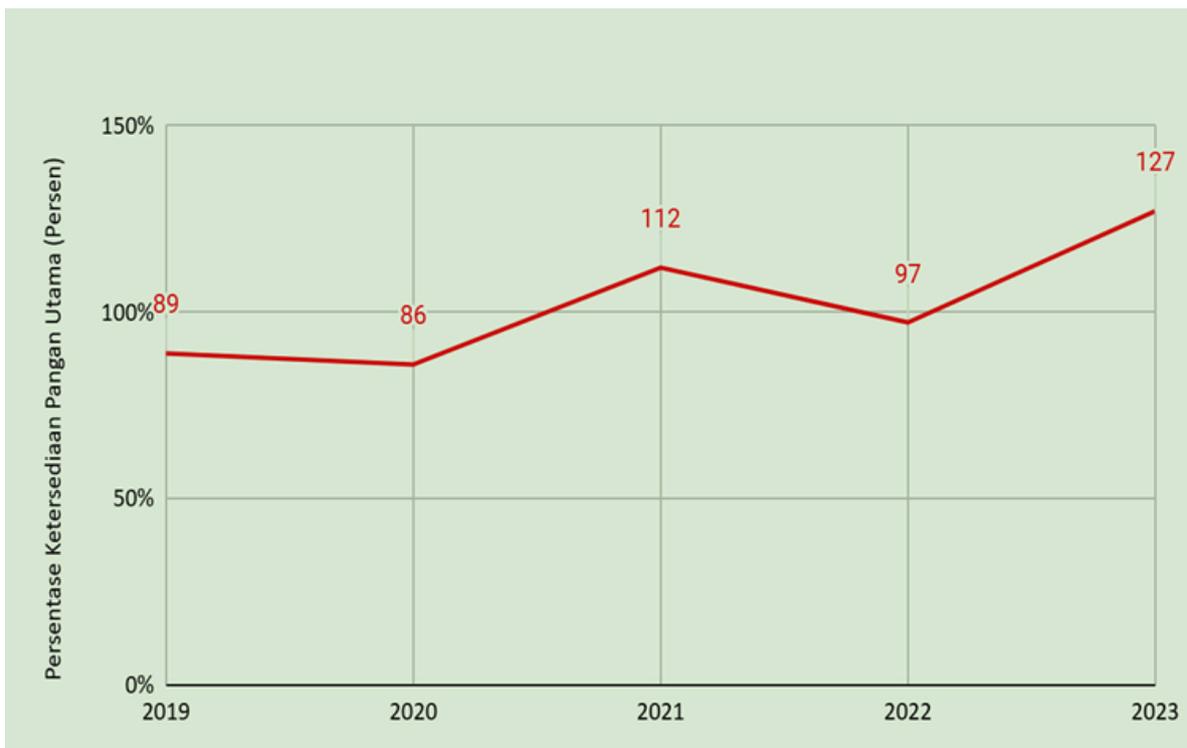


Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Berau

Rata-rata jumlah pangan utama merupakan indikator yang mengukur total produksi pangan utama seperti beras, jagung, atau komoditas pokok lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu wilayah selama satu tahun. Berdasarkan Gambar 4.18.2, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah pangan utama di Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, jumlah pangan utama tercatat sebesar 22.127 ton, yang kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 18.961 ton. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca atau pergeseran pola konsumsi. Pada tahun 2021, jumlah pangan utama kembali meningkat menjadi 21.294 ton, yang menunjukkan adanya pemulihan produksi atau peningkatan konsumsi pangan. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 20.723 ton, tren positif terlihat pada tahun 2023 dengan lonjakan signifikan mencapai 32.775 ton. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan produksi pangan utama atau keberhasilan dalam sistem distribusi dan ketahanan pangan di Kabupaten Berau. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan upaya yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas produksi pangan utama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau.



Gambar 4.18.3 Persentase Ketersediaan pangan Utama di Kabupaten Berau, 2019-2023



Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Berau

Persentase Ketersediaan Pangan Utama adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana ketersediaan pangan utama di suatu daerah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Nilai persentase ini menunjukkan perbandingan antara produksi pangan utama dengan jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan. Berdasarkan data pada Gambar 4.18.3, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Berau mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, persentase ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 89 persen, yang menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020, angka ini menurun menjadi 86 persen yang mungkin disebabkan oleh berbagai tantangan dalam produksi atau distribusi pangan. Namun, pada tahun 2021, persentase ketersediaan pangan utama melonjak tajam menjadi 112 persen, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tren positif ini berlanjut pada 2022 dengan persentase 97,30 persen, yang meskipun sedikit menurun, masih menunjukkan kecukupan pangan yang baik. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan angka 127,19 persen, yang mencerminkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan produksi atau distribusi pangan utama, bahkan melebihi kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan utama secara berkelanjutan, dengan ketersediaan yang semakin mencukupi kebutuhan masyarakat.



Tabel 4.18.4 Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Rawan Pangan	-	-	35	33	22

Keterangan : - Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Berau

Jumlah Desa Rawan Pangan merupakan indikator yang menggambarkan jumlah desa di suatu wilayah yang mengalami ketidakcukupan atau kerawanan pangan, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun kualitas pangan. Data pada Tabel 4.18.4 menunjukkan perubahan jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Berau dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, tercatat ada 35 desa yang tergolong rawan pangan, yang menandakan adanya tantangan dalam mencapai ketahanan pangan di wilayah tersebut. Angka ini sedikit menurun pada 2022 menjadi 33 desa, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam mengatasi kerawanan pangan. Pada 2023, jumlah desa rawan pangan menurun signifikan menjadi 22 desa, yang mencerminkan peningkatan yang cukup pesat dalam ketahanan pangan di Kabupaten Berau. Meskipun data untuk tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia, namun tren penurunan jumlah desa rawan pangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Berau berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.





4.19 Perhubungan

Uji KIR (Kendaraan Bermotor Umum) adalah proses pemeriksaan kendaraan angkutan umum untuk memastikan kelayakan dan keamanan operasional kendaraan. Pemeriksaan meliputi aspek teknis seperti sistem rem, emisi gas buang, lampu, dan kondisi fisik kendaraan. Uji KIR ini dilaksanakan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan, dan memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tabel 4.19.1 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Berau (unit), 2020-2023

Kendaraan	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang Umum	61	18	22	28
Mobil Bus	310	154	288	406
Truck	1.227	340	725	677
Pick Up < 2,500 cc	127	226	505	399
Pick Up >= 2,500 cc	1.797	398	958	1.081

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

Data jumlah uji KIR di Kabupaten Berau selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai jenis kendaraan. Perubahan angka ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola mobilitas masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.19.1 pada tahun 2020, jumlah uji KIR untuk mobil penumpang umum tercatat 61 unit. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis menjadi hanya 18 unit. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang mengurangi aktivitas kendaraan angkutan umum karena pembatasan sosial dan penurunan permintaan transportasi publik. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya permintaan transportasi publik, jumlah uji KIR mobil penumpang umum meningkat sedikit menjadi 22 unit pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 28 unit pada 2023.

Produksi uji KIR untuk mobil bus menunjukkan tren yang positif selama periode ini. Pada tahun 2020, jumlah uji KIR bus tercatat 310 unit, yang kemudian turun menjadi 154 unit pada 2021. Meski demikian, jumlah uji KIR meningkat pesat menjadi 288 unit pada 2022 dan mencapai 406 unit pada 2023. Peningkatan jumlah bus yang diuji KIR ini menunjukkan adanya pertumbuhan armada bus, baik untuk transportasi antar kota maupun dalam kota, seiring dengan peningkatan kebutuhan transportasi massal di Kabupaten Berau.



Pada kendaraan jenis truck, terjadi fluktuasi yang signifikan selama periode ini. Pada tahun 2020, jumlah uji KIR truck tercatat 1.227 unit. Angka ini mengalami penurunan pada 2021 menjadi 340 unit, namun kemudian meningkat tajam menjadi 725 unit pada 2022. Pada 2023, jumlah uji KIR untuk truck sedikit menurun menjadi 677 unit. Peningkatan jumlah truck pada 2022 dapat dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dalam sektor pengangkutan barang, sementara penurunan pada 2023 mungkin terkait dengan perubahan kebutuhan di sektor industri dan distribusi barang.

Untuk kendaraan jenis pick up dengan kapasitas < 2.500 cc, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah uji KIR. Pada 2021, tercatat 226 unit, yang kemudian meningkat pesat menjadi 505 unit pada 2022. Pada 2023, jumlah ini sedikit menurun menjadi 399 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kendaraan jenis pick up berkapasitas kecil semakin banyak digunakan, terutama di sektor perdagangan dan logistik.

Pick up dengan kapasitas lebih dari 2.500 cc menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2021, jumlah uji KIR tercatat 398 unit, dan jumlah ini terus meningkat menjadi 958 unit pada 2022, dan kemudian mencapai 1.081 unit pada 2023. Peningkatan yang pesat ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang terus berkembang untuk kendaraan niaga berkapasitas besar, yang digunakan di sektor perdagangan, distribusi barang, dan logistik di Kabupaten Berau.

Secara keseluruhan, data uji KIR di Kabupaten Berau antara 2020 hingga 2023 mencerminkan tren positif dalam pemulihan dan pertumbuhan sektor transportasi, terutama kendaraan niaga seperti mobil bus dan pick up. Fluktuasi jumlah uji KIR pada berbagai jenis kendaraan mencerminkan dinamika kebutuhan transportasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi dan perubahan pola ekonomi serta mobilitas masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan yang diuji KIR, khususnya untuk bus dan pick up, menunjukkan adanya pemulihan dan ekspansi sektor transportasi yang sehat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau.

Sejarah prasarana lalu lintas di Indonesia, termasuk Kabupaten Berau, dimulai dengan pengembangan jalan raya yang bertujuan untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana lalu lintas, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kompleksitas mobilitas. Data prasarana lalu lintas menunjukkan perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan berkendara, serta mengurangi risiko kecelakaan. Untuk Kabupaten Berau antara tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan beberapa tren yang stabil dan ada pula perubahan signifikan dalam elemen-elemen tertentu. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tetap konsisten dengan jumlah 12 unit sepanjang periode tersebut, menandakan bahwa tidak ada perluasan atau pengurangan dalam penggunaan APILL di kabupaten ini, yang berarti sistem pengaturan lalu lintas pada persimpangan utama tetap stabil.



Tabel 4.19.1 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Berau (unit), 2020-2023

Kendaraan	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
APILL	12	12	12	12	12	Unit
Rambu	4.192	4.192	4.192	4.267	4.487	Buah
RPPJ	16	16	16	16	16	Buah
Pita Penggaduh	540	540	540	407,16	839,16	(m2)
Flashing Lamp	1	1	1	1	1	Unit
Paku Jalan	0	0	0	0	0	(buah)
LPJU	2.044	2.044	2.057	2.390	3.362	Tiang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

Prasarana lalu lintas adalah infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Ini meliputi berbagai elemen seperti alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan umum (LPJU), pita penggaduh, dan perangkat lainnya yang dirancang untuk mengatur dan memperingatkan pengendara. Prasarana ini penting untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan aman.

Berdasarkan Tabel 4.19.2 menunjukkan bahwa jumlah rambu lalu lintas juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yaitu sebanyak 4.192 buah pada tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 4.487 buah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan rambu di beberapa titik, yang berfungsi untuk memperbaiki pengaturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan. Sementara itu, Rambu Pemberi Petunjuk Jalan (RPPJ) tetap stabil sebanyak 16 buah sepanjang lima tahun tersebut, yang mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam penambahan atau perubahan rambu ini.

Pada elemen pita penggaduh, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pita penggaduh yang digunakan untuk memperingatkan pengendara di beberapa ruas jalan tetap sebesar 540 m² selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, namun menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 407,16 m², sebelum akhirnya meningkat tajam pada 2023 menjadi sebesar 839,16 m². Fluktuasi ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan kondisi jalan atau proyek pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mempengaruhi kebutuhan penggunaan pita penggaduh.



Untuk prasarana lalu lintas jenis flashing lamp, yang berfungsi memberikan peringatan atau tanda bahaya di jalan raya, tetap stabil sebanyak 1 unit sepanjang periode tersebut, menunjukkan bahwa perangkat ini tidak banyak mengalami perubahan. Sebaliknya, paku jalan, yang sebelumnya mungkin digunakan untuk menandai batas jalan atau memberikan peringatan, tetapi tidak digunakan lagi sepanjang lima tahun ini, dengan jumlah 0 buah, yang menunjukkan bahwa paku jalan tidak lagi menjadi bagian dari prasarana lalu lintas di Kabupaten Berau.

Terakhir, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) mengalami peningkatan signifikan, dari 2.044 tiang pada tahun 2019 menjadi 3.362 tiang pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem penerangan di jalan raya yang penting untuk meningkatkan keselamatan pengendara, terutama pada malam hari atau di kawasan yang kurang terang.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau terus berupaya dengan konsisten dan serius dalam meningkatkan fasilitas pendukung transportasi, dengan penambahan pada rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum. Sementara itu, beberapa elemen seperti pita penghaduh dan APILL tetap stabil, mencerminkan pengelolaan yang terarah. Melalui Peningkatan LPJU ini maka dapat juga mencerminkan perhatian Pemerintah Kabupaten Berau terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara, terutama dalam kondisi gelap.





4.20 Perpustakaan

Perpustakaan adalah fasilitas yang menyediakan koleksi bahan bacaan, baik cetak maupun digital, untuk mendukung atau menunjang kebutuhan pendidikan, penelitian, serta hiburan masyarakat. Di Kabupaten Berau, keberadaan perpustakaan sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan fasilitas perpustakaan yang memadai seperti ruang baca nyaman, akses internet, serta koleksi buku yang beragam, dapat menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dan ramah untuk semua kalangan masyarakat. Di perpustakaan, pelayanan yang diberikan meliputi peminjaman buku, akses bahan digital, penyelenggaraan kegiatan literasi seperti diskusi buku dan pelatihan, hingga dukungan informasi untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Data dan informasi mengenai perpustakaan dapat diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau disingkat DISPUSIP, memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas generasi melalui budaya membaca. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan dan arsip, dinas tersebut menyediakan akses luas terhadap informasi dan literatur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan beberapa program-program yang dilakukan seperti pengembangan perpustakaan keliling, promosi gemar membaca, pelatihan literasi informasi, hingga penyediaan koleksi buku yang mendukung pendidikan. Sehingga perpustakaan dapat dirasakan dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dengan demikian kemudahan mengakses perpustakaan di Kabupaten Berau dapat menciptakan generasi yang gemar membaca sehingga melahirkan anak bangsa yang lebih cerdas dan berdaya saing.

Perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Berau ditunjukkan dari Tabel 4.20.1 dengan periode dari tahun 2021 hingga 2023. Pada jumlah perpustakaan umum kabupaten, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa/kelurahan tidak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. Untuk jumlah perpustakaan umum di Kabupaten Berau terdapat 1 unit. Selanjutnya pada tahun 2023, perpustakaan umum kecamatan terdapat sebanyak 13 unit yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Untuk jumlah perpustakaan umum desa/kelurahan sebanyak 110 unit yang tersebar di 110 desa/kelurahan di Kabupaten Berau. Selain itu, terdapat mobil perpustakaan keliling sebanyak 3 unit, yang tidak mengalami perubahan juga selama tiga tahun terakhir.



Selain perpustakaan untuk masyarakat umum, terdapat data mengenai jumlah perpustakaan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi di Kabupaten Berau dari tahun 2021 sampai 2023. Perkembangan jumlah perpustakaan untuk setiap sekolah mengalami penambahan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah perpustakaan SD/ sederajat mengalami penambahan sebesar 116 unit dari tahun 2021, sehingga menjadi 172 unit di tahun 2022. Penambahan unit juga terjadi pada perpustakaan SLTP/ sederajat sejumlah 27 unit dari tahun 2021, dan di tahun 2022 menjadi 66 unit. Pada perpustakaan SLTA/ sederajat di tahun 2022 terdapat sebanyak 34 unit, di mana terjadi penambahan sejumlah 9 unit dari tahun sebelumnya yang sebesar 25 unit. Kemudian untuk tahun 2023, perpustakaan SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, dan SLTA/ sederajat tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, perpustakaan perguruan tinggi mengalami pengurangan unit. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 5 unit, berkurang 1 unit sehingga di tahun 2022 terdapat sebanyak 4 unit yang aktif beroperasi memberikan pelayanan. Kemudian, pada tahun 2023 masih sebesar 4 unit perpustakaan jenjang perguruan tinggi.

Tabel 4.20.1 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten	1	1	1
Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan	13	13	13
Jumlah Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	110	110	110
Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling	3	3	3
Jumlah Perpustakaan SD/ Sederajat	56	172	172
Jumlah Perpustakaan SLTP/ Sederajat	39	66	66
Jumlah Perpustakaan SLTA/ Sederajat	25	34	34
Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	5	4	4

Sumber : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Berau

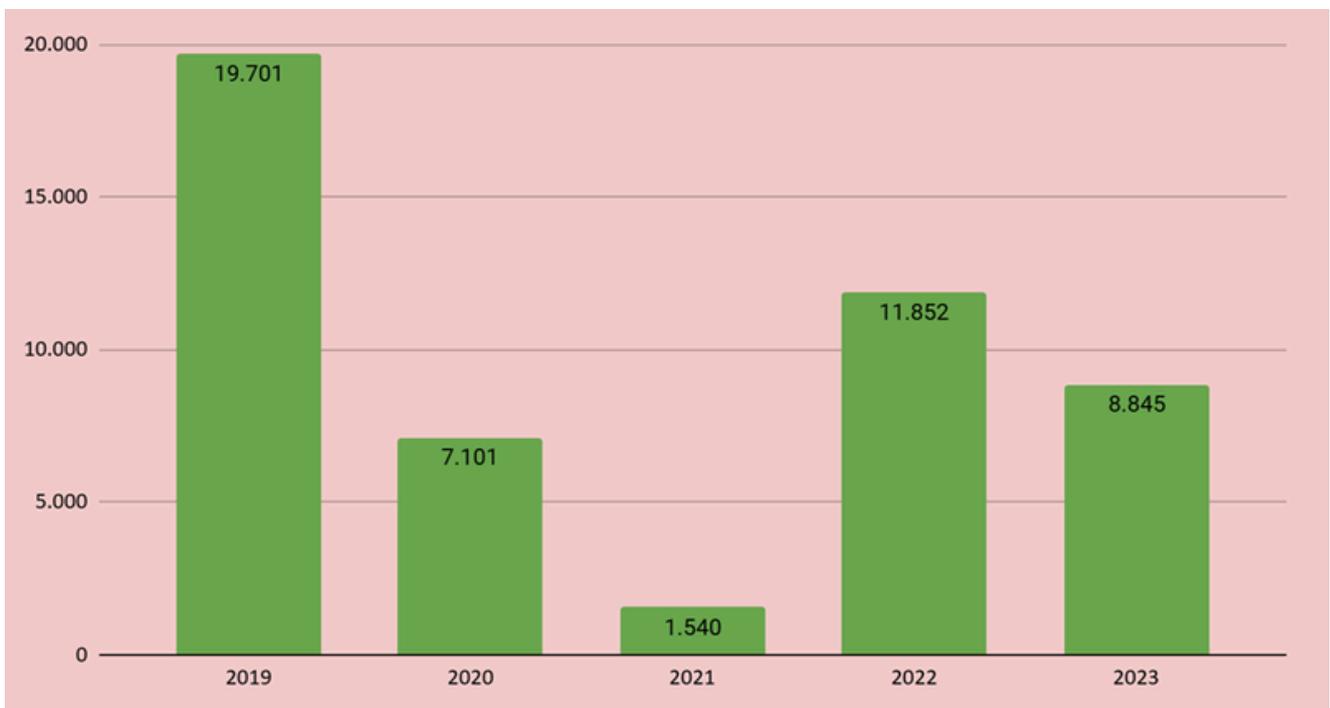
Peningkatan jumlah perpustakaan dari tahun sebelumnya membawa dampak positif yang signifikan bagi kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Bertambahnya perpustakaan dapat memperluas akses siswa terhadap bahan bacaan yang mendukung proses pembelajaran, meningkatkan minat baca, dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan. Hal tersebut berpotensi menciptakan generasi muda yang lebih kreatif, inovatif, dan kompetitif. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan jumlah perpustakaan di masa mendatang menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan literat.





Terjadinya peningkatan jumlah perpustakaan di Kabupaten Berau pada tahun sebelumnya juga secara langsung berkaitan dengan tren kunjungan ke perpustakaan dari tahun ke tahun. Dengan bertambahnya perpustakaan, diharapkan semakin banyak masyarakat, terutama pelajar, yang memiliki kesempatan untuk mengakses bahan bacaan dan layanan literasi yang memadai. Namun, meskipun jumlah perpustakaan meningkat, tren kunjungan ke perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh tingkat minat baca masyarakat dan program promosi yang dijalankan. Analisis terhadap data kunjungan perpustakaan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas keberadaan perpustakaan dalam meningkatkan aktivitas literasi di Kabupaten Berau.

Gambar 4.20.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Berau, 2019 - 2023



Sumber : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Berau



Jumlah pengunjung perpustakaan adalah indikator yang menunjukkan banyaknya individu yang mengakses layanan perpustakaan dalam periode tertentu. Pengunjung ini meliputi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum, yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk kegiatan membaca, belajar, atau mencari informasi. Angka pengunjung mencerminkan minat masyarakat terhadap literasi dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau, memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran informasi dan literasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan sistem pendidikan, perpustakaan berperan penting dalam mendukung pendidikan masyarakat. Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Berau pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung tercatat cukup tinggi, yakni 19.701 orang, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis menjadi 7.101 orang, seiring dengan diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi yang membatasi operasional perpustakaan. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2021, dengan hanya tercatat 1.540 pengunjung, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembatasan yang lebih ketat dan penutupan sebagian besar layanan publik. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung kembali meningkat menjadi 11.852 orang, menandakan pemulihan setelah pandemi, dengan pelonggaran pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembukaan kembali fasilitas umum. Namun, pada tahun 2023, jumlah pengunjung kembali turun menjadi 8.845 orang, yang menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan, pengunjung perpustakaan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan baru dalam mengakses informasi melalui media digital, atau kurangnya program-program menarik di perpustakaan yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Secara keseluruhan, meskipun terjadi pemulihan pasca-pandemi, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Berau masih menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat yang lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.





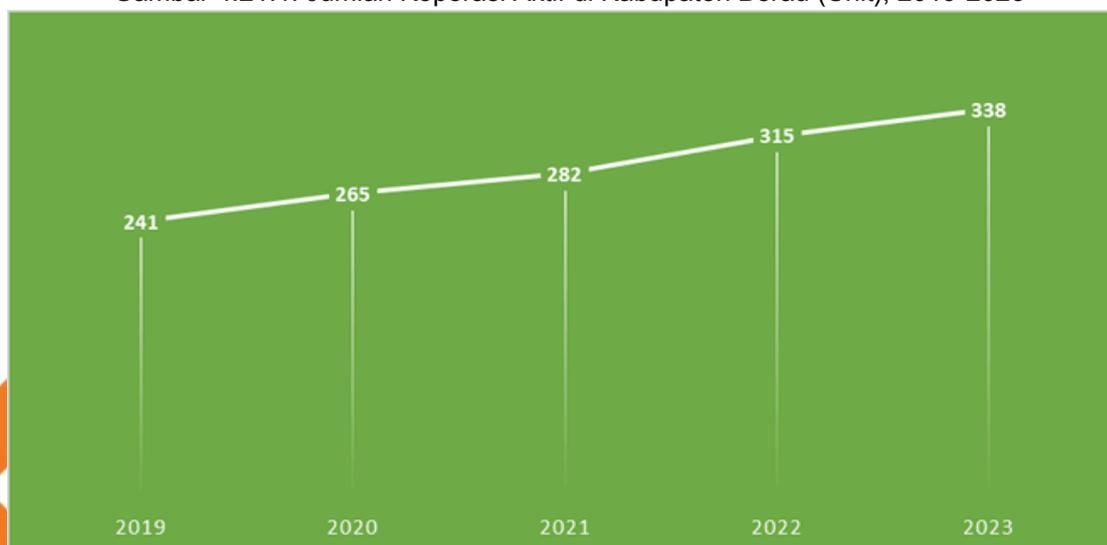
4.21 Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Badan hukum ini dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Menurut UU No. 25 / 1992, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Pentingnya peran Koperasi bagi keberlangsungan perekonomian sosial sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 Pasal 33, menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga memajukan sektor ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Salah satu contoh kontribusi koperasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kabupaten Berau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah berupaya agar koperasi yang ada di Kabupaten Berau dapat berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Berbagai program telah dilaksanakan agar koperasi yang ada tetap berjalan dan memiliki kegiatan rutin sehingga dapat memberdayakan anggotanya, selain itu koperasi yang ada juga dilakukan modernisasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, koperasi-koperasi yang ada mampu menyesuaikan diri dengan kondisi digitalisasi dan mampu bertahan. Untuk menunjukkan eksistensi koperasi salah satunya adalah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), melalui RAT maka dapat diketahui juga koperasi yang memiliki laporan keuangan yang baik.

Gambar 4.21.1. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Berau (Unit), 2019-2023



Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau



Selain itu melalui RAT juga dapat diketahui jumlah koperasi yang masih tetap berjalan dan aktif. Selama kurun waktu lima tahun terlihat perkembangan koperasi, dimana terdapat peningkatan jumlah unit koperasi aktif. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 241 koperasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi sebanyak 265 unit koperasi. Pada tahun 2021, jumlah unit koperasi aktif di Kabupaten Berau meningkat mejadi sebanyak 282 unit koperasi aktif. Pada tahun 2022, jumlah unit koperasi aktif di Kabupaten Berau mengalami peningkatan menjadi sebanyak 315 unit koperasi dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 338 unit koperasi. Apabila dilihat berdasarkan jenisnya, terdapat sebanyak 171 unit koperasi produksi, 27 unit koperasi pemasaran, 96 unit koperasi konsumen, 34 unit koperasi jasa, dan 10 unit koperasi simpan pinjam.

A. Industri

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang dikelompokkan berdasarkan skala ekonomi, ditentukan oleh jumlah aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

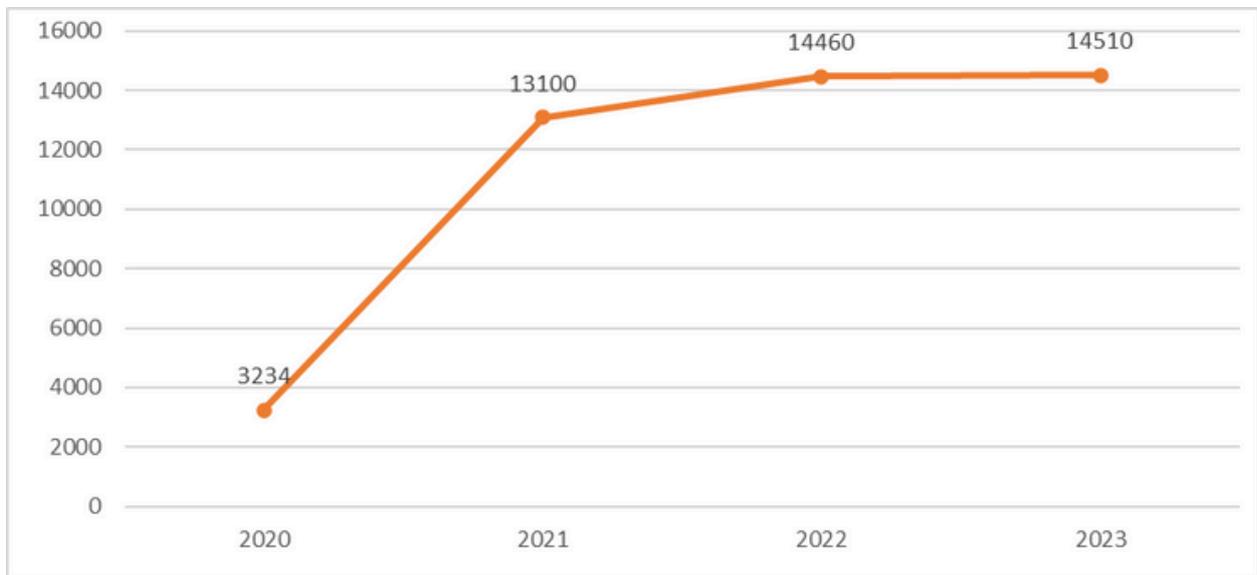
1. Usaha Mikro: Usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun.
2. Usaha Kecil: Usaha produktif dengan aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.
3. Usaha Menengah: Usaha produktif dengan aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

UMKM mencakup berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa. Dalam perkembangannya, UMKM sering menjadi tulang punggung ekonomi karena kontribusinya dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), mendistribusikan pendapatan, serta memberdayakan masyarakat lokal.

Kabupaten Berau sebagai kabupaten yang juga menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor yang terus digiatkan karena kontribusinya UMKM dalam peningkatan perekonomian daerah cukup besar. Maka sejumlah program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM direncanakan dan di laksanakan, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk hingga fasilitasi akses ke jaringan pemasaran. Dimana pemerintah akan terus mendampingi UMKM dalam menyiapkan produk yang layak bersaing di pasar swalayan dan waralaba, serta memberikan kemudahan dalam regulasi untuk mempercepat proses kemitraan UMKM dengan pihak manapun. Melalui program yang diluncurkan pemerintah, maka diharapkan UMKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Berau.



Gambar 4.21.2. Jumlah UMKM di Kabupaten Berau (Unit), 2020-2023



Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau

Perkembangan UMKM di Kabupaten Berau pada tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 3.234 UMKM yang tersebar di Kabupaten Berau. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dimana jumlah UMKM meningkat hingga menjadi 305 persen dari 3.234 usaha menjadi 13.100 usaha UMKM. Pada tahun 2022, terjadi lagi peningkatan menjadi 14.460 usaha. Kemudian meningkat walau tidak begitu banyak di tahun 2023, yaitu menjadi 14.510 usaha.

Tabel 4.21.1. Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha (Unit), 2019-2024

Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usaha Mikro	...	3.091	12.797	14.157	14.206
Usaha Kecil	...	143	289	289	288
Usaha Menengah	...	0	14	14	16

Catatan : ... Data tidak tersedia

Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau





Apabila dilihat berdasarkan skalanya, mayoritas UMKM di Kabupaten Berau adalah usaha mikro. Hal ini terlihat dari jumlah usahanya yang berjumlah 14.206 usaha. Selain itu, usaha mikro merupakan usaha yang memiliki perkembangan signifikan dari tahun 2020 yang ada sebanyak 3.091 usaha. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dimana jumlah usaha mikro tersebut meningkat menjadi 12.797 usaha. Kemudian meningkat lagi menjadi sebanyak 14.157 usaha dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi sebanyak 14.206 usaha.

Selain usaha mikro, usaha kecil dan menengah juga berkembang di Kabupaten Berau. Pada tahun 2020, jumlah usaha kecil di Kabupaten Berau ada sebanyak 143 usaha. Usaha kecil mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 dimana pada tahun tersebut terjadi peningkatan lebih dari 100 persen menjadi 289 usaha. Jumlah usaha tersebut bertahan di tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023, jumlah usaha kecil mengalami penurunan menjadi 288 usaha. Untuk usaha menengah yang ada di Kabupaten Berau selama tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dimana pada tahun 2021, jumlah usaha menengah di Kabupaten Berau ada sebanyak 14 usaha, jumlah ini bertahan pada tahun 2022, yang mana kemudian hanya meningkat 2 usaha di tahun 2023 menjadi 16 usaha.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai sektor usaha yang mendominasi jumlah unit usaha di banyak negara, UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi tetapi juga pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa manfaat UMKM diantaranya adalah:

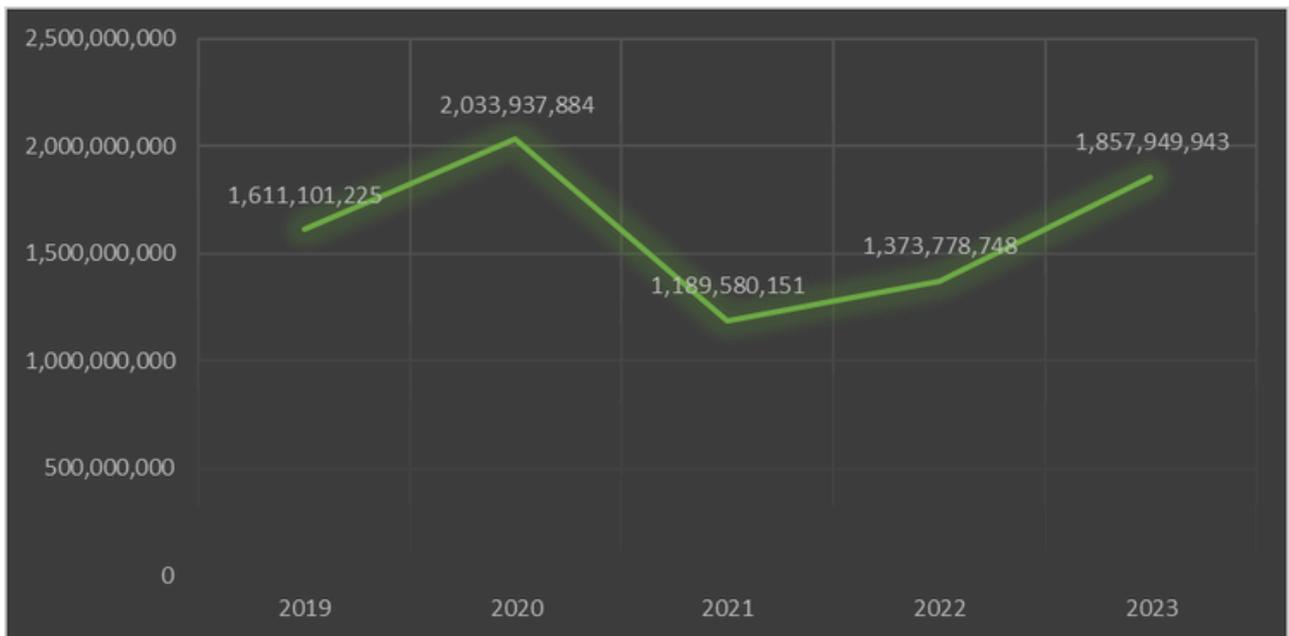
1. **Penciptaan Lapangan Kerja.** UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk di sektor informal, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. **Penggerak Ekonomi Lokal.** UMKM berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di tingkat daerah, terutama di wilayah pedesaan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata.
3. **Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).** Sebagai salah satu sektor yang mendominasi jumlah usaha di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB, baik di tingkat nasional maupun regional.
4. **Inovasi dan Kreativitas.** UMKM sering kali menjadi tempat lahirnya inovasi produk dan jasa, karena fleksibilitasnya dalam menciptakan solusi kreatif untuk kebutuhan pasar yang terus berkembang.
5. **Pengentasan Kemiskinan.** UMKM membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka dengan memberikan peluang usaha dan pendapatan tambahan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.
6. **Diversifikasi Ekonomi.** Kehadiran UMKM dalam berbagai sektor membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, sehingga ekonomi menjadi lebih tahan terhadap guncangan global.
7. **Mendorong Kemandirian Ekonomi.** UMKM memberdayakan individu dan komunitas untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.
8. **Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.** Banyak UMKM berbasis pada tradisi lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan seni, sehingga berkontribusi dalam melestarikan budaya daerah sekaligus memperkenalkannya ke pasar yang lebih luas.



B. Perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara produsen, distributor, dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Perdagangan dapat dilakukan secara langsung melalui barter atau secara tidak langsung menggunakan alat tukar seperti uang. Kegiatan perdagangan merupakan tulang punggung ekonomi karena berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi barang dan jasa.

Gambar 4.21.3. Omset Pasar Kabupaten Berau (Rupiah), 2019-2023

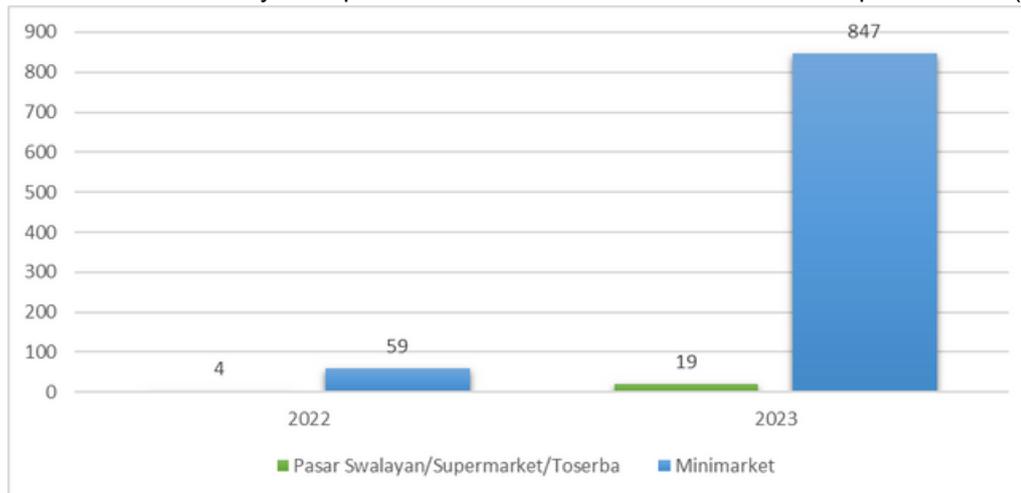


Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki pasar tradisional berjumlah dua buah. Sejak tahun 2019 hingga 2023, omset yang diperoleh dari kedua pasar mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, omset yang diterima dari kedua pasar tersebut berjumlah 1,61 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 2 miliar rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2021 omset yang diperoleh dari kedua pasar mengalami penurunan menjadi 1,18 miliar rupiah. Pada tahun 2022, omset yang diperoleh dari kedua pasar tersebut meningkat menjadi 1,37 miliar rupiah dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,86 miliar rupiah.



Gambar 4.21.4. Jumlah Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba dan Minimarket di Kabupaten Berau (Unit), 2022-2023



Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau

Selain pasar tradisional, di Kabupaten Berau juga terdapat pasar modern (swalayan, supermarket, dan toserba, dan minimarket). Pasar modern di Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba di Kabupaten Berau adalah sebanyak 4 unit. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 19 unit. Selanjutnya, jumlah unit minimarket meningkat menjadi sebanyak 59 unit di tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2023, jumlah unit minimarket di Kabupaten Berau menjadi 847 unit atau mengalami peningkatan sebesar 1.335 persen.

Pasar tradisional dan modern memiliki dampak bagi masyarakat Kabupaten Berau. Beberapa dampak adanya pasar tradisional dan modern di Kabupaten Berau antara lain:

1. **Pendorong Perekonomian.** Keberadaan pasar berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan saluran distribusi bagi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas perdagangan yang mendatangkan pendapatan untuk negara dan pedagang. Selain itu, keberadaan pasar juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat lokal maupun nasional.
2. **Menciptakan Lapangan Kerja.** Keberadaan pasar memunculkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pasar tradisional lebih banyak memberikan peluang kerja di sektor informal, sedangkan pasar modern membuka peluang kerja di sektor formal. Keduanya turut mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
3. **Meningkatkan Mobilitas Ekonomi.** Adanya pasar turut meningkatkan mobilitas ekonomi dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke berbagai produk, memudahkan distribusi barang, dan membuka peluang bagi produsen untuk memperluas jangkauan pasarnya.
4. **Pemberdayaan Masyarakat.** Salah satu dampak adanya pasar di suatu daerah adalah pemberdayaan masyarakat bagi daerah tersebut. Sebagai tempat pemberdayaan bagi masyarakat, baik melalui peluang usaha bagi pedagang lokal di pasar tradisional maupun kesempatan untuk berkembang dan berinovasi bagi produsen di pasar modern. Pasar tradisional sering kali memberdayakan UMKM, sementara pasar modern dapat membantu UMKM memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kualitas produk mereka.



PROFIL DAERAH KABUPATEN BERAU 2023

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Sebelah Timur berbatasan dengan laut Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Sebagai daerah dengan perkembangan pariwisata, perkebunan, pertanian dan perikanan cukup pesat, informasi tentang Kabupaten Berau perlu dituangkan ke dalam buku profil daerah sehingga informasi tersebut dapat dijadikan rujukan ataupun wawasan bagi berbagai kalangan.

Melalui Buku Profil Daerah ini diharapkan dapat menggambarkan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Berau dari segala aspek. Profil daerah Kabupaten Berau tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang bertujuan untuk melakukan rujukan, namun juga bagi berbagai kalangan yang membutuhkan informasi- informasi terkait Kabupaten Berau.